



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
Nomor 15 Tahun 2008**

**Tentang**

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2005 - 2025**

*Diperbanyak oleh :*

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2008**



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 15 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005 - 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
  - b. bahwa Provinsi Kalimantan Timur memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - c. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kalimantan Timur tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

dan

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005-2025.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kalimantan Timur.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

## **BAB II**

### **PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

#### **Pasal 2**

- (1) Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 3**

RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 mengacu kepada RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

#### **Pasal 4**

Berpedoman kepada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 pada setiap tahap 5 (lima) Tahunan, sejalan dengan pergantian Gubernur akan disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

#### **Pasal 5**

RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berisi :

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Gambaran Umum
- Bab III. Visi dan Misi Pembangunan
- Bab IV. Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab V. Skenario dan Tahapan Pembangunan
- Bab VI. Penutup

#### **Pasal 6**

- (1) RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Gubernur.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya.

#### **Pasal 8**

- (1) RPJPD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten/Kota yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB III**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 10**

- (1) Ketentuan mengenai RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sejak tanggal ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJPD Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah Provinsi yang telah disesuaikan dengan RPJP Nasional paling lambat 6 (enam) bulan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda,  
pada tanggal 29 Oktober 2008

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

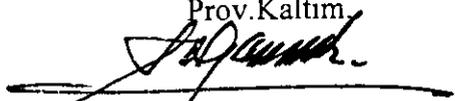
**TARMIZI A. KARIM**

Diundangkan di Samarinda,  
pada tanggal 29 Oktober 2008  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**H. SYAIFUL TETENG**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda  
Prov. Kaltim.

  
**H. SOFYAN HELMI, SH. M. Si**  
Pembina Tingkat I  
Nip. 550 011 071



**GUBERNUR  
KALIMANTAN TIMUR**

**LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 15 TAHUN 2008**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005 - 2025**

# **D**AFTAR ISI

	Hal
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A.   Pengertian	1
B.   Maksud dan Tujuan	1
C.   Landasan Hukum	2
D.   Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
E.   Tata Urut	3
<b>BAB II     KONDISI UMUM</b>	<b>4</b>
A.   Gambaran Umum	4
B.   Kondisi Saat ini, Perkiraan Masa Depan dan Isu Strategis	6
<b>BAB III    VISI, MISI    DAN SASARAN PEMBANGUNAN    JANGKA PANJANG DAERAH</b>	<b>42</b>
A.   Visi dan Misi	42
B.   Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah	43
<b>BAB IV    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH</b>	<b>46</b>
A.   Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur Yang Mandiri, Berdaya Saing Tinggi dan Berakhlak Mulia	46
B.   Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Andal Dengan Partisipasi Masyarakat yang Seluas-luasnya	55
C.   Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat secara Merata dan Proporsional	67
D.   Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum	71
E.   Mewujudkan Pembangunan Yang Terpadu dan Serasi Dengan Pendekatan Pengembangan Wilayah Berbasis Ekonomi Dan Ekologi	76
<b>BAB V     SKENARIO DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH</b>	<b>81</b>
<b>A   Skenario Pembangunan Jangka Panjang Daerah</b>	<b>81</b>
1. Skenario Pembangunan Wilayah	81
2. Skenario Pengembangan Ekonomi	84
<b>B.   Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah</b>	<b>87</b>
1. RPJMD Ke-1 (2005 - 2008)	87
2. RPJMD Ke-2 (2009 - 2013)	93
3. RPJMD Ke-3 (2014 - 2018)	99
4. RPJMD Ke-4 (2019 - 2023)	105
5. RPJMD Ke-5 (2024 - 2025)	112
<b>BAB VI    PENUTUP</b>	<b>117</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan di daerah untuk 20 tahun ke depan. Dalam penyusunannya, RPJPD mengacu pada RPJP Nasional 2005-2025 yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007.

RPJPD Provinsi Kalimantan Timur ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang berdimensi waktu lima tahunan untuk selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berdimensi tahunan. Dalam penyusunannya, RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Penetapan visi dan misi pembangunan selain mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh norma dan nilai yang diusulkan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan juga memperhitungkan kondisi saat ini, potensi, isu strategis yang perlu diatasi, serta perkiraan masa depan dalam dua puluh tahun mendatang.

Strategi, arah kebijakan, skenario dan tahapan pembangunan selanjutnya dirumuskan secara komprehensif, efektif dan efisien guna menjamin kesinambungan dan keberlangsungan pembangunan jangka panjang (20 tahunan/RPJP), jangka menengah (5 tahunan/RPJM-Renstra) dan jangka pendek (1 tahunan/RKPD). Dengan demikian penyusunan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur sangat penting dalam menentukan arah pembangunan di Kalimantan Timur.

### B. Maksud dan Tujuan

RPJP Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka panjang daerah dalam 20 tahun mendatang. Selain itu, penyusunan RPJP Daerah juga dimaksudkan untuk menjamin terjadinya keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah dalam mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

RPJP Daerah disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan acuan bagi para calon Kepala Daerah dalam menyusun program kerja yang akan disampaikan pada masa pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, RPJP Daerah disusun dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan daerah; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah dan pusat; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; serta menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam waktu lima tahunan.

Rencana yang termuat di dalam RPJPD Kalimantan Timur merupakan rencana jangka panjang daerah dari semua aspek pembangunan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan adanya penyempurnaan sesuai perkembangan dan perubahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur.

### **C. Landasan Hukum**

Penyusunan RPJP Daerah Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 didasarkan pada Pancasila sebagai Landasan Idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional dan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perencanaan sebagai landasan operasional, yaitu:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

### **D. Hubungan RPJPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya**

#### **1. Hubungan RPJPD Kalimantan Timur dan RPJP Nasional**

Penyusunan RPJPD Kalimantan Timur mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJP Nasional termasuk penetapan jangka waktu dan tahapan pembangunan lima tahunan.

#### **2. Hubungan RPJPD Kalimantan Timur dan RPJMD**

RPJPD Kalimantan Timur sebagai pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah, serta menjadi acuan bagi Kepala Daerah terpilih dalam menyusun strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan RPJMD. RPJPD Kalimantan Timur juga menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, swasta, dan segenap warga masyarakat menuju pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab.

#### **3. Hubungan RPJPD Kalimantan Timur dan RPJPD Kabupaten/Kota**

RPJPD Kalimantan Timur menjadi dasar bagi penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota terutama untuk sinkronisasi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, serta strategi dan arah kebijakan yang bersifat lintas kabupaten/kota.

#### 4. Hubungan RPJPD dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur

RPJP Daerah Kalimantan Timur memuat arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam wilayah administrasi Kalimantan Timur dengan memanfaatkan seluruh ruang daratan, lautan dan udara. RTRW Provinsi Kalimantan Timur memuat rencana penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah sesuai dengan arah kebijakan RPJP Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian RPJPD Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat dipisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Timur.

### E. Tata Urut

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kalimantan Timur Tahun 2005 -2025 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

#### 1. Bab I Pendahuluan

Memuat pengertian RPJPD Kalimantan Timur, proses penyusunan, maksud dan tujuan serta sasaran penyusunan RPJPD Kalimantan Timur, landasan hukum, hubungan RPJPD Kalimantan Timur dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan sistematika penulisan.

#### 2. Bab II Kondisi Umum

Kondisi umum menjelaskan gambaran umum dan kondisi saat ini, perkiraan masa depan dan isu strategis dalam berbagai aspek pembangunan

#### 3. Bab III Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Menjelaskan visi pembangunan daerah atau keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan jangka panjang daerah, dan misi pembangunan daerah atau upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Dalam bab ini dijelaskan pula sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

#### 4. Bab IV Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Menjelaskan berbagai strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

#### 5. Bab V Skenario dan Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Menguraikan skenario pembangunan jangka panjang daerah terutama skenario pembangunan ekonomi dan skenario pembangunan wilayah. Bab ini juga menjelaskan tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang lima tahun (RPJMD) Pertama, RPJMD Kedua, RPJMD Ketiga, dan RPJMD keempat serta RPJMD kelima.

#### 6. Bab VI Penutup

Menguraikan RPJPD Kalimantan Timur sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (rencana pembangunan lima tahunan) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (rencana pembangunan tahunan).



## BAB II

### KONDISI UMUM

#### A. Gambaran Umum

Kalimantan Timur sebagai wilayah administrasi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 2 (dua) kota: Samarinda dan Balikpapan, dan 4 (empat) Kabupaten masing-masing Kutai, Paser, Berau dan Bulungan.

Dalam perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dibentuk 2 (dua) kota administratif dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu: Kota Administratif Tarakan dan Bontang. Selanjutnya wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur berubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan demikian pada tahun 2005, wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas sembilan (9) Kabupaten, yaitu: Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Bulungan, Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Paser, dan empat (4) Kota, yaitu: Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Tarakan. Kemudian pada tahun 2007 terbit Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung dengan Ibukotanya Tidung Pale, maka Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 14 Kabupaten/Kota.

Provinsi Kalimantan Timur terletak pada kedudukan  $4^{\circ} 24'$ Lintang Utara (LU),  $2^{\circ} 25'$ Lintang Selatan (LS),  $113^{\circ} 44'$ Bujur Timur (BT), dan  $119^{\circ} 00'$ Bujur Barat. Posisi Kalimantan Timur sangat strategis sebagai jalur transportasi laut internasional karena berbatasan dengan wilayah perairan Selat Makassar dan Laut Sulawesi yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II).

Provinsi Kalimantan Timur terletak di bagian Timur Pulau Kalimantan dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Malaysia (Negara Bagian Sabah);
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalimantan Selatan;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Malaysia (Negara Bagian Serawak).

Luas Provinsi Kalimantan Timur adalah 20.865.774 ha meliputi wilayah daratan seluas 19.844.117 ha (95,1%) dan wilayah lautan sejauh 12 mil laut dari garis pantai terluar ke arah laut seluas 1.021.657 ha (4,9%). Wilayah Provinsi Kalimantan Timur memiliki topografi bergelombang dari kemiringan landai hingga curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1.000 meter dari permukaan laut (dpl) dengan kemiringan 0-40%. Kondisi fisiografi Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh pegunungan dan dataran. Wilayah pegunungan sebagian besar tersebar di bagian barat Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bulungan, Malinau dan Kutai Barat hingga perbatasan Malaysia. Wilayah pantai, rawa pasang surut, daratan aluvial, jalur endapan

dan sungai berada di kawasan pesisir timur, sedangkan wilayah dataran dan lembah aluvial umumnya mengikuti arah aliran sungai.

Kalimantan Timur memiliki sumber kekayaan yang cukup besar, baik berupa sumberdaya alam, pariwisata, dan kelautan antara lain:

1. Potensi sumberdaya mineral dan energi berupa minyak dengan produksi rata-rata per tahun sebesar 1,17 ton MMSTB, gas bumi dengan produksi sebesar 48.680 BSCF per tahun, batubara dengan produksi sebesar 21,00 milyar ton per tahun dan emas/perak dengan cadangan 60,50 juta ton.
2. Potensi hutan seluas kurang lebih 14,67 juta ha. yang meliputi kawasan hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi.
3. Potensi lahan yang ditetapkan untuk kawasan budidaya non kehutanan seluas 5,24 juta ha., lahan perkebunan seluas 4,7 ha. yang terbagi untuk kelapa sawit 4,09 juta ha. dan 0,61 juta ha. untuk perkebunan lainnya, serta lahan pertanian 0,6 juta ha.
4. Potensi pariwisata yang meliputi pariwisata alam, seni dan budaya, sejarah dan kehidupan masyarakat pedalaman/perbatasan.
5. Potensi perairan meliputi perairan laut 98.000 km<sup>2</sup> dan perairan umum 2,28 juta ha, termasuk wilayah budidaya tambak, sungai dan danau. Potensi hasil perikanan tambak rata-rata 350 ribu ton per tahun.
6. Potensi komoditas unggulan tersebar di kabupaten/kota, yaitu: (1) Kabupaten Pasir dengan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, padi, pisang, perikanan, batubara dan Hutan Tanaman Industri (HTI); (2) Kabupaten Kutai Barat dengan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, durian, rambutan, perikanan darat, batubara dan emas; (3) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, padi, lada, pisang, nanas, perikanan, pariwisata, batubara, HTI dan gas; (4) Kabupaten Kutai Timur dengan komoditas unggulan kelapa sawit, pisang, jagung, karet, batubara dan HTI; (5) Kabupaten Berau dengan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, padi, kedelai, perikanan, kelapa, pariwisata, dan batubara; (6) Kabupaten Malinau dengan komoditas unggulan kakao, kelapa sawit, nanas, cempedak, HTI, dan batubara; (7) Kabupaten Bulungan dengan komoditas unggulan kelapa sawit, durian, kakao, perikanan, cempedak, metanol, dan HTI; (8) Kabupaten Nunukan dengan komoditas unggulan kakao, kelapa sawit, perikanan, padi adan (Bario), jagung, ayam Nunukan, minyak bumi, HTI dan garam gunung; (9) Kabupaten Penajam Paser Utara dengan komoditas unggulan perikanan, kelapa sawit, durian, karet dan HTI; (10) Kabupaten Tana Tidung dengan komoditas unggulan kakao, kelapa sawit, cempedak dan durian; (11) Kota Balikpapan dengan komoditas unggulan perikanan, pariwisata, dan pengilangan minyak bumi; (12) Kota Samarinda dengan komoditas unggulan perikanan, pariwisata, lada dan batubara; (13) Kota Tarakan dengan komoditas unggulan udang, ayam ras, dan minyak bumi; dan (14) Kota Bontang dengan komoditas unggulan perikanan, pupuk dan gas.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya tersebut telah memberikan sumbangan nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur dengan indikator sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan migas atas dasar berlaku pada tahun 1995 sebesar Rp. 21,619 trilyun meningkat menjadi Rp. 156,43 trilyun pada tahun 2005, dan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp. 261,537 trilyun pada tahun 2015.

2. Pertumbuhan ekonomi dengan migas atas dasar harga berlaku sebelum krisis ekonomi (1994-1997) rata-rata sebesar 7,14% per tahun kemudian menurun menjadi rata-rata sebesar 2,88% pertahun setelah terjadi krisis ekonomi (1998-2004).
3. PDRB per kapita dengan migas pada awal terjadinya krisis ekonomi (1998) adalah sebesar Rp. 22,39 juta dan PDRB per kapita tanpa migas adalah Rp. 9,68 juta. Data terakhir menunjukkan PDRB perkapita mengalami peningkatan, yaitu dengan migas menjadi Rp. 32,93 juta dan tanpa migas menjadi Rp. 14,15 juta.
4. Struktur perekonomian daerah didominasi oleh dua sektor ekonomi, yaitu: sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan. Dalam lima tahun terakhir, kedua sektor ini memberikan kontribusi rata-rata sekitar 65% terhadap PDRB Kalimantan Timur.
5. Realisasi ekspor non-migas Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2001-2005) meningkat rata-rata sebesar 18% per tahun dengan nilai ekspor sebesar US\$ 1,87 milyar pada tahun 2001 dan sebesar US\$ 3,63 miliar pada akhir tahun 2005.
6. Investasi selama masa pemulihan ekonomi setelah krisis masih bersifat fluktuatif, namun cenderung membaik yang ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah surat persetujuan PMDN dan PMA yang diterbitkan. Dalam lima tahun terakhir PMDN meningkat rata-rata sebesar 109,19%, sedangkan PMA meningkat rata-rata sebesar 124,41%.
7. Di bidang fiskal, daerah Kalimantan Timur telah pula memberikan kontribusi peningkatan pendapatan baik terhadap Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Nasional.
8. Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Timur pada tahun 2005 menduduki peringkat ke-6. Hal ini menunjukkan kinerja pembangunan daerah yang relatif tinggi terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan.

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Di samping kemajuan yang telah dicapai, masih banyak permasalahan yang belum sepenuhnya terpecahkan, dan masih banyak tantangan pembangunan Kalimantan Timur yang perlu diatasi dalam 20 tahun ke depan.

## **B. Kondisi Saat ini, Perkiraan Masa Depan dan Isu Strategis**

Bagian ini membahas kondisi saat ini Provinsi Kalimantan Timur, perkiraan masa depan dan isu strategis pembangunan yang berkaitan dengan sumberdaya manusia, ekonomi, prasarana dan sarana, hukum dan pemerintahan, serta tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

### **1. Penduduk**

#### **a. Kondisi Saat Ini**

Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 1996 adalah 2,34 juta jiwa, dan meningkat menjadi 2,44 juta jiwa pada tahun 2000, dan 2,85 juta jiwa pada tahun 2005. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata selama 1990-2000 adalah 2,72% dan selama 2000-2005 adalah 4,04% terutama disebabkan oleh arus masuk penduduk dari wilayah lain. Tingkat pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi

dibanding laju pertumbuhan penduduk rata-rata nasional. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata pada tahun 2005 adalah 15 jiwa/km<sup>2</sup>.

Penyebaran penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2005 terpusat di daerah perkotaan terutama Kota Samarinda (20,22% dari jumlah penduduk) dan Kota Balikpapan (16,54%), serta Kabupaten Kutai Kartanegara (17,27%). Penduduk perkotaan sebanyak 1,33 juta jiwa atau sekitar 46,57% dari seluruh penduduk. Luas daerah perkotaan adalah 2,59 ribu km<sup>2</sup> atau 1,13% dari total luas seluruh daratan Kalimantan Timur dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 421,99 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara itu, sebanyak 1,52 juta jiwa atau 53,43% penduduk tersebar di sembilan kabupaten yang mempunyai luas wilayah daratan 227,27 ribu km<sup>2</sup> (98,87% dari total luas daratan) dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata di kabupaten hanya 10,20 jiwa/km<sup>2</sup>.

Berdasarkan struktur umur penduduk pada tahun 2005, penduduk Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 63,5% penduduk usia produktif (15-55 tahun) dan 30,6% penduduk usia belum produktif (kurang dari 15 tahun). Menurut jenjang pendidikan, 47,5% penduduk Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2005 berpendidikan dasar setingkat SD dan SLTP, 23,8% penduduk berpendidikan menengah setingkat SLTA, dan 5,65% penduduk berpendidikan tinggi setingkat diploma/akademi/universitas. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki di Kalimantan Timur masih lebih banyak dibanding perempuan.

Berdasarkan derajat kesejahteraan, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur menurun dari 532.711 jiwa pada tahun 2000 menjadi 318.004 jiwa pada tahun 2004 dan sekitar 299.100 orang atau sekitar 10,57% dari jumlah penduduk pada tahun 2005. Penduduk miskin sebagian besar tinggal di wilayah perdesaan, pedalaman dan perbatasan.

#### **b. Perkiraan Masa Depan**

Dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,24% per tahun, jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai kurang lebih 4,78 juta jiwa. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana di seluruh wilayah, persebaran penduduk akan lebih merata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penduduk usia produktif akan meningkat yang memerlukan dukungan peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan.

#### **c. Isu Strategis**

- 1). Perlu adanya pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin terutama penduduk miskin yang tinggal di wilayah perdesaan, pedalaman dan perbatasan.
- 2). Perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih bermutu.
- 3). Perlu adanya penyebaran penduduk secara merata dengan mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan, pedalaman, dan perbatasan.
- 4). Perlu adanya peningkatan mutu layanan publik bagi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

## 2. Pendidikan

### a. Kondisi Saat Ini

Kondisi pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur saat ini ditandai oleh belum meratanya layanan pendidikan terutama di wilayah perdesaan, pedalaman dan perbatasan, belum optimalnya peningkatan mutu pendidikan, dan terbatasnya layanan pendidikan tinggi.

Angka partisipasi sekolah SD/MI dan angka partisipasi sekolah SMP/MTs di perdesaan ternyata masih rendah dibanding angka partisipasi sekolah di daerah perkotaan. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya fasilitas pendidikan di daerah perdesaan.

Pendidikan tertinggi penduduk usia 10 tahun ke atas di Kalimantan Timur cenderung membaik. Jumlah penduduk tidak/belum pernah sekolah pada tahun 2001 tercatat sebesar 5,69% dan menurun menjadi 4,54% pada tahun 2005. Penduduk yang tidak/belum tamat SD/MI menurun dari 21,75% menjadi 18,49% dan penduduk tamat SD menurun dari 29,13% menjadi 28,32%. Di sisi lain, penduduk lulusan SLTP/MTs, SLTA/MA, dan akademi/perguruan tinggi.

Mutu pendidikan dapat diukur dari nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs bidang studi matematika adalah 6,06, bahasa Indonesia 6,45; dan bahasa Inggris 5,99. Nilai rata-rata tersebut masih diatas nilai rata-rata nasional. Nilai rata-rata ujian nasional tingkat SMA untuk jurusan IPA adalah 5,98; IPS 6,00; dan Bahasa 6,50. Tingkat kelulusan mencapai 99,74%. Mutu pendidikan juga diukur dari angka buta huruf usia 4-59 tahun yang tercatat pada tahun 2005 sebanyak 19,62%, dan angka buta huruf penduduk usia 4-14 tahun sebesar 15,42%.

### b. Perkiraan Masa Depan

Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk usia sekolah dari usia 4-24 tahun pada tahun 2011 adalah 1,43 juta jiwa, pada tahun 2016 sebanyak 1,45 juta jiwa, pada tahun 2021 sebanyak 1,85 juta jiwa, dan pada tahun 2026 sebanyak 2,04 juta jiwa. Dengan hasil proyeksi tersebut, perkiraan fasilitas pendidikan yang diperlukan adalah 6.678 unit pada tahun 2011, 7.628 unit pada tahun 2016, 8.492 unit pada tahun 2021, dan 9.354 unit pada tahun 2026. Selain itu, rasio guru terhadap murid yang ideal adalah 1:21 sehingga perkiraan jumlah tenaga pendidik yang diperlukan pada tahun 2011 adalah sebanyak 63.217 orang, tahun 2016 sebanyak 64.495, tahun 2021 sebanyak 76.880 orang, dan tahun 2026 sebanyak 83.073 orang. Dengan adanya peningkatan layanan pendidikan dan penambahan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik, maka angka buta huruf penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2026 diperkirakan akan menjadi 0%.

Perkiraan lain yang berkaitan dengan pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1). Pencapaian dan pemenuhan pendidikan wajib belajar 9 tahun akan semakin merata di seluruh kabupaten/kota.
- 2). Tingkat dan partisipasi pendidikan akan menjadi lebih baik, namun secara rata-rata nasional masih akan tetap tertinggal.
- 3). Dalam waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan, lebih dari 50% sekolah di setiap kabupaten/kota akan menerapkan pendidikan bermutu sesuai dengan standar nasional.

- 4). Sebelum masa RPJPD ini berakhir diharapkan lebih dari 75% sekolah di setiap kabupaten/kota menerapkan sistem pendidikan sesuai dengan standar nasional.
- 5). Pada saat berakhirnya RPJPD ini diharapkan pendidikan Kalimantan Timur sudah dapat memenuhi standar nasional.
- 6). Berkembangnya berbagai program pendidikan unggulan dan pendidikan khusus bertaraf internasional sesuai dengan perubahan struktur ekonomi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

**c. Isu Strategis**

- 1). Perlu adanya pemerataan dan penuntasan wajib belajar 9 tahun terutama bagi penduduk di wilayah perdesaan, pedalaman, terpencil dan perbatasan.
- 2). Perlu adanya peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional.
- 3). Perlu adanya peningkatan mutu pendidikan khusus terutama bagi penduduk dengan kemampuan khusus.
- 4). Perlu adanya pengembangan sekolah unggulan dengan standar internasional.
- 5). Perlu adanya penguatan keterkaitan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan.

**3. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

**a. Kondisi Saat Ini**

Penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan selama ini menyangkut penelitian kebijakan seperti efektivitas subsidi sembako, pemerintahan, kemasyarakatan, pendidikan, dan kebudayaan; penelitian terapan seperti penelitian transportasi, konservasi alam, ekonomi unggulan, peningkatan pertanian, lingkungan, teknologi dan informasi; serta kajian politik dan kepegawaian. Hasil penelitian dan pengembangan ilmu dan pengetahuan belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah.

**b. Perkiraan Masa Depan**

Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi, informasi dan telekomunikasi yang begitu pesat akan mempengaruhi kecepatan dan kemajuan pembangunan daerah di masa depan. Perkiraan masa depan adalah sebagai berikut:

- 1) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin meningkat sejalan dengan perbaikan mutu dan jangkauan layanan pendidikan.
- 2) Mutu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin meningkat untuk mendorong pengembangan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah berbasis pengetahuan dan teknologi.
- 3) Partisipasi dan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin meningkat.

### c. Isu Strategis

- 1) Perlu adanya peningkatan dan pengembangan riset ilmu-ilmu dasar dan terapan sesuai dengan perkembangan teknologi global untuk mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing daerah.
- 2) Perlu adanya pemanfaatan hasil penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.
- 3) Perlu adanya pengembangan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari para pelaku usaha/industri swasta besar dan perguruan tinggi kepada masyarakat.
- 4) Perlu adanya peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta dalam pengembangan riset unggulan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

## 4. Kesehatan

### a. Kondisi Saat Ini

Kondisi pembangunan kesehatan ditunjukkan oleh perkembangan derajat kesehatan, kapasitas layanan kesehatan, kondisi lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat.

#### 1). Derajat Kesehatan

Derajat kesehatan penduduk Kalimantan Timur cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Angka kematian bayi menurun dari 37 per 1.000 penduduk pada tahun 2000 menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2005. Angka kematian balita menurun dari 35 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2001 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2005. Angka kematian ibu bersalin mencapai 461 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2001 menjadi 281 pada tahun 2005. Kondisi ini menyebabkan angka harapan hidup mencapai 72,9 tahun dengan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) yang dapat terlayani kesehatan sebanyak 3,4%.

Berdasarkan hasil pemantauan status gizi balita di Provinsi Kalimantan Timur, kasus gizi buruk balita menurun dari 798 (3,20%) pada tahun 2000 menjadi 603 (2,2%) pada tahun 2004 dan menurun lagi menjadi hanya 1,6% pada tahun 2005. Pada tahun 2005 mencapai persentase gizi lebih 3,56%, gizi baik 70,75%, gizi kurang 20,16% dan gizi buruk 5,53%. Kondisi ini menunjukkan bahwa balita dengan gizi lebih dan baik ternyata sekitar 74,31%, dan balita dengan gizi kurang dan buruk sekitar 25,69%.

#### 2). Kapasitas Pelayanan Kesehatan

Kapasitas pelayanan kesehatan di Kalimantan Timur dilihat dari persentase pertolongan ibu bersalin oleh tenaga medis pada tahun 2005 mencapai 73,26%, persentase desa mencapai *universal child immunization* 78,17%, penanganan desa yang terkena kejadian luar biasa yang ditangani kurang dari 24 jam sebesar 94,44%, ibu hamil yang mendapat tablet Zat Besi (Fe) sebesar 71,41%, bayi yang mendapat pelayanan ASI eksklusif mencapai 39,21%, persentase murid SD/MI yang mendapat pemeriksaan gigi dan mulut

mencapai 39,21%, pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin mencapai 67,55%, serta jaminan kesehatan prabayar mencapai 35,05%. Kondisi ini menyiratkan perlunya peningkatan pemberian ASI eksklusif pada bayi, peningkatan kesehatan murid SD/MI serta jaminan pelayanan pemeliharaan kesehatan pada pekerja dan keluarga miskin.

Rasio jumlah tenaga medis dan rumah sakit di Kalimantan Timur tertinggi adalah 19 dokter di Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah dokter umum adalah 1,5 per 100.000 penduduk, dokter gigi mencapai 0,6 per 100.000 penduduk, dokter spesialis dasar (dokter kebidanan, dokter bedah, dokter anak, dan dokter ahli dalam) rata-rata mencapai rasio 0,4 per 100.000 penduduk, dan rasio tenaga paramedis mencapai 9 per 100.000 penduduk. Tenaga medis belum tersebar secara merata di seluruh kabupaten/kota dan masih mengalami kekurangan tenaga dokter spesialis dasar dan tenaga ahli kesehatan.

### 3). Kondisi Lingkungan dan Perilaku Masyarakat

Pada tahun 2005 persentase rumah sehat mencapai 69,70%, tempat-tempat umum sehat mencapai 80,54%, dan posyandu purnama dan mandiri mencapai 37,13%. Hal ini perlu adanya peningkatan lingkungan sehat yang dapat mencegah sejak dini terhadap penyakit menular dan wabah.

Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih sehat pada tahun 2005 adalah 47,84% atau 59,1 ribu rumah tangga dari sekitar 123,5 ribu rumah tangga yang diamati. Rata-rata persentase penduduk yang memanfaatkan rumah sakit hanya mencapai 14,58% dan yang memanfaatkan puskesmas 76%. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan.

#### b. Perkiraan Masa Depan

Dalam 20 tahun mendatang derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Timur diperkirakan akan semakin meningkat yang ditandai oleh menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, meningkatnya angka harapan hidup, dan menurunnya wabah dan endemi, serta berkurangnya gizi kurang dan buruk pada balita. Selain itu, pelayanan kesehatan akan semakin baik yang ditandai oleh peningkatan jumlah dan mutu tenaga medis, peningkatan kesejahteraan dan pengurangan masyarakat miskin. Selanjutnya perilaku hidup sehat juga akan meningkat melalui pencegahan sejak dini terhadap penyakit menular dan wabah.

#### c. Isu Strategis

- 1). Perlu adanya peningkatan dan pengembangan perilaku dan budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat.
- 2). Perlu adanya pemerataan jangkauan layanan kesehatan ke seluruh kabupaten/kota terutama wilayah perdesaan, pedalaman dan perbatasan melalui pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga medis.
- 3). Perlu peningkatan mutu layanan kesehatan sesuai dengan standar nasional.
- 4). Perlu adanya pengembangan pusat layanan kesehatan yang memenuhi standar internasional.

## 5. Ketenagakerjaan

### a. Kondisi Saat Ini

Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja di Kalimantan Timur juga meningkat dari 1,02 juta jiwa pada tahun 1996 menjadi 1,17 juta jiwa pada tahun 2004, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) meningkat dari 55,6% menjadi 62,67%. Sampai dengan tahun 2005, penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah sebesar 1.171.891 orang (60,22%) dan 744.285 orang (39,78%) bukan angkatan kerja.

Penduduk Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar berusaha di sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa. Penyerapan jumlah tenaga kerja ternyata pada tahun 2005 sebesar 91,4 ribu jiwa belum seimbang dengan jumlah pencari kerja sebanyak 140,86 ribu jiwa. Tingkat pengangguran terbuka di empat kota utama Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Tarakan rata-rata mencapai 14,24% yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja dan meningkatnya jumlah pencari kerja terutama dari pertambahan penduduk usia kerja, migrasi penduduk dari daerah lain dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan perkayuan. Selain itu, rendahnya jumlah jam kerja di beberapa kabupaten menunjukkan terbatasnya kesempatan kerja dan rendahnya produktivitas tenaga kerja sebagai akibat masih rendahnya pendidikan dan keterampilan para tenaga kerja.

### b. Perkiraan Masa Depan

Peningkatan pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja terutama pada sektor-sektor unggulan. Peningkatan produktivitas juga diharapkan akan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam daerah dan meningkatkan PDRB secara optimal. Secara keseluruhan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja akan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan wilayah Kalimantan Timur.

### c. Isu Strategis

- 1). Perlunya adanya peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan.
- 2). Perlunya pengembangan semangat dan jiwa kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru.
- 3). Perlu adanya perbaikan iklim investasi untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.
- 4). Perlunya adanya sinkronisasi antara pembangunan pendidikan dan keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja.

## 6. Peranan Wanita

### a. Kondisi Saat Ini

Peran perempuan dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik di Kalimantan Timur ternyata masih belum optimal. Jumlah pejabat wanita dalam struktur pemerintahan pada tahun 2005 sebanyak 30 jiwa atau sebesar 9,2%,

sedangkan jumlah pejabat wanita dalam organisasi politik sebanyak 6 orang atau sebesar 7,8%.

**b. Perkiraan Masa Depan**

Dalam 20 tahun mendatang, peran dan fungsi perempuan diperkirakan akan terus meningkat baik dalam pembangunan ekonomi, sosial, maupun politik. Selain itu, kesetaraan dan keadilan gender diperkirakan akan semakin membaik sehingga memberi ruang yang luas bagi perempuan untuk berperan lebih aktif dalam seluruh bidang pembangunan.

**c. Isu Strategis**

- 1). Perlu adanya pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundangan-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran.
- 2). Perlu adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik.
- 3). Perlu adanya upaya peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik.

**7. Pemuda dan Olah raga**

**a. Kondisi Saat Ini**

Perkembangan kegiatan kepemudaan dalam periode 2000-2004 ternyata belum menunjukkan peningkatan yang ditandai oleh berkurangnya jumlah karang taruna dan rendahnya jumlah kegiatan kepemudaan. Sedangkan kondisi olah raga cukup baik, namun belum menunjukkan prestasi yang disebabkan oleh keterbatasan sarana dan pembinaan olahraga.

**b. Perkiraan Masa Depan**

Jumlah penduduk usia muda dalam 20 tahun ke depan diperkirakan terus meningkat sehingga perlu penguatan organisasi kepemudaan untuk meningkatkan peran pemuda dalam bidang sosial, pendidikan, seni budaya dan olahraga; serta memperluas peran pemuda dalam pembangunan. Selain itu, perluasan kegiatan dan penguatan organisasi kepemudaan akan memerlukan dukungan penyediaan prasarana dan sarana seni-budaya dan olah raga.

Dalam 20 tahun ke depan, peran aktif masyarakat dalam pengembangan dan pembinaan kepemudaan dan olah raga akan semakin meningkat sehingga prestasi dalam bidang pendidikan, seni dan budaya, dan olah raga Kalimantan Timur akan terus meningkat.

**c. Isu Strategis**

- 1). Perlu adanya penguatan dan pembinaan prestasi bagi pemuda dalam bidang pendidikan sesuai dengan standar nasional dan internasional.
- 2). Perlu adanya peningkatan prestasi olah raga di setiap cabang olahraga sesuai dengan standar nasional dan internasional.
- 3). Perlu adanya peningkatan peran pemuda dalam upaya pelestarian seni dan budaya Kalimantan Timur.

## 8. Agama

### a. Kondisi Saat Ini

Penduduk Provinsi Kalimantan Timur saat ini sebagian besar memeluk agama Islam, yaitu 2,24 juta jiwa atau 81,48% dari seluruh penduduk. Tempat ibadah masjid, langgar dan musholla, gereja, pura dan vihara tersebar di seluruh kabupaten/kota. Dari segi kehidupan beragama, kerukunan antarumat beragama di Provinsi Kalimantan Timur relatif baik.

### b. Perkiraan Masa Depan

Dalam 20 tahun mendatang, struktur penduduk menurut pemeluk agama di Kalimantan Timur diperkirakan akan tetap. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, penyediaan fasilitas peribadatan dan pendidikan setiap agama juga meningkat termasuk musholla dan masjid, gereja Katolik, gereja Kristen Protestan, vihara dan pura.

Selain itu, Pada peningkatan dan persebaran fasilitas peribadatan dan pendidikan agama akan berdampak positif pada peningkatan kerukunan antarumat beragama dan terciptanya kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kalimantan Timur yang lebih bermutu, sejahtera, toleran dan aman.

### c. Isu Strategis

Perlu adanya peningkatan kehidupan beragama dalam mendorong perilaku masyarakat yang lebih toleran, jujur, bermoral, dan menjaga keharmonisan kehidupan antarpemeluk agama sehingga dapat mendukung kehidupan masyarakat Kalimantan Timur yang semakin maju, bermutu dan bermartabat.

## 9. Kesejahteraan Sosial

### a. Kondisi Saat Ini

Kesejahteraan sosial menyangkut pelayanan sosial kepada masyarakat miskin termasuk anak asuh, anak terlantar, penyandang masalah sosial dan penduduk dengan kemampuan berbeda (cacad). Jumlah anak asuh dan anak-anak terlantar mengalami fluktuasi sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pelayanan sosial yang telah dilakukan saat ini meskipun cukup baik, namun perlu terus ditingkatkan baik jangkauan maupun mutu pelayanan.

### b. Perkiraan Masa Depan

Sejalan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Kalimantan Timur, jumlah penduduk penyandang masalah sosial, anak terlantar dan penduduk dengan kemampuan berbeda dalam 20 tahun mendatang diperkirakan akan terus menurun. Selain itu, peningkatan mutu layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

### c. Isu Strategis

- 1). Perlu adanya pengembangan sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan.
- 2). Perlu adanya peningkatan mutu pelayanan sosial terhadap anak terlantar, anak asuh, penyandang cacat, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 3). Perlu adanya peningkatan profesionalisme dalam penanganan masalah sosial.
- 4). Perlu adanya kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang sosial masyarakat.

## 10. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

### a. Kondisi Saat Ini

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna memampukan dan memandirikan masyarakat dalam pengertian bahwa penyelenggaraan pemerintahan mengarah pada upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penerapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk penetapan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat. Salah satu isu kebijakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat adalah masih besarnya jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, sampai dengan tahun 2005 penduduk di Kalimantan Timur berjumlah 2,85 juta jiwa. Dari total penduduk ini masih terdapat kurang lebih 299.100 jiwa atau 10,57 % yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Dengan kondisi ini maka kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan.

Pemerintah sampai dengan tahun 2005 telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk membangun sarana dan prasarana perdesaan, baik itu melalui Program Pembangunan Desa Tertinggal (P2DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD/CERD) dan Program Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

Selanjutnya melalui pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya, pemerintah juga telah melaksanakan berbagai langkah antara lain melalui fasilitas pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), fasilitas pemberian subsidi beras untuk keluarga miskin, fasilitas penguatan kelembagaan masyarakat (seperti: lembaga ekonomi perdesaan LPM/LKMD dan PPK), fasilitas penguatan forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, fasilitas pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat melalui bulan bhakti gotong royong masyarakat dan perlombaan desa/kampung/kelurahan serta fasilitas pelestarian lingkungan hidup di perdesaan.

Pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya serta sarana dan prasarana di perdesaan perlu ditingkatkan dan diupayakan secara optimal, dengan sasaran utama agar kondisi masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan ini dapat mengakses terhadap berbagai kebutuhan baik itu berupa kebutuhan informasi, pendidikan, kesehatan, pemukiman yang layak, listrik, pekerja yang layak, jalan perdesaan, pelayanan prima dari pihak pemerintah dan kebutuhan lainnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat, sehingga secara bertahap ekonomi masyarakat miskin akan berubah dan meningkat kearah yang lebih baik.

#### **b. Perkiraan Masa Depan**

Secara bertahap dalam jangka waktu 20 tahun kedepan masyarakat Kalimantan Timur dapat hidup dalam kondisi yang lebih mampu dan mandiri dalam arti sifat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah semakin berkurang. Disisi lain peran aparatur desa/kampung dan kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa/kampung dan kelurahan dapat lebih efektif dan optimal. Begitu juga lembaga masyarakat desa/kampung dan kelurahan sebagai mitra kerja pemerintah desa/kampung dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat lebih efektif dan profesional.

Dengan demikian upaya pemberdayaan masyarakat dimasa mendatang diharapkan akan mampu memberikan keseimbangan antara upaya penguatan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatannya dengan kebijakan pemberian kewenangan kepada masyarakat dalam proses pembangunan, dengan penekanan pada aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan aspek lingkungan serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dan kelurahan sebagai jajaran pemerintahan terdepan dalam pemberdayaan masyarakat.

#### **c. Isu Strategis**

- 1). Masih relatif terbatasnya kemampuan aparatur desa/kampung dan kelurahan dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dan kelurahan.
- 2). Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan.
- 3). Belum efektifnya pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.
- 4). Masih besarnya penduduk yang hidup dalam kondisi keterbelakangan dan kemiskinan.
- 5). Terbatasnya akses masyarakat perdesaan/kampung dalam memanfaatkan sumber daya pembangunan untuk mengembangkan usaha perekonomiannya.
- 6). Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

### **11. Perekonomian Daerah**

#### **a. Kondisi Saat Ini**

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dengan perekonomian yang berkembang pesat. Nilai produk domestik regional bruto

(PDRB) dengan migas pada tahun 2000 sebesar Rp. 82,45 triliun dan pada tahun 2005 mencapai Rp. 176,13 triliun. Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur menduduki peringkat 1 dari 4 Provinsi di Pulau Kalimantan, dan menduduki peringkat 5 dari 33 provinsi di Indonesia setelah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sektor ekonomi yang menjadi penyumbang PDRB terbesar selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah sektor industri pengolahan (37,59 %), sektor pertambangan dan penggalian (36,00 %), pertanian (7,15 %), serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

Pertumbuhan ekonomi dalam periode 2000-2005 rata-rata sebesar 3,0 % per tahun (dengan migas) dan 6,26 % per tahun (tanpa migas). Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun tertinggi adalah sektor listrik, gas dan air bersih (10,40 %), sektor pengangkutan dan komunikasi (7,73%), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (6,75 %). Sementara, sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja tertinggi adalah sektor pertanian (33,87 %), sektor perdagangan, hotel dan restoran (19,38 %), dan sektor jasa-jasa (15,53 %).

Perkembangan PDRB perkapita dalam periode 2000-2005 mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan yaitu pada tahun 2000 dengan migas mencapai Rp. 33,87 juta dan pada tahun 2005 menjadi Rp. 63,29 juta sehingga pertumbuhan rata-rata 15,45 % pertahun. Sedangkan bila dihitung tanpa migas sebesar Rp. 12,42 juta pada tahun 2000 dan terjadi peningkatan pada tahun 2005 hanya sebesar Rp. 17 juta dan meningkat lagi pada tahun 2005 mencapai Rp. 23,91 juta dengan peningkatan rata-rata 15,31% pertahun.

Disamping itu pendapatan regional perkapita selama kurun waktu tahun 2000-2005 juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi terutama jika dihitung dengan migas yaitu pada tahun 2000 sebesar Rp. 12,87 juta dan pada tahun 2005 mencapai Rp. 24,12 juta, namun jika dihitung tanpa migas tahun 2000 sebesar Rp. 4,52 juta dan tahun 2005 mengalami kenaikan hingga mencapai Rp. 8,79 juta. Pertumbuhan rata-rata 17,48 % dan 18,89 %.

Pusat kegiatan ekonomi pertanian terdapat di Kabupaten Malinau, Nunukan dan Penajam Paser Utara; pusat kegiatan pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, dan Paser; sektor industri pengolahan terdapat di Kota Bontang, Balikpapan, dan Kabupaten Bulungan; dan sektor perdagangan terpusat kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Tarakan dan Kota Samarinda.

#### **b. Perkiraan Masa Depan**

Struktur ekonomi Kalimantan Timur dalam 20 tahun mendatang diperkirakan belum akan mengalami perubahan secara mendasar. Sektor sekunder dan sektor primer masih menjadi penyumbang PDRB terbesar. Kontribusi sektor sekunder di Kalimantan Timur akan mengalami puncak pada tahun 2010. Setelah tahun tersebut kontribusi kelompok sektor sekunder akan mengalami pertumbuhan yang relatif stabil atau cenderung tetap. Sementara, kontribusi sektor primer mulai tahun 2010 akan sedikit meningkat hingga tahun 2025.

Dari segi pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan rata-rata tertinggi adalah sektor jasa, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Dari segi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan akan tetap menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja paling besar.

### c. Isu Strategis

- 1). Perlu adanya perubahan struktur ekonomi Kalimantan Timur untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan, galian, minyak dan gas, serta industri pengolahan (bahan galian) yang menggunakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui.
- 2). Perlu adanya peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis sektor unggulan dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan pemanfaatan sumberdaya lokal secara cermat, efisien, efektif, dan berkelanjutan.
- 3). Perlu adanya penyebaran pusat-pusat kegiatan ekonomi ke seluruh kabupaten/kota untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antarkabupaten/kota di Kalimantan Timur.
- 4). Perlu adanya penguatan industri pengolahan yang menghasilkan barang-barang bermutu, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## 12. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

### a. Kondisi Saat Ini

Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura seluas 2,49 juta ha, terdiri dari lahan sawah seluas 202,37 ribu ha (8,13%) dan lahan bukan sawah 2,29 juta ha (91,87). Dari luas lahan sawah tersebut, lahan yang ditanami padi setahun dua kali seluas 35.892 ha, dan ditanami padi setahun satu kali seluas 44,94 ribu ha. Lahan sawah yang tidak diusahakan selama satu tahun seluas 15,92 ha dan lahan sawah yang sementara tidak diusahakan adalah 105,62 ribu ha. Untuk lahan bukan sawah dari lahan potensial seluas 2,29 juta ha tersebut, yang difungsikan seluas 906,92 ribu ha ( $\pm 39,68$  %) dan sementara tidak diusahakan adalah 1,38 juta ha ( $\pm 60,32$  %). Potensi lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah lahan kering untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura.

Konsumsi pangan penduduk di Kalimantan Timur sebagian dapat dipenuhi oleh produksi daerah sendiri. Konsumsi beras/padi dapat dipenuhi dari 87,77% produksi di Kalimantan Timur, tingkat pemenuhan konsumsi jagung 78,55 %, ubi kayu 214,91 % dan ubi jalar 157,86%. Konsumsi untuk beberapa komoditi pangan lainnya masih dipenuhi dari luar daerah.

Perkembangan produksi tanaman pangan pada tahun 2002-2005 mencapai 4,92 %, dengan rincian laju pertumbuhan produksi padi sawah 11,40 % dan padi ladang -7,11%. Laju pertumbuhan luas panen padi adalah sebesar 3,87 % dengan rincian pertumbuhan luas panen padi sawah -1,36 % dan padi ladang 16,04 %. Laju pertumbuhan produktivitas padi adalah 9,54 % dengan rincian pertumbuhan produktivitas padi sawah 8,24 % dan padi ladang 0,95 %.

Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura selama periode 2003-2005 adalah sebagai berikut: jagung 0,93 %, kedelai 2,17 %, kacang tanah -5,20 %, kacang hijau 3,80 %, ubi kayu -10,00 %, dan ubi jalar 6,45 %. Pertumbuhan luas panen Jagung -3,24 %, kedelai 1,50 %, kacang tanah 1,45 %, kacang hijau 0,59 %, ubi kayu mencapai 3,0 % dan ubi jalar mencapai 9,44 %. Laju pertumbuhan produktivitas jagung mencapai 8,55 %, kedelai -2,64 %; kacang tanah 4,55 %, kacang hijau -2,11 %, ubi kayu 1,24 %, ubi jalar 1,34 %.

Sementara itu, keragaman komoditi sayuran selama periode 2003-2005 membaik. Laju pertumbuhan produksi sayuran mencapai 27,13 %, luas panen sebesar 12,30 % dan pertumbuhan produktivitas sebesar 12,76 %. Dalam kurun waktu yang sama, pertumbuhan produksi komoditi buah-buahan sebesar -18,10 %, pertumbuhan luas panen sebesar 35,22 % dan produktivitas sebesar 23,32 %.

#### b. **Perkiraan Masa Depan**

- 1). Paling lama dalam 10 tahun mendatang, produksi beras diperkirakan akan meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan penduduk lokal di daerah penghasil dan penduduk Kalimantan Timur seluruhnya.
- 2). Dengan perkiraan pertumbuhan tanaman padi rata-rata 8,41 % per tahun, dalam 20 tahun ke depan pertumbuhan padi diharapkan mencapai 168,3 % sehingga Kalimantan Timur dapat menjadi salah satu provinsi penghasil padi terbesar.
- 3). Dalam 20 tahun mendatang diharapkan terciptanya suatu sistem yang terpadu baik dalam pengelolaan hasil pertanian maupun pemasaran hasil; berkembangnya pusat-pusat pertanian baru; dan meningkatnya produktivitas komoditi pertanian lainnya sebagai penyangga kebutuhan dan pengembangan ekonomi di Kalimantan Timur.

#### c. **Isu Strategis**

- 1). Perlu adanya pengembangan agribisnis tanaman pangan di Kalimantan Timur dalam penyediaan bibit, pupuk, irigasi, pengolahan, penyuluh, dan jaringan pemasaran untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
- 2). Perlu adanya penguatan sistem pertanian pangan melalui intensifikasi dan perluasan area pertanian untuk mewujudkan Kalimantan Timur sebagai salah satu lumbung beras.
- 3). Perlu adanya penguatan kelembagaan petani pangan.

### 13. **Perkebunan**

#### a. **Kondisi Saat Ini**

Luas lahan kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) di Kalimantan Timur adalah 6,31 juta ha dan yang mendapat ijin lokasi pencadangan lahan untuk perkebunan seluas 1,62 juta ha bagi 179 perkebunan besar swasta (PBS). Lahan yang telah memperoleh sertifikat hak guna usaha (HGU) adalah 373,19 ribu ha. Sampai saat ini, lahan yang telah dimanfaatkan untuk pengembangan perkebunan adalah seluas 381,21 ribu ha, termasuk 201,09 untuk perkebunan kelapa sawit. Ijin lokasi perkebunan telah dikeluarkan untuk lahan seluas 3,15 juta ha bagi 188 perusahaan dan hanya 42 perusahaan yang aktif.

#### 1). **Perkebunan Pemerintah**

Luas tanaman perkebunan di Kalimantan Timur sampai tahun 2005 secara keseluruhan mencapai 351,13 ribu ha, terdiri dari perkebunan rakyat seluas 191,31 ha dan PBS/PTPN seluas 146,76 ha. Rata-rata pertumbuhan luas lahan perkebunan setiap tahun sebesar 5,39 %. Luas lahan perkebunan tersebut sekitar 10,2 % dari lahan yang telah dicadangkan untuk usaha perkebunan dengan jenis tanaman budidaya seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kakao dan kopi.

Upaya pengembangan kawasan budidaya non kehutanan tersebut menjadi kawasan perkebunan telah banyak dilakukan melalui berbagai pola pengembangan seperti pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN), Perkebunan Inti rakyat (PIR)-Swadaya, UPP dan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) sehingga kawasan tersebut menjadi kawasan pusat-pusat produksi.

Di samping itu, pengembangan komoditi perkebunan dilakukan dengan penyusunan Rencana Makro Perkebunan Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan upaya untuk pemanfaatan ruang KBNK untuk menumbuhkan dan mengembangkan kawasan-kawasan sentra produksi perkebunan baru.

Perkebunan di Kalimantan Timur menghasilkan delapan jenis komoditi utama dengan pertumbuhan rata-rata luas panen pada periode 2001-2005 untuk tanaman karet adalah -1,19 %, kelapa -2,56 %, kelapa sawit 11,70 %, kopi 0,13 %, lada 7,60 %, kakao 5,71 %, cengkeh -5,82 %. Komoditi perkebunan lainnya termasuk pala, jambu mete, jarak, kemiri, kapuk, tebu, aren, tembakau, panili, kayu manis dan jahe meningkat sebesar 7,90 % per tahun. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan luas areal tanaman yang produktif (tanaman menghasilkan) sebagai akibat dari peremajaan dan perluasan areal pembangunan perkebunan.

Total produksi meningkat dari 514,70 ribu ton pada tahun 2001 menjadi 1,08 juta ton pada tahun 2005 dengan pertumbuhan produksi rata-rata per tahun sebesar 27,53 %. Produksi tanaman karet mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 15,27% per tahun, kelapa 10,67%, kopi 4,51 %, lada 6,24 %, kelapa sawit 30,18 %, kakao 16,40 %, dan cengkeh -14,29 %. Pertumbuhan komoditi lainnya seperti pala, jambu mete, jarak, kemiri, kapuk, tebu, aren, tembakau, panili, kayu manis dan jahe adalah sebesar 52,40 % per tahun.

## 2). Perkebunan Swasta

Hasil produksi terbesar yang dikelola perkebunan swasta adalah tanaman kelapa sawit, yaitu sebesar 573,79 ribu ton pada tahun 2005 yang tersebar di beberapa kabupaten di Kalimantan Timur. Hasil produksi tertinggi kedua adalah tanaman karet sebesar 3.723 ton pada tahun 2005.

## 3). Perkebunan Rakyat

Hasil produksi terbesar perkebunan rakyat adalah tanaman kelapa sawit sebesar 251,87 ribu ton pada tahun 2005 yang tersebar di beberapa Kabupaten di Kalimantan Timur. Kemudian hasil produksi terbesar kedua adalah tanaman karet sebesar 33,93 ribu.

## b. Perkiraan Masa Depan

- 1). Dalam 20 tahun ke depan, investasi di bidang perkebunan diperkirakan akan terus meningkat.
- 2). Pengembangan luas lahan diperkirakan akan terus terjadi pada tanaman kelapa sawit dan karet khususnya lahan tanaman sawit akan mencapai 1 juta hektar.

- 3). Produksi perkebunan dan diversifikasi hasil produksi akan terus meningkat sehingga mempunyai daya saing di pasar global.
- 4). Peningkatan perkebunan akan menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.

**c. Isu Strategis**

- 1). Perlu adanya pengembangan agribisnis perkebunan untuk memperluas lapangan kerja, menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Kalimantan Timur.
- 2). Perlu adanya pengelolaan perkebunan terpadu dalam mendukung pengembangan perkebunan sawit seluas 1 juta hektar.
- 3). Perlu adanya pemantapan struktur perkebunan melalui pengelolaan hulu-hilir termasuk peningkatan mutu sumber daya manusia, diversifikasi produksi, penggunaan teknologi tepat guna baik dalam peningkatan produksi, pengolahan hasil produksi dan diversifikasi hasil olahan.
- 4). Perlu adanya penguatan kerjasama dan keterkaitan antar bidang khususnya dengan peternakan untuk menghasilkan nilai tambah perkebunan.

**14. Kehutanan**

**a. Kondisi Saat Ini**

Kalimantan Timur merupakan provinsi yang memiliki hutan alam terluas di Indonesia dengan luas kawasan hutan sekitar 14 juta ha berupa hutan alam tropika humida (hutan dipterokarpa) yang termasuk salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia (*megabiodiversity*). Kawasan hutan di Kalimantan Timur memiliki kekayaan flora dan fauna langka di dunia termasuk orang utan (*Pongo Pygmeous*), rusa (*Cervus Unicolor*), dan Pesut Air Tawar-Mahakam (*Fresh Water Dolphine*).

Pemanfaatan sumberdaya hutan melalui sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH-IUPHHK) yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dan daerah ternyata mengalami kemunduran dalam lima tahun terakhir. Hal ini dapat ditunjukkan oleh beberapa kenyataan sebagai berikut:

- 1). Jumlah unit pengusahaan hutan (HPH) yang aktif mengalami penurunan sehingga produksi hasil hutan kayu juga menurun.
- 2). Produk kayu dari hasil kegiatan sejak tahun 1992 meningkat sebagai akibat konversi hutan atau IPK. Namun, tidak diikuti secara konsisten oleh peningkatan jumlah hasil konversi terutama hasil perkebunan.
- 3). Adanya ketimpangan yang mencolok antara kebutuhan bahan baku industri dengan produksi kayu bulat terutama sejak tahun 2001 ketika dilaksanakan kebijakan pengurangan jatah terbangun HPH.
- 4). Meningkatnya kebakaran hutan dan pembalakan hutan liar yang mengakibatkan semakin meningkatnya kerusakan lingkungan dan meluasnya lahan-lahan kritis.

- 5). Adanya ketidakpastian status sumber daya hutan yang ditunjukkan oleh rendahnya kinerja pembangunan kehutanan, merosotnya pengelolaan sumber daya hutan secara lestari, dan tidak efisiennya industri pengolahan kayu. Hal ini disebabkan oleh bencana alam, eksploitasi hutan yang berlebihan, dan perubahan tata ruang yang tidak transparan.

**b. Perkiraan Masa Depan**

Penataan ruang secara transparan, akomodatif, rasional dan konsisten merupakan prasyarat utama dalam pengelolaan kehutanan dan non-kehutanan (agribisnis dan agroindustri) ke depan terutama dalam penetapan kawasan hutan tetap dan areal hutan yang dikonversi. Dalam 20 tahun mendatang, pengelolaan hasil hutan secara efisien dengan mempertimbangkan kelestarian dan keseimbangan lingkungan diperkirakan akan dapat meningkatkan mutu dan produktivitas hutan melalui teknik silvikultur yang telah dikembangkan seperti sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) dan Tebang Pilih Tanam Intensip Indonesia (TPTII). Dengan kondisi ini, produktivitas tegakan hutan diharapkan dapat meningkat sampai 10 m<sup>3</sup>/ha per tahun.

**c. Isu Strategis**

- 1). Perlu adanya pengelolaan sumber daya hutan secara efisien dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- 2). Perlu adanya pemanfaatan sumber daya hutan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya hutan yang ada.
- 3). Perlu upaya mempertahankan keseimbangan lingkungan ekosistem dalam jangka panjang.
- 4). Perlu adanya rehabilitasi dan pengayaan hutan dengan menerapkan penanaman dua jenis pohon, yaitu pohon yang tumbuh cepat dan pohon meranti unggulan lokal.
- 5). Perlu adanya upaya pemulihan dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang kritis di Kalimantan Timur seperti DAS Mahakam yang luasnya mencapai sekitar 6 juta ha.

**15. Peternakan**

**a. Kondisi Saat Ini**

Pembangunan peternakan di Kalimantan Timur dalam 10 tahun terakhir (1995 - 2005) mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pertumbuhan populasi ternak secara keseluruhan mengalami penurunan, kecuali babi, ayam pedaging dan petelur. Pertumbuhan sapi potong menurun 2,07 %, kerbau 6,13 %, kambing 0,22%, domba 11,70 %, ayam buras 2,57 % dan itik 0,38 %. Di sisi lain, pertumbuhan populasi babi meningkat sebesar 0,39 %, ayam petelur 1,38 % dan pedaging 16,19 %. Populasi ayam pedaging meningkat sangat tinggi dan menjadi komoditas unggulan di Kalimantan Timur sehingga mampu memasarkan 23% DOC ke luar daerah, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah.

Populasi ternak sapi di Kalimantan Timur masih sangat terbatas dibanding kebutuhan sehingga ternak lokal hanya mampu memenuhi kebutuhan daging sebesar 20 %, dan 80 % kebutuhan daging sapi harus dipasok dari luar daerah. Di sisi lain, potensi wilayah terutama lahan yang luas masih belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengembangan ternak sapi.

Salah satu kendala pengembangan peternakan di Kalimantan Timur adalah belum lancarnya pemasaran produk peternakan seperti transaksi ternak bibit, ternak konsumsi, hasil peternakan dan sarana prasarana peternakan, serta terbatasnya rumah potong hewan termasuk rumah potong ayam atau unggas, pos kesehatan hewan dan karantina hewan.

Kesempatan kerja di bidang agribisnis peternakan semakin meningkat yang ditunjukkan oleh penyerapan tenaga kerja pada tahun 2003 sebanyak 90.017 orang dan tahun 2005 sebanyak 155.534 orang.

#### **b. Perkiraan Masa Depan**

- 1). Dengan asumsi bahwa tingkat kelahiran ternak sapi 24,10 %, kematian 2,92 % dengan penurunan 4,17 % per tahun, pemotongan 89,56% dengan penurunan 6,93 % per tahun, impor 84,4 % dengan penurunan 8,8 % per tahun, maka dalam 20 tahun mendatang populasi sapi di Kalimantan Timur diperkirakan 1,97 juta ekor sehingga sapi diharapkan menjadi ternak unggulan Kalimantan Timur.
- 2). Dengan asumsi bahwa kelahiran kambing 35,93% dengan peningkatan 2,5 % per tahun, kematian 4,12 % dengan penurunan 2,50 % per tahun, pemotongan 52,35 %, dan impor 23,33 %, maka dalam 20 tahun mendatang populasi ternak kambing diperkirakan 213.706 ekor sehingga kambing menjadi ternak andalan setelah sapi potong.
- 3). Dengan asumsi bahwa tingkat kelahiran ayam petelur Nunukan 65,50 %, kematian 10,00 %, dan pemotongan 50,00 %, maka dalam 20 tahun mendatang populasi ternak ayam petelur diperkirakan menjadi 104,03 juta ekor sehingga tetap menjadi ternak andalan Kalimantan Timur dengan mempertahankan ayam Nunukan.
- 4). Dengan asumsi bahwa tingkat kelahiran ayam pedaging 125,03%, kematian 10,0 %, pemotongan 90,00 %, ekspor 35,15 % dan impor 10,12 %, maka dalam 20 tahun mendatang populasi ternak ayam pedaging diperkirakan menjadi 258,28 juta ekor.

#### **c. Isu Strategis**

- 1). Perlu adanya pengembangan usaha ternak secara lebih efisien, produktif dan efektif terutama untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
- 2). Perlu adanya peningkatan fasilitas produksi, pengolahan hasil ternak dan pencegahan penyakit ternak untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong kemajuan ekonomi daerah.
- 3). Perlu adanya pembinaan dan perlindungan usaha bagi peternak skala kecil, serta menjamin kepastian hukum lokasi usaha peternakan.
- 4). Perlu adanya perluasan jaringan pemasaran ternak yang mampu melayani pasar lokal sampai regional.

## 16. Kelautan dan Perikanan

### a. Kondisi Saat Ini

Wilayah Kalimantan Timur mempunyai 9 kabupaten/kota yang berada di wilayah pesisir dengan panjang pantai sekitar 1.185 km yang terbentang dari bagian selatan Kabupaten Pasir hingga bagian utara Pulau Nunukan. Selain itu, wilayah Kalimantan Timur memiliki wilayah lautan seluas (lebar 12 mil) sekitar 135.380,9 km<sup>2</sup> dan terdapat 122 buah pulau kecil. Potensi budidaya ikan yang ada meliputi perairan umum seluas 111,77 juta ha, budidaya air laut seluas 8,40 juta ha, dan budidaya air payau seluas 225.000 ha.

Kawasan pesisir Kalimantan Timur mempunyai potensi utama sumberdaya hayati dan nabati yang sangat besar seperti ketersediaan ikan dengan berbagai jenis, udang yang memiliki nilai ekonomis dan ekspor yang tinggi, kepiting dengan berbagai jenis, molusca, teripang, rumput laut dan lain-lain. Wilayah Kalimantan Timur juga mempunyai potensi wisata bahari yang di dukung dengan keanekaragaman terumbu karang dan keindahan berbagai jenis ikan hias dan wisata alam dengan adanya Taman Nasional. Selain itu, potensi pembangunan perikanan juga didukung dengan adanya tempat pelelangan ikan, tempat pendinginan ikan, dan pelabuhan.

#### 1) Hasil Produksi Perikanan

Pada tahun 2005, produksi perikanan dari kegiatan budidaya ikan di perairan umum seperti kolam mencapai 232,86, budidaya ikan dalam karamba sebesar 6.138,83 ton, dan produksi hasil tambak sebesar 35.385,39 ton. Sementara hasil perikanan tangkap laut sebesar 92.736,26 ton dan perairan umum sebesar 31.059,14 ton.

#### 2) Perkembangan Impor dan Ekspor

Nilai ekspor produksi perikanan dalam periode 2000-2005 mengalami peningkatan. Negara tujuan ekspor utama Amerika, Hongkong, Jepang, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara Uni Eropa. Komoditi ekspor hasil produksi perikanan terdiri dari udang beku baik dalam bentuk olahan *headless* dan *peeled*, yaitu udang windu (*Giant Tiger Prawns*) dan udang putih (*Banana prawns*); udang segar, ikan segar, yaitu ikan tenggiri (*Indo-pasific king mackerels* dan *narrow barred-king mackerels*); ikan hidup, yaitu ikan betutu (*sleeper gobies*), ikan kerapu (*Groupers*), lobster I, Kepiting (*mud crabs and swim crabs*), labi-labi (*Tortoise*), kura-kura (*river and lake turtle*), serta cacing laut/sea worm (*morphysa sanguena*) dan lain-lain.

#### 3) Infrastruktur Penunjang

Infrastruktur penunjang sektor perikanan yang tersedia antara lain pelabuhan perikanan (PPI) di *pantai* Tarakan, Sebatik-Nunukan, Selili-Samarinda, Tanjung Batu-Berau, Manggar-Balikpapan Desa Api-api Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Nunukan, Pangkalan Pendaratan Ikan Bontang. PPI di Muara Pantuan dan Muara Pasir sudah tidak berfungsi lagi.

### b. Perkiraan Masa Depan

Dalam 20 tahun mendatang, pembangunan kelautan dan perikanan akan bertumpu pada pengembangan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan permintaan pasar yang besar dengan prioritas ikan tuna untuk perikanan tangkap, dan ikan kerapu, rumput laut, udang, nila dan patin untuk perikanan budidaya.

- 1). Berdasarkan pertumbuhan sektor perikanan, pembukaan lahan budidaya diperkirakan meningkat dari 76,346 ribu ha pada tahun 2005 menjadi 103,34 ribu ha pada tahun 2026 (data disesuaikan tahun 2005).
- 2). Hasil produksi perikanan diperkirakan akan meningkat sebesar 2,35% per tahun.
- 3). Mutu sumber daya manusia dalam usaha dan budidaya perikanan diharapkan akan semakin meningkat.
- 4). Dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang seperti keberadaan pabrik es, *cool storage*, pelabuhan perikanan, pabrik pengalengan ikan, dan pabrik pengolahan hasil perikanan lainnya, hasil olahan perikanan diperkirakan akan meningkat sebesar 1,11% per tahun.

### c. Isu Strategis

- 1). Belum optimalnya pengembangan budidaya perikanan berbasis masyarakat dan kemitraan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nelayan dan pelaku usaha perikanan.
- 2). Belum tertatanya manajemen perikanan dan kelautan untuk meningkatkan jumlah, mutu, daya saing dan diversifikasi produksi perikanan mulai dari hulu sampai hilir.
- 3). Rendahnya kualitas SDM perikanan yang disebabkan oleh kurangnya pelatihan manajemen perikanan bagi nelayan dan pengusaha perikanan, langkanya pelatihan teknologi budidaya perikanan, dan kurang berkembangnya lembaga pendidikan keahlian perikanan.
- 4). Rendahnya kualitas SDM berdampak pada rendahnya pendapatan, rendahnya konsumsi, dan rendahnya mutu gizi masyarakat dan selanjutnya akan berujung pada rendahnya produktivitas. Oleh sebab itu, perlu adanya pengembangan pendidikan keahlian teknologi perikanan dan kelautan dalam upaya peningkatan tenaga kerja perikanan yang profesional.
- 5). Rendahnya investasi di bidang perikanan laut skala besar dengan teknologi tinggi dengan radius jelajah dan kapasitas kapal yang besar.

## 17. Investasi Daerah

### a. Kondisi Saat Ini

Selama 5 tahun terakhir (2001-2005) realisasi PMA dan PMDN di Kalimantan Timur berfluktuasi dari Rp. 994,281 miliar pada tahun 2001 menjadi Rp. 1,894 triliun pada tahun 2002, terus meningkat menjadi Rp. 7,818 triliun pada tahun 2004. Namun tahun 2005 mengalami penurunan menjadi Rp. 616.881,02 miliar. Penurunan yang tajam ini disebabkan persetujuan PMA dan PMDN tahun – tahun sebelumnya belum dapat direalisasikan, terutama pada sektor perkebunan dan

industri kimia. Dalam hal ini sebagian besar investasi berada di sektor pertambangan dan penggalian.

Dalam kurun waktu yang sama peranan pembentukan investasi terhadap total PDRB Kalimantan Timur rata-rata sebesar 13,53%. Rata-rata rasio penambahan modal terhadap PDRB dengan migas (ICOR) selama periode 1994-2003 adalah sebesar 5,51, sedangkan rata-rata nilai ICOR tanpa migas 7,53. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penggunaan modal dalam meningkatkan PDRB di Kalimantan Timur terutama kegiatan non migas masih terhitung rendah.

#### **b. Perkiraan Masa Depan**

Dalam 20 tahun ke depan, investasi ke Kalimantan Timur diperkirakan akan semakin meningkat terutama dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1). Membaiknya iklim investasi nasional dan membaiknya indikator ekonomi makro.
- 2). Meningkatnya akses transportasi, komunikasi dan informasi antar wilayah.
- 3). Terbukanya jaringan kerjasama antarnegara khususnya dengan negara tetangga yang berbatasan langsung maupun dengan negara lain yang berminat dengan potensi daerah yang dimiliki Kalimantan Timur.
- 4). Terbukanya kemungkinan penerbitan obligasi daerah.
- 5). Meningkatnya jumlah dan mutu tenaga kerja terampil dan terdidik.

#### **c. Isu Strategis**

- 1). Perlu penataan kelembagaan termasuk regulasi dalam mengantisipasi peningkatan investasi.
- 2). Perlu adanya penyederhanaan prosedur investasi dan perijinan usaha.
- 3). Perlu adanya penciptaan iklim investasi dengan mengacu pada perlakuan standar internasional.
- 4). Perlu adanya penyediaan infrastruktur penunjang khususnya transportasi dan telekomunikasi.
- 5). Perlu adanya pengembangan jaringan informasi dan promosi investasi baik dalam negeri maupun luar negeri.

### **18. Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi**

#### **a. Kondisi Saat Ini**

##### **1) Industri**

Pada tahun 2005, sektor industri telah memberikan kontribusi cukup besar dalam pertumbuhan unit usaha industri kecil, penyerapan tenaga kerja dan investasi. Sampai akhir tahun 2004, industri di Kalimantan Timur berjumlah 13.569 unit usaha terdiri dari 13.149 unit industri kecil menengah dan 420 unit industri besar. Jumlah unit usaha naik 5,80 % dari tahun sebelumnya. Tenaga kerja yang terserap mencapai 115.603 orang atau naik 2,92 % dengan jumlah investasi sebesar Rp.6,47 triliun atau naik 1,15 %.

Jumlah unit usaha industri kecil meningkat sebesar 744 unit atau 6,00 %, penyerapan tenaga kerja bertambah 3.287 orang atau naik 6,86 %, dan investasi industri kecil bertambah Rp. 73,64 miliar juta atau naik 19,05 %.

## 2) Perdagangan

Hingga tahun 2005 jumlah usaha di Kalimantan Timur sebanyak 38.260 unit usaha atau naik sebesar 5,46% dibanding tahun 2004. Dari peningkatan tersebut, jumlah pengusaha besar meningkat 7,80 %, jumlah pengusaha menengah meningkat 7,03 % dan jumlah pengusaha kecil naik 4,60 %.

Pengembangan perdagangan telah mampu mendukung pengendalian pasar untuk menjamin ketersediaan stok dan harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya seperti beras, gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, garam, telur ayam, sapi potong, mentega, susu, minyak tanah, pupuk dan semen. Dari kebijakan tersebut, pasokan kebutuhan bahan pokok dan barang strategis penduduk Kalimantan Timur dapat dipenuhi.

Dari sisi perdagangan luar negeri, nilai ekspor non migas meningkat terutama hasil pertambangan sebesar US\$ 868,05 juta atau naik 67,56 %, nilai ekspor hasil pertanian/perkebunan US\$ 3,85 juta atau naik 50,57 % dan nilai ekspor hasil-hasil logam sebesar US\$ 24,05 juta atau naik 94,04 %. Nilai ekspor lainnya mengalami penurunan termasuk ekspor hasil kayu olahan turun US\$ 278,48 ribu atau 48,15 %, nilai ekspor hasil industri kimia turun US\$ 41,99 ribu atau 12,17 %, nilai ekspor hasil perikanan dan kelautan turun US\$ 17,67 ribu atau 14,93 %, nilai ekspor hasil hutan turun US\$ 839,14 atau 90,46 % dan ekspor lainnya turun US\$ 5,32 ribu atau 99,63 %.

Transaksi perdagangan lintas batas dari Kalimantan Timur ke Tawao-Malaysia ternyata masih menguntungkan dengan rata-rata nilai surplus per tahun (2000-2005) sebesar Rp. 2,95 miliar.

## 3) Koperasi dan UKM

Jumlah koperasi tahun 2005 sebanyak 3.082 unit atau meningkat 2,70 % dibanding tahun 2004 dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 378.109 orang (meningkat 2,87 %) dan volume usaha sebesar Rp. 446,90 miliar atau naik sebesar 6,24 %.

Perkembangan usaha Kecil (PK) mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada tahun 2005 jumlah usaha kecil adalah 274.069 unit usaha terdiri dari industri pertanian 211.218 unit usaha, 63.151 unit usaha industri non pertanian. Tenaga kerja yang terserap sebanyak 538.109 orang meningkat 2,74 % dari tahun. Nilai usaha yang berkembang mencapai Rp. 652,73 miliar atau naik 2 % dari tahun sebelumnya.

Jumlah usaha menengah pada tahun 2005 adalah 615 unit usaha atau naik 1,99 % dengan rincian yang bergerak di bidang aneka usaha sebanyak 211 unit usaha, perdagangan 320 unit usaha, industri non pertanian 62 unit usaha dan industri pertanian 21 unit usaha. Tenaga kerja yang terserap sebanyak 10.720 orang meningkat 1,99 % dari tahun sebelum. Nilai usaha sebanyak Rp. 1,75 triliun atau meningkat 1,99 % dari tahun sebelumnya.

Fasilitas pasar di Kalimantan Timur tersedia sebanyak 202 buah dengan kapasitas menampung 27.649 pedagang yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota. Fasilitas pasar tersebut belum mampu memberikan layanan perdagangan yang memadai bagi masyarakat di daerah perbatasan dan pedalaman.

**b. Perkiraan Masa Depan**

- 1). Dalam 20 tahun mendatang, industri pengolahan baik industri kecil, menengah dan besar di Kalimantan Timur diperkirakan akan terus berkembang dalam menciptakan nilai tambah dan memperluas kesempatan kerja.
- 2). Perdagangan antarwilayah dan perdagangan internasional yang dilakukan oleh pengusaha kecil, menengah dan besar di Kalimantan Timur diperkirakan akan semakin meningkat baik dari jumlah maupun nilai perdagangan.
- 3). Dalam 20 tahun mendatang, koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat diharapkan dapat berperan penting dalam pengembangan ekonomi daerah.
- 4). Hubungan usaha perekonomian dan pola kemitraan antara koperasi dengan dan usaha skala menengah dan besar diharapkan akan semakin meningkat dalam memajukan perekonomian daerah.
- 5). Dalam 20 tahun mendatang, tenaga - tenaga terampil di bidang koperasi dan pengusaha menengah dan besar diperkirakan akan semakin meningkat dan nilai usaha yang semakin besar.

**c. Isu Strategis**

- 1). Belum tertatanya sistem pengembangan industri kecil, menengah dan besar.
- 2). Terbatasnya pemasaran baik dari segi promosi, jaringan dan fasilitas bagi koperasi dan para pengusaha kecil, menengah dan besar.
- 3). Belum optimalnya pembinaan manajemen usaha bagi koperasi dan pengusaha kecil.
- 4). Belum optimalnya pengembangan permodalan dalam mendukung usaha koperasi dan pengusaha kecil dan menengah.

**19. Pariwisata**

**a. Kondisi Saat Ini**

Pariwisata di Kalimantan Timur saat ini berupa wisata alam, budaya dan sejarah. Sebagian besar (97%) wisatawan yang berkunjung ke Kalimantan Timur adalah wisatawan nusantara. Namun, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kalimantan Timur terus meningkat, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) cenderung tetap.

Festival budaya yang menjadi bagian dari pariwisata di Kalimantan Timur sebagian besar adalah atraksi budaya lokal seperti Irau Tengkeyu, Irau Jatimun, Erau, Birau, dan Pesta Meroa yang sebagian besar berada di Kabupaten Kutai Barat. Pertunjukan seni daerah Kalimantan Timur didominasi oleh seni musik dengan jumlah total 291 organisasi kesenian.

Fasilitas dan akomodasi pariwisata di Kalimantan Timur terus meningkat meskipun belum optimal terutama angkutan wisata yang belum berkembang. Akomodasi wisata didominasi oleh hotel Melati sebanyak 292 hotel dan hotel bintang sebanyak 31 hotel.

**b. Perkiraan Masa Depan**

- 1). Dalam 20 tahun mendatang, tujuan wisata di Kalimantan Timur diperkirakan akan berkembang menjadi tujuan wisata unggulan yang didukung oleh meningkatnya jaringan transportasi antarwilayah, tersedianya fasilitas dan akomodasi yang lebih beragam dan bermutu.
- 2). Festival budaya dan kesenian daerah yang sudah ada diharapkan dapat terus dipertahankan, dan festival budaya dan seni daerah yang potensial akan dikembangkan menjadi festival budaya rutin daerah kabupaten/kota.
- 3). Dengan berbagai perkiraan tersebut, jumlah kunjungan wisatawan dalam 20 tahun mendatang diharapkan mencapai 9,71 juta wisatawan.
- 4). Secara keseluruhan, pengembangan pariwisata diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang semakin besar, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah yang semakin tinggi, serta mendorong percepatan pembangunan daerah.

**c. Isu Strategis**

- 1). Belum tertatanya sistem pariwisata sesuai dengan standar nasional dan internasional.
- 2). Belum optimalnya prasarana dan sarana pendukung pariwisata seperti akomodasi, transportasi, informasi dan promosi, dan pengelolaan tempat wisata.
- 3). Belum terpadunya manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata.

**20. Pertambangan dan Migas**

**a. Kondisi Saat Ini**

Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi sumberdaya mineral cukup besar yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota dengan berbagai komposisi kimiawi yang sangat beragam. Kawasan tambang dikelompokkan menjadi zona barat di kawasan perbukitan dengan potensi tambang emas dan logam lainnya sekitar 887,72 ribu ha; zona tengah dengan potensi batubara (seluas 2,12 juta ha), pasir, lempung dan bahan galian C lainnya; dan zona timur di kawasan pesisir dan pantai dengan potensi minyak dan gas (sekitar 38,86 ribu km<sup>2</sup>), batubara dan pasir laut.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memanfaatkan lahan pasca penambangan dengan reklamasi lahan berupa rehabilitasi morfologi lahan bekas tambang, pengembalian tanah pucuk dan penanaman tumbuhan dengan berbagai jenis pohon. Beberapa lahan bekas tambang ada juga yang dimanfaatkan untuk tendon air/kolam.

**b. Perkiraan Masa Depan**

- 1). Dalam 20 tahun mendatang diperkirakan masih ada penemuan baru bahan tambang energi (minyak, gas dan batubara), logam dasar (emas, perak dan nikel), tambang industri, dan tambang bahan bangunan/agregat.
- 2). Bahan tambang, mineral dan migas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga akan menjadi langka dan habis.
- 3). Permasalahan yang diperkirakan akan muncul di waktu mendatang adalah pencemaran, kerusakan lingkungan, konflik pemilikan dan penggunaan lahan, serta reklamasi pasca eksploitasi.

**c. Isu Strategis**

- 1). Belum tertatanya sistem pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan termasuk penyelesaian konflik lahan, pemanfaatan bagi hasil tambang dan pemulihan lahan bekas tambang.
- 2). Belum adanya rencana komprehensif pengembangan sektor usaha pengganti pertambangan dan minyak dan gas sebagai sektor unggulan dalam pengembangan ekonomi daerah.
- 3). Belum optimalnya manajemen dalam mengatasi konflik antara pengolahan cadangan sumber daya alam termasuk batubara, pelestarian lingkungan dan pengembangan pertanian dan perkebunan.
- 4). Belum berkembangnya sistem reklamasi kawasan bekas penambangan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan.

**21. Transportasi**

**a. Kondisi Umum**

**1). Transportasi Darat**

Jalan lintas di Kalimantan Timur dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) poros yaitu Poros Utara, Poros Tengah, dan Poros Selatan. Poros Utara yang menghubungkan batas Provinsi Kalimantan Barat, Tiong Ohang, Long Pahangai, Tana Tidung, Malinau sampai Long Midang dan Batas Negara. Jalan lintas poros tengah menghubungkan Samarinda, Tenggarong, Kota Bangun, Simpang Blusuh dan batas Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan, jalan lintas poros selatan menghubungkan batas Provinsi Kalimantan Selatan, Batu Aji, Penajam, Balikpapan, Samarinda. Kondisi transportasi darat di Kalimantan Timur pada umumnya cukup baik, namun belum memadai untuk menghubungkan seluruh wilayah.

**2). Transportasi Sungai dan Penyeberangan**

Angkutan sungai yang melayani angkutan penumpang dan barang di Sungai Mahakam sekitar 128 unit kapal motor dengan jumlah dermaga 56 buah yang tersebar di seluruh wilayah. Angkutan penyeberangan yang melayani jalur Balikpapan-Penajam, Balikpapan-Mamuju, dan Balikpapan-Palu sebanyak 9 unit kapal, dan jalur baru Nunukan-Tawau dan Pulau Sebatik-Tawau. Kondisi angkutan sungai dan penyeberangan saat ini masih belum memadai untuk melayani angkutan penumpang dan barang.

### 3). Transportasi Laut

Angkutan laut di Kalimantan Timur diselenggarakan melalui pelabuhan yang saat ini berjumlah 15 pelabuhan terdiri dari 4 (empat) pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia IV, dan 11 (sebelas) pelabuhan dikelola oleh pemerintah daerah. Kondisi angkutan laut masih terbatas dalam mendukung mobilitas penumpang dan barang.

### 4). Transportasi Udara

Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 6 (enam) bandar udara dengan volume penerbangan cukup ramai, yaitu Sepinggang-Balikpapan, Temindung-Samarinda, Juata-Tarakan, Kalimarau-Berau, Nunukan, dan Tanjung Harapan-Bulungan. Bandar udara internasional Balikpapan telah memberangkatkan dan menurunkan penumpang paling banyak. Fasilitas penerbangan antarkabupaten saat ini masih belum berkembang secara memadai.

## b. Perkiraan Masa Depan

- 1). Dalam 20 tahun mendatang, transportasi darat, sungai dan penyeberangan, laut dan udara diperkirakan semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya kawasan andalan (Kapet Sasamba): Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Kalimantan Timur.
- 2). Pengembangan ekonomi wilayah yang akan lebih mengandalkan pertanian dalam arti luas memerlukan dukungan transportasi darat dalam bentuk trans Kalimantan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dan pusat pemasaran di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
- 3). Perekonomian daerah diperkirakan akan terus meningkat yang diikuti oleh meningkatnya aliran perdagangan barang dan jasa sehingga perlu peningkatan kapasitas dan kinerja pelabuhan utama Balikpapan dan Samarinda, dan pelabuhan pendukung lainnya.
- 4). Meningkatnya perekonomian daerah juga akan mendorong meningkatnya permintaan layanan jasa penerbangan sehingga perlu didukung dengan pengembangan bandara Sepinggang-Balikpapan dan pemindahan Bandara Termindung, serta penataan angkutan udara di wilayah perbatasan.
- 5). Dalam 20 tahun mendatang, transportasi laut diharapkan menyatu dengan jaringan transportasi darat sehingga dapat menjadi penghubung dan mempersatu lalu lintas antarwilayah dan antarpulau Kalimantan Timur.

## c. Isu Strategis

- 1). Belum tertatanya sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antarwilayah
- 2). Belum optimalnya pelayanan transportasi yang efisien dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan, perbatasan dan pedalaman.

- 3). Belum optimalnya pelayanan transportasi, sungai, darat, laut dan udara yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pusat-pusat pemasaran.
- 4). Belum berkembangnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengembangan transportasi di Kalimantan Timur.

## 22. Pengairan

### a. Kondisi Saat Ini

Sebagian besar irigasi di Kalimantan Timur diarahkan untuk mendukung pertanian. Saat ini, kondisi bendungan dan jaringan irigasi belum memadai sehingga perlu direhabilitasi dan dipelihara. Jumlah bendungan yang perlu dipelihara dan direhabilitasi sebanyak 10 buah dan jaringan irigasi seluas 9.150 ha. Sementara, jaringan daerah rawa yang perlu ditingkatkan adalah jaringan tata air saluran induk sepanjang 780 km, saluran primer 2.027,80 km, saluran sekunder 1.687,97 km, bangunan pelintas 446 buah, pintu air skat 412 unit, jalan logistik 29 km, gorong gorong 380 buah, rumah juru pompa 86 buah, dan pintu air 1.016 buah.

### b. Perkiraan Masa Depan

- 1). Dalam jangka panjang, permintaan prasarana dan sarana irigasi dan pengairan diperkirakan akan terus meningkat untuk mendukung pembangunan pertanian sebagai sektor unggulan pengganti sektor pertambangan dan migas.
- 2). Pengelolaan danau, rawa dan daerah aliran sungai secara terpadu, efisien dan efektif akan semakin penting dalam mendukung pengembangan irigasi dan pengairan.

### c. Isu Strategis

- 1). Belum tertatanya sistem irigasi dan pengairan yang dapat mendukung pembangunan pertanian.
- 2). Belum terpadunya keterkaitan antara irigasi dan pengairan, rawa, sungai dan tambak dalam mendukung pembangunan daerah.
- 3). Belum optimalnya jaringan irigasi dan pengairan sebagai akibat terbatasnya prasarana dan sarana.
- 4). Belum optimalnya kelembagaan yang mengatur pengelolaan irigasi dan pengairan.
- 5). Belum berkembangnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan pengairan, serta prasarana dan sarana pendukung lainnya.

## 23. Energi Listrik

### a. Kondisi Saat Ini

Ketersediaan listrik di Kalimantan Timur pada tahun 2005 tercatat sebesar 1,358 GWh dengan beban puncak permintaan pada tingkat 179,7 MW. Kapasitas terpasang sebesar 247 MW dengan kapasitas tergantung sebesar 182 MW. Pembangkit listrik di Kalimantan Timur yang terdapat pada Sistem Mahakam adalah

PLTD Karang Asam, PLTU dan PLTG Tanjung Batu, PLTD Keledang, PLTD Gunung Malang, dan PLTD Batakan.

Kondisi transmisi pada saat ini secara keseluruhan terdiri dari 6 lokasi dengan total 292,2 kms, 12 sirkit, 7 gardu induk di 7 lokasi dengan jumlah pasokan 390 MW. Pembangkit listrik saat ini masih sangat tergantung pada sumber energi bahan bakar minyak (71 %), batubara (2 %) dan sumber lainnya (27 %).

Daerah perkotaan terutama Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Tarakan memerlukan pasokan listrik lebih banyak dibanding daerah pedesaan, pedalaman dan perbatasan. Pasokan listrik saat ini masih dirasa sangat kurang dan terjadi defisit pasokan listrik sehingga sering terjadi pemadaman listrik secara bergilir.

#### **b. Perkiraan Masa Depan**

Dalam waktu 20 tahun mendatang, seiring dengan meningkatnya investasi dan berkembangnya kegiatan ekonomi daerah terutama industri dan perdagangan, kebutuhan listrik diperkirakan akan terus meningkat. Pasokan listrik dari sistem Mahakam diperkirakan akan meningkat secara nyata sehingga mencapai 4.500 GWh pada tahun 2026. Sementara, pasokan dari sistem terpisah diperkirakan akan tetap. Pemenuhan kebutuhan listrik dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga diesel, dan dalam jangka panjang perlu didukung dengan pembangkit listrik lainnya.

#### **c. Isu Strategis**

- 1). Belum tertatanya sistem dan manajemen penyediaan listrik di Kalimantan Timur.
- 2). Belum meratanya jaringan listrik antarwilayah yang dapat menjangkau daerah pedesaan, pedalaman dan perbatasan.
- 3). Belum optimalnya pemanfaatan batubara dan sumber energi lainnya sebagai alternatif pembangkit tenaga listrik.
- 4). Belum berkembangnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan pembangkit dan jaringan listrik.

### **24. Politik dan Pemerintahan**

#### **a. Kondisi Saat Ini**

Wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 14 Kabupaten/kota, 122 Kecamatan dan 1.320 Desa/Kelurahan. Struktur organisasi pemerintah terdiri dari 1 Sekretaris, 3 Asisten, 9 Biro, 15 Dinas/SKPD, 15 Badan/Lembaga, 49 UPTD, dan 3 RSUD. Struktur organisasi pemerintah masih terlalu besar.

Jumlah pegawai pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2005 sebanyak 6.276 orang terdiri dari 385 orang (6,13 %) berpendidikan SD/SMP, 3.660 orang (58,32 %) berpendidikan SMA, dan 2.231 orang (35,55 %) berpendidikan diploma/sarjana.

Perkembangan politik di Kalimantan Timur menunjukkan dinamika yang ditandai oleh meningkatnya partisipasi organisasi kemasyarakatan baik melalui organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi,

organisasi keagamaan, dan partai politik. Dalam penyusunan peraturan daerah dalam bentuk proses konsultasi, dialog publik dan sosialisasi masih dipandang belum optimal.

**b. Perkiraan Masa Depan**

Dalam 20 tahun ke depan, kehidupan politik di Kalimantan Timur diperkirakan akan terus berkembang. Peran organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan partai politik akan semakin penting dan nyata dalam perumusan kebijakan publik. Selain itu, organisasi dan aparat pemerintah daerah dituntut untuk semakin profesional dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara lebih baik, bermutu, mudah dan tanpa diskriminasi.

**c. Isu Strategis**

- 1). Belum tertatanya sistem dan manajemen kinerja organisasi dan aparat pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar nasional dan internasional.
- 2). Belum berkembangnya sistem informasi manajemen dalam mendukung peningkatan kapasitas, profesionalitas dan kapabilitas dari organisasi dan aparat pemerintah daerah.
- 3). Belum meratanya pelayanan antarwilayah terutama di kawasan daerah pedalaman dan perbatasan.
- 4). Belum optimalnya kerjasama pemerintah daerah dan swasta dalam penguatan kelembagaan.
- 5). Belum optimalnya kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah.

**25. Hukum**

**a. Kondisi Saat Ini**

Pada tahun 2005, kasus pelanggaran hukum di Kalimantan Timur tercatat sebanyak 338 kasus pencurian, 131 kasus narkoba, dan kasus hukum lainnya termasuk pembalakan liar, penambangan liar, pencurian ikan, perdagangan anak dan perempuan, dan pelintas batas. Pencegahan dan penanganan kasus hukum masih belum optimal. Hal ini disebabkan belum memadainya organisasi, aparat dan fasilitas pendukung dalam penegakan dan pelayanan hukum bagi masyarakat Kalimantan Timur.

**b. Perkiraan Masa Depan**

Dalam waktu 20 tahun ke depan, penegakan hukum dan pelayanan hukum bagi masyarakat Kalimantan Timur diharapkan akan semakin bermutu, adil, mudah dan tanpa diskriminasi dengan didukung organisasi yang solid; aparat penegak hukum yang profesional; prasarana yang lengkap dan memadai. Dengan demikian, tindak pelanggaran hukum dapat dicegah, kriminalitas dapat dikurangi, dan kasus hukum dapat diselesaikan secara tuntas dan adil sehingga dapat menciptakan kehidupan yang tertib hukum, aman, stabil dan tenteram bagi masyarakat Kalimantan Timur.

**c. Isu Strategis**

- 1). Perlu adanya pemerataan akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat .
- 2). Perlu adanya peningkatan kapasitas, profesionalitas, dan kapabilitas organisasi dan aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pelanggaran hukum, mengurangi kriminalitas dan menyelesaikan berbagai kasus hukum.
- 3). Perlu adanya pengembangan prasarana dan sarana hukum di seluruh kabupaten/kota untuk menjamin terwujudnya kepastian, keadilan dan penegakan hukum terutama di wilayah perbatasan, dan daerah rawan lainnya.

**26. Komunikasi dan Informasi**

**a. Kondisi Umum**

Peran media massa di Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal dalam memberikan informasi yang akurat, lengkap, jujur, adil dan berimbang kepada masyarakat. Saat ini, jaringan televisi masih didominasi oleh siaran televisi swasta yang dipancarkan dari Jakarta dengan muatan lokal yang terbatas. Selain itu, di Kalimantan Timur terdapat 21 radio milik swasta dan pemerintah. Surat kabar yang terbit di Kalimantan Timur adalah 2 terbitan nasional dan 5 terbitan lokal. Media cetak dalam bentuk tabloid dan majalah yang terbit secara berkala setiap satu minggu, dua minggu, dan tabloid bulanan meskipun meningkat, namun masih terbatas baik jangkauan layanan maupun mutu penerbitan.

**b. Perkiraan Masa Depan**

- 1). Dalam waktu 20 tahun mendatang, pengembangan media audio visual diperkirakan akan mendorong peningkatan jumlah dan mutu televisi lokal, layanan internet, telekomunikasi dan informasi baik milik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.
- 2). Pengembangan media elektronik di Kalimantan Timur diperkirakan akan meningkatkan jumlah dan mutu radio baik milik pemerintah maupun swasta; dan peningkatan jumlah dan mutu sarana telekomunikasi reguler berdasarkan satuan sambungan terpasang (SST) dan telepon seluler.
- 3). Pengembangan media cetak di Kalimantan Timur diperkirakan akan meningkatkan jumlah dan mutu media harian, media mingguan, dan tabloid di Provinsi Kalimantan Timur.

**c. Isu Strategis**

- 1). Perlu penataan pengelolaan media massa, informasi dan telekomunikasi yang lebih terpadu
- 2). Perlu peningkatan jumlah dan mutu televisi lokal, media elektronik, media cetak dan televisi.
- 3). Perlu pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (*electronic government, -E-Gov*).

- 4). Perlu penguatan dan pemantapan Komisi Pengawas Media.
- 5). Perlu penataan instrumen akuntabilitas kontrol publik sebagai media interaksi antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

## 27. Penataan Ruang

### a. Kondisi Saat Ini

Struktur dan tata ruang Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 3 hirarki pusat pelayanan, yaitu Orde I: Kota Balikpapan; Orde II: Kota Samarinda, Tanah Grogot dan Tarakan serta Orde III: beberapa Kabupaten dengan pusat pelayanan Penajam, Tenggarong, Sendawar, Bontang, Sangatta, Tanjung Redeb, Tanjung Selor, Tana Tidung, Malinau, Nunukan, Simanggaris, Long Bawan dan Long Midang.

Sistem jaringan di Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 3 (tiga) poros, yaitu Poros Utara, Tengah dan Selatan yang mencakup jalan sepanjang 8.189,78 km dengan 15 pelabuhan umum, 17 pelabuhan khusus, 11 bandara yang PT Angkasa Pura, 4 bandara khusus, dan 54 bandara perintis.

Kawasan Perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 2 Kawasan Andalan, yaitu Kawasan Balikpapan-Samarinda dan sekitarnya, Kawasan Tanjung Redeb dan sekitarnya, Kawasan Tarakan dan sekitarnya, serta kawasan Tanah Grogot dan sekitarnya. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) di Provinsi Kalimantan Timur adalah KAPET SASAMBA dengan luas sekitar 4.334,83 km<sup>2</sup>.

Salah satu bagian penting dalam pengembangan wilayah adalah keseimbangan antara fungsi lindung dan budidaya. Kondisi yang ada menunjukkan makin luasnya dan kurang terkendalinya penebangan hutan yang mulai merambah hutan lindung, serta kurang optimalnya reklamasi pasca penambangan.

### b. Perkiraan Masa Depan

Dalam 20 tahun mendatang, perkembangan wilayah yang cenderung terpusat di daerah perkotaan terutama sepanjang pantai timur akan menyebabkan melebarnya kesenjangan antarwilayah. Di sisi lain, pengembangan ekonomi wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian akan membuka peluang tumbuhnya pusat kegiatan baru dan mendorong terjadinya keseimbangan antarsektor dan antarwilayah.

Dalam jangka panjang, pengembangan wilayah perdesaan dan pedalaman yang relatif terbelakang akan didukung oleh pengembangan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya secara efisien dan produktif.

Pengendalian secara ketat terhadap penebangan hutan diharapkan akan dapat menjaga keseimbangan fungsi hutan lindung dan menjaga mutu lingkungan di Kalimantan Timur.

### c. Isu Strategis

- 1). Perlu konsistensi pelaksanaan rencana tata ruang sebagai acuan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 2). Perlu percepatan pembangunan perdesaan dan pengembangan kota-kota kecil dan menengah untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.

- 3). Perlu percepatan pengembangan kawasan strategis guna mendorong perkembangan kawasan potensial dan memiliki peluang pertumbuhan ekonomi tinggi.
- 4). Perlu pengembalian mutu lingkungan di kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi khususnya kawasan bekas penambangan dan bekas penebangan hutan.
- 5). Perlu pengembangan kegiatan yang berbasis keberlanjutan ekologis untuk menjaga mutu lingkungan.

## 28. Kawasan Perbatasan

### a. Kondisi Saat Ini

Kondisi geografis kawasan perbatasan pada umumnya bukit dan hutan dengan garis perbatasan sepanjang 1.038 km. Kawasan perbatasan dengan Serawak dan Sabah-Malaysia Timur seluas 57,73 ribu km<sup>2</sup> atau 23,54 % dari luas Kalimantan Timur dengan rincian perbatasan Nunukan seluas 12,13 ribu km<sup>2</sup>, perbatasan Kutai Barat seluas 8,91 ribu km<sup>2</sup>, dan perbatasan Malinau seluas 36,69 ribu km<sup>2</sup>. Kawasan perbatasan meliputi 3 Kabupaten, 12 Kecamatan dan 319 Desa. Guna menjaga kedaulatan negara, saat ini terdapat 19 pos pengamanan berbatasan.

Dari ketiga Kabupaten di kawasan perbatasan, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Nunukan 7,17 jiwa/km<sup>2</sup> adalah paling padat dibanding Kabupaten Kutai Barat (4,77 jiwa/km<sup>2</sup>), dan Kabupaten Malinau (1,19 jiwa/km<sup>2</sup>). Prasarana jalan di kawasan perbatasan tersebut masih belum memadai. Infrastruktur terlengkap terdapat di Kabupaten Kutai Barat sepanjang 533,20 km dengan kepadatan jalan 17,23 m/km<sup>2</sup> kemudian Kabupaten Malinau sepanjang 396,60 km dengan kepadatan jalan 9,96 m/km<sup>2</sup>, dan Kabupaten Nunukan sepanjang 352,95 km dengan kepadatan 23,66 m/km<sup>2</sup>.

Berdasarkan potensi ekonomi kawasan perbatasan, komoditas unggulan terdiri dari karet, kelapa, kopi, lada, cengkeh, coklat, dan kelapa sawit yang terbanyak di Kabupaten Kutai Barat, kemudian Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau. Sampai sekarang kawasan perbatasan masih rawan baik dari segi keamanan wilayah maupun keamanan sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat dari tingginya kasus penebangan liar.

### b. Perkiraan Masa Depan

Kawasan perbatasan memiliki perkembangan yang relatif tertinggal dibanding wilayah perbatasan di negara tetangga. Pada masa yang akan datang ketertinggalan ini memiliki kecenderungan semakin jauh sehingga diperlukan berbagai terobosan seperti peningkatan mutu sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur jalan, listrik, air bersih dan sanitasi dan lainnya, pengembangan ekonomi rakyat serta pengelolaan perkebunan dan kehutanan berbasis masyarakat. Dengan berbagai terobosan tersebut, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah diharapkan akan semakin meningkat.

### c. Isu Strategis

- 1). Perlu percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui peningkatan mutu sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur jalan, listrik, air bersih dan sanitasi dan lainnya, pengembangan ekonomi rakyat serta pengelolaan perkebunan dan kehutanan berbasis masyarakat.
- 2). Perlu perluasan jaringan transportasi dari dan menuju ke daerah perbatasan.
- 3). Perlu penataan ruang yang dapat meningkatkan kegiatan bernilai ekonomis di kawasan perbatasan dan sekaligus dapat menjaga kedaulatan negara melalui tindakan pengawasan.
- 4). Perlu pengembangan dan perluasan kerjasama internasional dengan negara tetangga dalam penataan kawasan perbatasan.

## 29. Perumahan dan Permukiman

### a. Kondisi Saat Ini

Permukiman penduduk di Kalimantan Timur mengikuti pola sebaran dan migrasi penduduk. Perkembangan permukiman di perkotaan telah menimbulkan permukiman kumuh, terbatasnya sarana dan prasarana perkotaan, serta permasalahan sosial perkotaan. Sementara perkembangan permukiman pedesaan relatif lambat terutama kawasan pedalaman dan perbatasan, serta kepulauan.

Kondisi perumahan pada tahun 2005 pada umumnya cukup bagus, yaitu sekitar 98,54 % berlantai bukan tanah, 92,95 % beratap bukan daun, dan hanya 22,23 % yang menggunakan dinding tembok batu. Selain itu, fasilitas perumahan menggunakan penerangan listrik telah mencapai 87,01 %, air minum ledeng 46,55 %, air minum bersih 36,49% dan yang menggunakan septik baru mencapai 46,43 %. Komposisi kepemilikan rumah adalah antaranya 60% milik sendiri, 30 % sewa dan 10 % kredit. Pengadaan rumah sebagian besar ditangani oleh swasta.

Perkembangan perumahan dan permukiman di Kalimantan Timur tercatat bahwa kebutuhan rata-rata rumah sebesar 12.000 rumah/tahun. Jumlah kepala keluarga yang sudah memiliki rumah sebanyak 567.082 atau 87 % dari total kepala keluarga.

### b. Perkiraan Masa Depan

Kondisi permukiman di Provinsi Kalimantan Timur pada masa yang akan datang diperkirakan akan semakin membaik, namun penyediaan perumahan akan tetap terpusat di daerah perkotaan. Sementara, kondisi perumahan dan permukiman di daerah pedalaman dan perbatasan relatif tetap.

Selanjutnya melalui peningkatan pemberdayaan, pengembangan kegiatan ekonomi berbasis pertanian, serta pendidikan diharapkan akan terjadi peningkatan kesadaran kesehatan lingkungan permukiman. Pola ini akan mendorong partisipasi masyarakat dalam budaya bermukim yang sehat.

Penyediaan perumahan bagi masyarakat pendapatan rendah yang memadai dan sehat diperkirakan akan terus meningkat. Peran swasta dalam penyediaan perumahan sangat terbatas dan hanya terpusat di daerah perkotaan. Selain itu, perbaikan lingkungan permukiman dan pemberdayaan masyarakat di daerah perkotaan diperkirakan akan dapat mengurangi jumlah permukiman kumuh.

**c. Isu Strategis**

- 1). Perlu adanya pengembangan sistem perumahan dan permukiman yang sehat, bersih dan nyaman bagi masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan dan pedalaman.
- 2). Perlu adanya pengembangan prasarana dasar perumahan dan permukiman yang terpadu dengan memperhatikan tata ruang yang telah ditetapkan.
- 3). Perlu adanya penataan perumahan dan permukiman di perdesaan dan perbatasan yang menyatu dengan pengembangan pusat kegiatan ekonomi.
- 4). Perlu adanya pengembangan kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

**30. Transmigrasi**

**a. Kondisi Saat Ini**

Pengembangan wilayah di Kalimantan Timur memerlukan dukungan ketersediaan tenaga kerja dalam mengolah lahan dan mengelola sumber daya alam yang berasal dari luar daerah termasuk transmigran. Dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun telah dibangun sebanyak 237 unit permukiman transmigrasi yang dihuni oleh 72.505 KK (290.494 jiwa) atau 11,81 % dari total migran yang masuk 329.500 jiwa.

**b. Perkiraan Masa Depan**

Dalam waktu 20 tahun mendatang, permukiman transmigrasi diperkirakan dapat berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi baru yang mandiri, terpadu dan menyatu dengan pembangunan daerah Kalimantan Timur sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan nilai tambah dan mendorong kemajuan dan kemakmuran daerah.

**c. Isu Strategis**

- 1). Perlu adanya penataan dan pengembangan permukiman transmigrasi menjadi pusat permukiman baru dan pusat kegiatan ekonomi baru yang mendukung pengembangan wilayah.
- 2). Perlu adanya penyediaan prasarana dan sarana dasar di permukiman transmigrasi secara terpadu dengan pengembangan wilayah lainnya.
- 3). Perlu adanya penguatan kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pengembangan permukiman transmigrasi.

**31. Lingkungan Hidup**

**a. Kondisi Saat Ini**

Pemanfaatan potensi sumberdaya alam Kalimantan Timur yang terjadi saat ini diikuti oleh laju kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan yang terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan. Kegiatan pembalakan kayu, pertambangan liar dan pencurian ikan yang tidak terkendali menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. Pada saat ini sektor kehutanan mengalami penurunan kualitas hutan secara drastis sebagai akibat eksploitasi hutan yang berlebihan dari

kegiatan pembalakan kayu, konversi/pembukaan kawasan hutan dan kebakaran hutan.

Kerusakan SDA dan penurunan mutu lingkungan secara drastis tersebut menyebabkan perubahan tatanan dan fungsi lingkungan hidup. Hal ini menyebabkan munculnya ancaman global seperti perubahan iklim global, rusaknya keanekaragaman hayati, meningkatnya produksi gas rumah kaca. Selain itu, perubahan tersebut berdampak pada timbulnya konflik sosial dalam pengelolaan lahan dan meningkatnya kerugian bagi masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan.

Berbagai upaya pelestarian sumberdaya alam dan pemeliharaan lingkungan telah banyak dilakukan untuk menjaga kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan swasta.

#### **b. Perkiraan Masa Depan**

Dalam 20 tahun mendatang, pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi akan meningkatkan permintaan pembukaan lahan baru dan eksploitasi sumber daya alam yang selanjutnya membuka peluang terjadinya kerusakan lingkungan.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan diharapkan dapat dilakukan secara cermat, berhati-hati dan berkelanjutan yang didukung dengan penegakan hukum secara adil dan konsisten, konservasi kawasan, peningkatan peranserta masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan.

Di masa depan, berbagai isu perdagangan global seperti gerakan green consumer, persyaratan ketat dalam perdagangan internasional seperti ecolabelling, ecoefficiency, ISO 14000, produksi bersih dan persyaratan komoditi ramah lingkungan akan semakin menguat. Hal ini akan berpengaruh terhadap sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Kalimantan Timur.

Dalam 20 tahun mendatang, isu lingkungan hidup akan diperkirakan akan semakin meningkat dan berkembang menjadi konflik kepentingan dan isu politik yang berbuntut pada kekerasan dan anarki sehingga menuntut adanya kewaspadaan dan penanganan yang tepat.

#### **c. Isu Strategis**

Isu strategis yang sangat penting dan harus mendapatkan penanganan yang serius, mendesak dan sistematis, yaitu:

- 1) Perlu adanya optimalisasi pengendalian pencemaran air, laut, danau, mangrove, terumbu karang, udara dan lahan; kebakaran hutan dan asap; dan pencegahan kerusakan kawasan-kawasan yang dilindungi seperti kawasan pantai, sungai, taman nasional, dan hutan lindung.
- 2) Perlu adanya penegakan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan mendorong ketaatan pengelola hutan dalam penyiapan lahan tanpa pembakaran.
- 3) Perlu adanya penataan sistem pengelolaan lingkungan dalam mengantisipasi berbagai isu perdagangan global seperti gerakan *green consumer*, persyaratan perdagangan ekolabelling, ekofisiensi, ISO 14000, produksi bersih dan persyaratan komoditi yang ramah lingkungan.

- 4) Perlu adanya penghormatan, perlindungan dan pelestarian kearifan lokal yang berkembang di masyarakat tradisional dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.
- 5) Perlu adanya kerjasama seluruh pemangku kepentingan (pemerintah daerah, masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan swasta) dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
- 6) Perlu penguatan kerjasama internasional dalam mencegah dan menanggulangi ancaman pembalakan kayu, pencurian ikan dan penyerobotan sumberdaya alam di daerah perbatasan;



## BAB III

# VISI, MISI DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

### A. Visi dan Misi

#### 1. Visi

Dengan mempertimbangkan kondisi Kalimantan Timur saat ini, tantangan 20 tahun mendatang, modal dasar yang dimiliki, dan kesepakatan seluruh pemangku kepentingan; serta memperhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka Visi Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 adalah:

#### **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"**

**Masyarakat yang adil** adalah masyarakat Kalimantan Timur yang ditandai oleh tata kehidupan yang memberi kesempatan yang sama, setara dan tanpa diskriminasi bagi semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk meningkatkan taraf hidup; memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya secara lebih baik, mudah dan bermutu; mengemukakan pendapat; menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing; memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

**Masyarakat yang adil** adalah masyarakat Kalimantan Timur yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak sipil dan politik, dan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya rakyat, serta mengutamakan kepentingan rakyat dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan berlandaskan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

**Masyarakat yang sejahtera** adalah masyarakat Kalimantan Timur yang terpenuhi hak-hak sipil dan politik, dan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju; serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya.

**Pembangunan berkelanjutan** adalah pembangunan Kalimantan Timur yang didasarkan pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara cermat, bijaksana, dan berhati-hati dengan mengutamakan keseimbangan dan kelestarian; serta memperhatikan kepentingan generasi yang mendatang.

#### 2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Timur tersebut, **misi pembangunan Kalimantan Timur** adalah sebagai berikut:

- 1). Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;

- 2). Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
- 3). Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
- 4). Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
- 5). Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

## **B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah**

### **1. Tujuan**

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang adil dan sejahtera dalam pembangunan berkelanjutan sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **2. Sasaran**

Sasaran pokok pembangunan Kalimantan Timur yang akan dicapai dalam 20 tahun mendatang sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia ditandai oleh hal-hal berikut:
  - (1) Terlaksananya sistem jaminan sosial bagi masyarakat Kalimantan Timur yang terpadu, efisien dan efektif.
  - (2) Meningkatnya derajat dan mutu pendidikan masyarakat Kalimantan Timur.
  - (3) Meningkatnya derajat dan mutu kesehatan masyarakat Kalimantan Timur.
  - (4) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG).
  - (5) Berkembangnya karakter masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - (6) Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam seluruh bidang pembangunan.
  - (7) Makin kuatnya nilai-nilai keutamaan, berakhlak mulia, bermoral, beriman dan bertaqawa yang dianut oleh masyarakat Kalimantan Timnur.
  - (8) Makin mantapnya budaya masyarakat Kalimantan Timur yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa.

2. Terwujudnya struktur ekonomi yang andal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya ditandai oleh hal-hal berikut:
  - (1) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pada tahun 2025 pendapatan per kapita Kalimantan Timur semakin meningkat, pengangguran menurun dan penduduk miskin berkurang.
  - (2) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kalimantan Timur dari pengembangan sektor industri pengolahan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - (3) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kalimantan Timur dari pengembangan sektor pertanian modern yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi..
  - (4) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kalimantan Timur dari pengembangan sektor jasa yang lebih bermutu dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.berdayasaing.
  - (5) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kalimantan Timur dari pengembangan sektor pertambangan yang berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Terwujudnya pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional ditandai oleh hal-hal berikut:
  - (1) Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan di Kalimantan Timur yang andal, terpadu dan merata ke seluruh wilayah kabupaten/kota.
  - (2) Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan termasuk terpenuhinya pasokan listrik bagi hampir seluruh rumah tangga dan wilayah perdesaan, pedalaman dan perbatasan.
  - (3) Terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern yang menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur guna terciptanya masyarakat informasi Kalimantan Timur.
  - (4) Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
4. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum ditandai oleh hal-hal berikut:
  - (1) Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur yang profesional, kompeten, bersih, andal, berwibawa dan bertanggungjawab.
  - (2) Menguatnya peranan masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik
  - (3) Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
  - (4) Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah Kalimantan Timur yang menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan masyarakat, dan keutuhan wilayah dari ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan.

5. Terwujudnya pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi ditandai oleh hal-hal berikut:
- (1) Terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan yang makin merata ke seluruh wilayah Kalimantan Timur termasuk wilayah pedalaman, perdesaan dan perbatasan.
  - (2) Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
  - (3) Terwujudnya kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur yang didukung oleh pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara serasi, seimbang, dan lestari.
  - (4) Terpeliharanya keragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam dan lingkungan Kalimantan Timur.
  - (5) Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat Kalimantan Timur dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.



## **BAB IV**

# **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

### **A. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur Yang Mandiri, Berdaya Saing Tinggi dan Berakhlak Mulia**

#### **1. Kependudukan**

Strategi 1: Penurunan angka fertilitas dan laju pertumbuhan penduduk.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan dan pengembangan keluarga sejahtera.
- b. Peningkatan mutu kesehatan reproduksi.
- c. Pembangunan berwawasan jender.

Strategi 2: Penyebaran penduduk secara merata dengan mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan, pedalaman, dan perbatasan.

Arah Kebijakan:

- a. Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan secara terpadu di wilayah perdesaan, pedalaman dan perbatasan.
- b. Penyediaan jaringan transportasi di wilayah perdesaan, pedalaman dan perbatasan.
- c. Pengembangan ekonomi lokal di wilayah perdesaan, pedalaman dan perbatasan.

Strategi 3: Pengembangan manajemen kependudukan yang andal, tertib, terpadu dan berbasis teknologi dan jaringan informasi.

Arah Kebijakan:

- a. Penataan administrasi kependudukan berdasarkan nomor identitas penduduk.
- b. Pengembangan sistem informasi dan database kependudukan lintas kabupaten/kota dan lintas dinas/satuan kerja perangkat daerah.

#### **2. Pendidikan**

Strategi 1: Penuntasan program wajib belajar 9 tahun dan pengembangan program wajib belajar 12 tahun terutama di wilayah perdesaan, pedalaman, dan perbatasan.

Arah Kebijakan:

- a. Perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan untuk sekolah pada usia wajib belajar.

- d. Peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga pengajar sehingga mencapai strata pendidikan S1 dan memiliki sertifikasi sesuai standar mutu nasional.

Strategi 2: Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Unggulan dan Kejuruan.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan sekolah percontohan pada setiap jenjang pendidikan melalui penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, dan tenaga pengajar yang berkualitas pada setiap kabupaten/kota.
- b. Pengembangan pendidikan kejuruan dan keahlian sesuai kebutuhan pasar kerja setingkat SMU dan perguruan tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
- c. Peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.
- d. Pengembangan kerjasama dan jejaring pendidikan dengan sekolah unggulan nasional dan internasional.
- e. Pengembangan pendidikan khusus beberapa wilayah yang bertaraf internasional.

Strategi 3: Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal serta pendidikan informal setingkat perguruan tinggi yang bermutu di berbagai daerah.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan lembaga pendidikan sesuai permintaan tenaga kerja.
- b. Percepatan pengembangan lembaga pendidikan di daerah yang kurang berkembang.
- c. Pengembangan pendidikan lanjutan pendukung keahlian khusus.
- d. Pengembangan pusat pelatihan yang memiliki standar nasional.

**3. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)**

Strategi 1: Penguatan dan Pengembangan Sistem Statistik.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan dan penguatan sistem informasi statistik yang bermutu, akurat, tepat waktu, mutakhir, terbuka, terpercaya, berbasis teknologi informasi dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan; pengembangan riset dasar, ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengambilan keputusan, serta mendukung peningkatan mutu pelayanan publik.
- b. Pengembangan dan penguatan pusat data dan sistem informasi geografi berbasis teknologi informasi dalam mendukung penataan ruang dan perencanaan pembangunan wilayah secara terpadu.
- c. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi administrasi yang andal, terpercaya, efisien dan efektif dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik.
- d. Peningkatan jumlah dan mutu sumberdaya manusia yang mampu memanfaatkan, mengelola dan mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi.

- e. Peningkatan dan penguatan kelembagaan yang mampu mendukung terwujudnya sistem informasi yang andal, modern dan terpadu.

Strategi 2: Pengembangan riset ilmu-ilmu dasar dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan mutu sumber daya manusia dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Pengembangan dan penguatan lembaga penelitian dan pengembangan.

Strategi 3: Pemanfaatan dan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.
- b. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah secara efektif dan efisien.
- c. Pemanfaatan hasil penelitian dalam peningkatan mutu layanan publik.

Strategi 4: Pemanfaatan dan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dasar sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat.

Arah Kebijakan:

- a. Penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK kepada masyarakat secara mudah, murah dan tanpa hambatan.
- b. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK dalam peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing usaha masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat pengguna.
- c. Penggunaan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK dalam meningkatkan mutu dan jangkauan layanan publik.

Strategi 5: Pengembangan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari para pelaku usaha/industri swasta besar dan perguruan tinggi kepada masyarakat.

Arah Kebijakan:

- a. Mengalokasikan dalam bentuk insentif untuk mengembangkan motivasi masyarakat dan lembaga non litbang.
- b. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan berbasis IPTEK di setiap bidang pembangunan.

Strategi 6: Peningkatan dan Penguatan kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta dalam pengembangan riset unggulan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai dalam penelitian pembangunan.
- b. Peningkatan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan berbasis IPTEK terapan dengan berbagai lembaga penelitian masyarakat.

#### 4. Kesehatan

Strategi 1: Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui peningkatan pemahaman kesehatan sebagai upaya menurunkan angka kematian dan meningkatkan usia harapan hidup.

Arah Kebijakan:

- a. Promosi cara hidup sehat.
- b. Peningkatan kemitraan antara tenaga medis dan non medis.
- c. Pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam meningkatkan mutu kesehatan keluarga.
- d. Pengadaan desa siaga dengan meningkatkan implementasi kesehatan masyarakat.
- e. Peningkatan mutu pelayanan terhadap lansia.

Strategi 2: Peningkatan pelayanan kepada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu menyusui, pelayanan bayi dan balita.

Arah Kebijaan:

- a. Peningkatan jangkauan pelayanan ibu hamil dan bersalin oleh tenaga kesehatan.
- b. Pengembangan informasi kesehatan bagi ibu hamil & ibu menyusui.

Strategi 3: Peningkatan pencegahan penyakit menular dan wabah sejak dini dengan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta berperilaku hidup bersih dan sehat.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan hygiene sanitasi lingkungan perumahan dan tempat- tempat umum lainnya.
- b. Peningkatan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan untuk pencegahan penyakit.
- c. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat.

Strategi 4: Pengembangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan untuk masyarakat, pekerja, dan keluarga miskin serta perlindungan kepada masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan sistem dan pelayanan kesehatan yang terintegrasi.
- b. Peningkatan program pemeliharaan kesehatan masyarakat yang sangat memerlukan pelayanan kesehatan seperti santunan lansia.
- c. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan yang murah melalui berbagai program subsidi.
- d. Peningkatan gizi masyarakat yang mendukung tercapainya sumberdaya manusia yang bermutu.

Strategi 5: Peningkatan dan pemerataan fasilitas kesehatan di setiap Kabupaten/Kota dengan dilengkapi sarana pendukung kesehatan.

Arah Kebijakan:

- a. Pemantapan kerjasama lintas program dan sektor yang berkaitan dengan bidang kesehatan.
- b. Pemantapan akreditasi fasilitas kesehatan.
- c. Pemantapan mutu dan perluasan jangkauan kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan terutama pada wilayah pedalaman, perdesaan dan kawasan rawan bencana.
- d. Penambahan fasilitas pendidikan yang dapat menciptakan tenaga kesehatan.

Strategi 6: Peningkatan dan pemerataan tenaga medis, paramedis dan non medis di setiap kabupaten/kota yang didukung oleh adanya dokter spesialis dan ahli-ahli kesehatan.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan pendidikan dan latihan bagi tenaga kesehatan.
- b. Peningkatan mutu sumberdaya dengan meningkatkan perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan dengan meningkatkan profesionalisme.
- c. Peningkatan jumlah tenaga medis, spesialis dasar dan tenaga ahli kesehatan.
- d. Peningkatan tenaga medis sampai ke pelosok perdesaan dan pedalaman.

Strategi 7: Peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB), dalam mewujudkan keluarga kecil, bahagia, sejahtera

Arah Kebijakan:

- a. Pemenuhan permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
- b. Peningkatan pemahaman pengetahuan sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi.
- c. Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
- d. Pembinaan kemandirian, peningkatan cakupan dan mutu layanan KB, dan kesehatan reproduksi.

- e. Pemberian informasi penggunaan alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, dan remaja; maupun KB mandiri.
- f. Peningkatan sosialisasi program keluarga berencana sampai pedalaman dan perbatasan.
- g. Pengendalian angka kelahiran dan memperkecil angka kematian.

## 5. Ketenagakerjaan

Strategi 1: Peningkatan peluang usaha yang memiliki daya saing tinggi dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan peluang berusaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
- b. Peningkatan ketrampilan dan keahlian yang lebih spesifik.
- c. Peningkatan produktivitas kerja melalui pembenahan manajemen sistem tenaga kerja.

Strategi 2: Peningkatan pemenuhan tenaga kerja sesuai dengan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri.

Arah Kebijakan:

- a. Penataan administrasi ketenagakerjaan yang lebih mudah, jelas, pasti dan tanpa hambatan.
- b. Penguatan keterkaitan pendidikan dan dunia usaha dalam penyediaan tenaga kerja.
- c. Peningkatan mutu dan perluasan jenis pelatihan melalui BLK (Balai Latihan Kerja) sesuai dengan keahlian yang diperlukan.
- d. Peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengerahan dan penempatan tenaga kerja.
- e. Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha baik domestik maupun asing dalam pengerahan dan penempatan tenaga kerja.

Strategi 3: Peningkatan partisipasi dunia usaha untuk memacu peningkatan mutu tenaga kerja.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kualitas tenaga kerja di dunia usaha khususnya bagi tenaga berkecakupan rendah dan menengah.
- b. Peningkatan kualitas pendidikan dan ketrampilan bagi setiap tenaga kerja yang berorientasi pemenuhan kualitas tenaga kerja dan pasar kerja.
- c. Pengembangan jiwa kewirausahaan bagi angkatan kerja.
- d. Perbaikan hubungan sistem ketenagakerjaan, khususnya hubungan antara industri dengan para pekerjanya.
- e. Penghapusan tenaga kerja anak.

Strategi 4: Penciptaan pasar kerja yang fleksibel, hubungan kerja yang harmonis disertai perlindungan tenaga kerja yang memadai

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan peran dan kualitas stakeholders dalam perlindungan tenaga kerja.
- b. Perbaikan sistem pengawasan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
- c. Peningkatan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja.

## 6. Perempuan dan Anak

Strategi 1: Peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan peran aktif perempuan dalam bidang pembangunan baik ekonomi, sosial, politik, budaya.
- b. Perluasan kesempatan yang lebih luas pada kaum perempuan dalam berkarir dan berkarya.
- c. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan sebagai salah satu bagian dari sumberdaya manusia termasuk perlindungan tenaga kerja wanita.
- d. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- e. Peningkatan kualitas anak dan perempuan.
- f. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

## 7. Pemuda dan Olah raga

Strategi 1: Peningkatan peran dan fungsi pemuda dalam kegiatan pembangunan.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kegiatan dan organisasi kepemudaan untuk mendorong kepedulian pada berbagai permasalahan pembangunan.
- b. Peningkatan fungsi dan peran lembaga kepemudaan sebagai wadah dalam menampung aspirasi pemuda.
- c. Pembinaan generasi muda untuk meningkatkan dinamika kepemudaan dan kepemimpinan.
- d. Pembinaan pengembangan seni dan budaya.

Strategi 2: Peningkatan prestasi olahraga masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang olah raga.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana olahraga.
- b. Peningkatan kegiatan olahraga andalan.
- c. Peningkatan SDM (pembina, pelatih dan olahragawan) pada setiap wilayah.

- d. Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan olahraga pada berbagai instansi dan organisasi kepemudaan.
- e. Peningkatan peran dan fungsi serta kualitas tenaga pelatih dari tempat-tempat pelatihan atau pembinaan cabang-cabang olahraga.

## 8. Agama

Strategi 1: Peningkatan pelayanan kegiatan ibadah umat beragama dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keagamaan.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama sesuai pemeluk masing-masing.
- b. Peningkatan pembangunan fasilitas peribadatan.
- c. Peningkatan kegiatan keagamaan bagi setiap pemeluk agama.

Strategi 2: Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama bagi setiap individu dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Arah Kebijakan:

- a. Penjaminan kebebasan dan perluasan kesempatan pelaksanaan ajaran agama.
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan maupun lembaga sosial berbasis keagamaan.
- c. Peningkatan kualitas tenaga pengajar di bidang agama.

Strategi 3: Peningkatan dan memantapkan kerukunan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, sehingga para pemeluk agama dapat berperan sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kerukunan antar umat beragama.
- b. Peningkatan kegiatan dan pemantapan antar umat beragama maupun secara internal bagi tiap pemeluk agama.
- c. Peningkatan peranan tokoh agama dalam segala kegiatan.

## 9. Kesejahteraan Sosial

Strategi 1: Peningkatkan pembinaan dan kualitas pelayanan serta bantuan dasar terhadap anak terlantar, anak asuh, penyandang cacat, penduduk lanjut usia, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kesejahteraan sosial keluarga/fakir miskin dan penyandang cacat.
- b. Pemberdayaan anak terlantar, anak jalanan, dan anak cacat dengan menjamin dan membekali keterampilan tumbuh kembang anak secara wajar agar diterima di lingkungannya.
- c. Pemberdayaan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.

- d. Peningkatan sumberdaya manusia pengelola kesejahteraan sosial.
- e. Perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial.
- f. Pemberdayaan komunitas adat terpencil dengan meningkatkan kesejahteraan sosialnya dengan hidup menetap dalam suatu lingkungan permukiman.
- g. Pemberdayaan dan bantuan bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran dengan membantu dan membekali keterampilan kesejahteraan.
- h. Pelayanan dan rehabilitasi bagi korban NAPZA, eks NAPI, dan eks wanita tuna susila dengan mengembalikan korban ke kehidupan yang normal dan diterima di lingkungan sosialnya.

#### **10. Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa**

Strategi 1: Peningkatan kapasitas pemerintah desa/pemerintah kampung dan kelurahan

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa/pemerintah kampung dan pemerintah kelurahan.
- b. Peningkatan pembinaan aparat pemerintah desa/pemerintah kampung dan pemerintah kelurahan.

Strategi 2: Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa/Kampung (BPD/K).

Arah Kebijakan:

- a. Optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa/Kampung.
- b. Optimalisasi fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa/Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa/kampung.

Strategi 3: Peningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan/kampung dan kelurahan.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kualitas SDM masyarakat di perdesaan/kampung dan kelurahan.
- b. Pengembangan pelatihan pemberdayaan masyarakat.

Strategi 4: Peningkatan peran, partisipasi dan swadaya masyarakat.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan.
- b. Peningkatan peran kelembagaan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif.

Strategi 5: Peningkatan kesejahteraan keluarga dan sosial budaya masyarakat secara dinamis.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat sesuai dengan kondisi lokal.
- b. Pengembangan semangat kegotong-royongan masyarakat dalam pembangunan.

Strategi 6: Pemantapan dan peningkatan peran lembaga dan usaha ekonomi masyarakat.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan peran lembaga ekonomi di pedesaan/kampung dan kelurahan.
- b. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat.
- c. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.
- d. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat miskin melalui pengembangan kemampuan kerja dan berusaha.

Strategi 7: Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya lokal.
- b. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan.
- c. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat melalui hasil penemuan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas.

Strategi 8: Peningkatkan kapasitas tata ruang perdesaan/ kampung dan kelurahan.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kualitas dan penataan infrastruktur perdesaan/kampung dan kelurahan.
- b. Peningkatan kualitas dan penataan permukiman masyarakat perdesaan/kampung dan kelurahan.

## **B. Mewujudkan Struktur Ekonomi Yang Andal dengan Partisipasi Masyarakat yang Seluas-luasnya.**

### **1. Perekonomian Daerah**

Strategi 1: Perubahan struktur ekonomi dari keunggulan komparatif sumberdaya alam menjadi berbasis berkeunggulan kompetitif berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penguatan industri pengolahan sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan serta pertambangan dengan menghasilkan produk-produk secara modern dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan peran sektor pertanian yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja.
- b. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah dari sektor pertanian melalui pengelolaan dan pengembangan komoditas unggulan.
- c. Peningkatan investasi dan perdagangan khususnya diluar sektor migas.
- d. Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM).
- e. Penguatan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan, dan kerjasama antar sektor, dunia usaha, dan masyarakat guna mendukung peluang berusaha dan investasi.

- f. Pengembangan kawasan ekonomi terpadu yang didasarkan keterkaitan antarsektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial.

Strategi 2: Penguatan daya saing perekonomian secara global bertumpu pada penguatan sektor industri hulu–hilir guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan lingkungan bisnis yang kondusif dengan mengembangkan infrastruktur pendidikan dan pelatihan di bidang teknik dan manajerial.
- b. Peningkatan akses informasi pasar internasional.
- c. Peningkatan standar mutu produk unggulan yang berbasis ekspor.
- d. Perluasan basis produk ekspor dengan tetap memperhatikan kriteria produk ekspor yang ramah lingkungan

## 2. Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

Strategi 1: Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan dan pengembangan manajemen usaha tani.

Arah Kebijakan:

- a. Perluasan kesempatan yang sama kepada semua Pegawai dan Petani/Kelompok Tani mengikuti Diklat, Kursus, Sekolah Lapang, Studi Banding, Pelatihan dan lain-lain bagi yang memenuhi syarat.
- b. Peningkatan peran serta langsung masyarakat lokal dalam penggunaan teknologi tepat guna dan diversifikasi pertanian.

Strategi 2: Peningkatan indeks pertanaman bagi daerah-daerah sentra pembangunan pertanian dan peningkatan efisiensi lahan melalui diversifikasi pertanian serta perluasan lahan pertanian dengan menerapkan teknologi budidaya yang adaptif dan ramah lingkungan.

Arah Kebijakan:

- a. Pembangunan infrastruktur dan pengadaan alat-alat produksi pertanian.
- b. Pengembangan teknologi bidang pertanian dan peningkatan kemampuan teknis sumberdaya manusia untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

Strategi 3: Pengembangan kawasan pertanian dan pedesaan melalui pengembangan agropolitan dengan pengembangan jaringan infrastruktur antara sentra pertanian dan pusat-pusat pertumbuhan/kota.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan, aksesibilitas dan stabilitasi pengadaan disamping aspek produksi, distribusi dan keamanan (konsumsi).

- b. Pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis.
- c. Peningkatan teknologi tepat guna pada kawasan sentra-sentra pertanian potensial.

Strategi 4: Pengembangan berbagai komoditas pertanian yang berorientasi pada sumberdaya lokal dan kebutuhan pasar dengan memperhatikan pendekatan keterpaduan antara sub sistem hulu dan hilir.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam.
- b. Perlindungan lahan subur, khususnya sawah S1 dari alih fungsi lahan non-pertanian.
- c. Pemantapan pengembangan sistem dan usaha agribisnis secara terpadu dan utuh untuk menghasilkan produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi dipasaran hingga dapat mencapai pasar luar negeri.
- d. Peningkatan pengawasan dalam pengelolaan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagai usaha mencapai kesejahteraan di Kalimantan Timur.
- e. Penjaminan ketersediaan pangan dalam rangka untuk menunjang ketahanan pangan
- f. Pengembangan sistem pemasaran dan kerjasama pertanian dalam dan luar negeri untuk promosi produk unggulan daerah.
- g. Optimalisasi peran serta lembaga-lembaga pertanian dan pengembangan kebijakan yang berpihak pada petani.

### 3. Perkebunan

Strategi 1: Pengembangan perkebunan sebagai pilar ekonomi.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan peran masyarakat lokal dalam upaya menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar.
- b. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menanamkan investasi.
- c. Penyediaan lahan perkebunan disertai dengan berbagai kemudahan dalam pengurusan izin untuk pengembangan lahan.
- d. Peningkatan peran PTPN dan profesionalisme dalam pengelolaan perkebunan, yang berpotensi meningkatkan daya saing dalam pengelolaannya.
- e. Pengembangan sentra-sentra produksi perkebunan untuk memberikan stimulan daerah potensi disekitarnya.
- f. Peningkatan pemanfaatan infrastruktur dan teknologi tepat guna di bidang perkebunan.
- g. Pengembangan perkebunan secara terintegrasi dengan peternakan dan pertanian serta industri pengolahan untuk meningkatkan efisiensi nilai lahan perkebunan.
- h. Pemanfaatan hasil perkebunan untuk kepentingan sektor lain seperti peternakan dan industri.

Strategi 2: Pengembangan perkebunan yang berpotensi dan bernilai ekonomi tinggi.

Arah Kebijakan:

- a. Pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk diubah/digunakan sebagai pengembangan perkebunan yang lebih produktif dan intensif.
- b. Pengembangan perkebunan berbasis bio-energi.
- c. Pengembangan sentra industri baru pada sektor perkebunan yang potensial sebagai kutub pertumbuhan bagi daerah sekitarnya.
- d. Pengembangan perkebunan dengan mengikuti standar yang ditetapkan termasuk kelayakan ekologi.
- e. Penetapan peraturan terkait yang mengatur secara jelas mengenai jenis dan kriteria peruntukan lahan perkebunan dan pengelolaannya.
- f. Penetapan deregulasi yang menjamin kesejahteraan perangkat di bidang perkebunan.

Strategi 3: Peningkatan mutu dan kualitas produksi perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia pada bidang perkebunan, didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai terutama dari pendidikan berbasis spesifikasi keahlian (kejuruan)
- b. Penggunaan teknologi budidaya dan tepat guna pada pengelolaan perkebunan.
- c. Pengelolaan komoditi perkebunan potensial melalui diversifikasi pengolahan hasil produksi (agroindustri terkait).

#### **4. Kehutanan**

Strategi 1: Penjaminan keberadaan sumberdaya hutan dalam luasan yang mencukupi dan menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan intensif guna mendukung peningkatan kualitas ekosistem.

Arah Kebijakan:

- a. Pemberantasan pembalakan ilegal (illegal logging).
- b. Penegakan hukum dan meningkatkan partisipasi para pihak kehutanan.
- c. Pemantapan kawasan hutan.
- d. Perlindungan hutan adat.
- e. Penjagaan kawasan hutan lindung dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
- f. Perluasan informasi dan pendidikan tentang manfaat kelestarian hutan bagi masyarakat.

Strategi 2: Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan.

Arah Kebijakan:

- a. Percepatan pemulihan lahan/DAS yang kritis dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
- b. Peningkatan akses masyarakat setempat dalam pemanfaat SDH dan melestarikannya.
- c. Revitalisasi sektor kehutanan, utamanya industri pengolahan kayu.
- d. Peningkatan reboisasi hutan, HTI dan penanaman kembali hasil hutan ikutan.

Strategi 3: Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang diimbangi dengan peningkatan kualifikasi sumberdaya manusia.
- b. Penciptaan industri yang efisien dan berdaya saing global serta peningkatan penyerapan tenaga kerja.

**5. Peternakan**

Strategi 1: Pengembangan peternakan sehingga menjadi komoditas ekspor.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan ternak yang telah menjadi andalan dan unggulan.
- b. Penciptaan kondisi atau iklim usaha yang sehat.
- c. Pengembangan infrastruktur yang mendukung kelancaran usaha peternakan, baik sarana produksi, pengolahan dan pemasaran.
- d. Pemanfaatan sumberdaya alam lokal bidang peternakan.

Strategi 2: Peningkatan nilai tambah peternakan dengan melakukan peningkatan produksi hasil pengolahan produk peternakan

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan sumber daya manusia peternakan, baik petani ternak maupun petugas teknis melalui peningkatan ketrampilan teknologi pengelolaan hasil produk peternakan.
- b. Pengembangan teknologi pengolahan hasil peternakan dengan memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang untuk pengolahan hasil peternakan.

Strategi 3: Perluasan peluang pemasaran seluas-luasnya kepada pelaku usaha dan petani ternak untuk memasarkan produk peternakan.

Arah Kebijakan:

- a. Pembangunan sarana dan fasilitas pemasaran produk peternakan, seperti adanya pasar hewan di setiap kabupaten dan kota.
- b. Pemberian kemudahan ijin untuk memasarkan produk peternakan ke luar daerah maupun luar negeri.

Strategi 4: Pengembangan peternakan yang berbasis kerakyatan.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan usaha peternakan dengan skala ekonomis.
- b. Pembangunan sistem informasi teknologi dan pemasaran yang menjangkau Kabupaten dan Kecamatan.
- c. Peningkatan kemampuan peternak mengakses permodalan dengan skim kredit lunak dan kemitraan.

Strategi 5: Peningkatan sumberdaya manusia peternakan agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan peranan kelembagaan peternakan dalam mendukung ekonomi kerakyatan.
- b. Peningkatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana peternakan untuk meningkatkan perkembangan agribisnis dan agroindustri bidang peternakan.
- c. Peningkatan sumberdaya manusia peternakan di bidang teknologi pengembangan kewirausahaan peternakan, pengolahan dan pemasaran.

Strategi 6: Pengembangan peternakan yang tangguh dengan sistem agribisnis berbasis sumberdaya lokal.

Arah Kebijakan:

- a. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan akan daging ternak dan telur.
- b. Penciptaan suasana yang kondusif dan kepastian hukum dalam berinvestasi di bidang peternakan.
- c. Pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam lokal yang mendukung pembangunan peternakan.
- d. Pemanfaatan lahan dan hasil pertanian - perkebunan untuk pengembangan ternak yang saling menguntungkan.

## **6. Kelautan dan Perikanan**

Strategi 1: Peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi seluruh stakeholders bidang kelautan dan perikanan

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia bagi seluruh stakeholders kelautan dan perikanan.
- b. Peningkatan kelembagaan masyarakat pembudidaya, nelayan dan masyarakat pesisir.
- c. Pengembangan pendidikan keahlian dalam mencetak tenaga kerja di sektor perikanan yang profesional.

Strategi 2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, nelayan dengan perbaikan gizi masyarakat, pendidikan, kesehatan dan pembenahan kawasan pemukiman nelayan.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan lembaga perekonomian masyarakat dengan melakukan pembinaan terhadap koperasi kelautan dan perikanan dan adanya dukungan permodalan dari lembaga keuangan.
- b. Pengembangan kawasan pesisir, penataan perumahan nelayan menjadi obyek wisata bahari.
- c. Pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.
- d. Peningkatan aksesibilitas ke sentra-sentra produksi perikanan.

Strategi 3: Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan lestari dengan memperhatikan wilayah konservasi sumberdaya ikan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan danau.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi kawasan sentra produksi perikanan.
- b. Peningkatan pengawasan diperairan laut untuk mencegah illegal fishing.
- c. Pencegahan pencemaran perairan dari limbah industri dan rumah tangga.
- d. Pengelolaan potensi pesisir dan kelautan secara lestari dan seimbang.
- e. Perlindungan kawasan tangkapan lokal.

Strategi 4: Pengembangan iklim kemitraan dan kewirausahaan yang berbasis pada pengembangan ekonomi lokal masyarakat pesisir, pembudidaya ikan dan nelayan.

Arah Kebijakan:

- a. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kemitraan dengan lembaga ekonomi masyarakat.
- b. Pemberian kemudahan izin usaha perikanan bagi pelaku usaha perikanan.

Strategi 5: Pengembangan berbagai komoditas perikanan dan kelautan yang berorientasi pada sumberdaya lokal dan kebutuhan pasar.

Arah Kebijakan:

- a. Diversifikasi pengolahan hasil perikanan.
- b. Pengembangan produk olahan sebagai produk unggulan.

Strategi 6: Pengembangan potensi wisata bahari.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan teknologi budidaya perikanan darat dan laut dalam upaya peningkatan hasil produksi dan pengolahannya.

- b. Peningkatan teknologi budidaya dan penangkapan untuk menciptakan daya saing produk perikanan dalam pasar bebas.

Strategi 7: Pengembangan sistem pemasaran produk perikanan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan standarisasi perikanan.
- b. Peningkatan promosi perikanan.
- c. Pengawasan penggunaan bahan pengawet produk perikanan.
- d. Penggunaan teknologi unggulan perikanan.

## 7. Investasi daerah

Strategi 1: Peningkatan nilai investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Luar Negeri (PMDN/PMA) dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik dan kondusif.

Arah Kebijakan:

- a. Penjaminan kepastian usaha dan kepastian hukum dalam berusaha.
- b. Penciptaan kemudahan usaha dan investasi melalui berbagai deregulasi dan sistem insentif.
- c. Peningkatan dan pengembangan sarana penunjang perdagangan melalui pengembangan jaringan informasi produksi dan pasar.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan peluang investasi dan potensi ekonomi lokal.
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi dan kerjasama pengembangan ekonomi potensial.
- f. Penyiapan pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi khusus untuk merangsang minat investasi.

Strategi 2: Peningkatan pendapatan dari penerimaan PAD dalam upaya mengurangi ketergantungan anggaran terhadap pemerintah pusat.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan Pengelolaan dan pengembangan kemampuan usaha BUMD.
- b. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Peningkatan kemampuan aparatur khususnya dalam manajemen keuangan dan aset daerah.
- d. Pengembangan kemitraan antara BUMD dengan mitra usaha lainnya dalam membuka peluang usaha dan penggalan sumber PAD.
- e. Peningkatan kemudahan dalam berinvestasi.
- f. Pemantapan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan dan tanggung jawab pada pengelolaan BUMD.

## 8. Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

### 1). Perindustrian

Strategi 1: Penataan perindustrian yang terintegrasi dengan pemanfaatan seoptimal mungkin sumberdaya alam yang dimiliki sesuai dengan unggulan daerah.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus Indonesia sebagai upaya perwujudan pembentukan struktur industri yang mapan mulai dari industri hulu sampai hilir.
- b. Pengembangan kawasan ekonomi khusus untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui keberkaitan antar sektor potensial.
- c. Pengembangan cluster industri berbasis komoditas unggulan.
- d. Peningkatan kualitas SDM dengan kualitas produk sesuai dengan standar internasional (ISO).

Strategi 2: Peningkatan produktivitas industri skala besar dengan pemanfaatan seoptimal mungkin sumberdaya alam yang dimiliki sesuai dengan unggulan daerah.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan iklim investasi bidang perindustrian.
- b. Peningkatan nilai tambah berbagai sumberdaya alam melalui pengolahan dan berbagai proses industrialisasi dari hulu sampai hilir.
- c. Pengembangan kemitraan dalam pemenuhan bahan baku, proses produksi dan jaminan pasar untuk menjamin kelangsungan produk.

Strategi 3: Peningkatan Daya Saing Industri dan Keberlanjutan Industri.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan keterampilan SDM, melalui standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri.
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industri.
- c. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi baik dalam negeri dan luar negeri.
- d. Peningkatan kemampuan industri dalam adaptasi teknologi dan pengembangan teknologi dalam proses produksi.

### 2). Perdagangan

Strategi 1: Peningkatan aktifitas perdagangan yang mampu memberikan dukungan terhadap pengembangan perekonomian wilayah.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan sentra pemasaran produk unggulan daerah dalam skala provinsi maupun kabupaten/kota.
- b. Peningkatan pertumbuhan ekspor non migas berbasis produk unggulan daerah.

- c. Penguatan usaha dan lembaga perdagangan, perlindungan terhadap konsumen, meningkatkan tertib usaha niaga, peningkatan daya saing, perluasan pasar ekspor dan promosi.

Strategi 2: Peningkatan kerjasama perdagangan regional dan internasional.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan standarisasi perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
- b. Pengembangan perdagangan lintas sektor, regional, dan internasional.
- c. Peningkatan neraca perdagangan melalui kerjasama regional dan internasional.
- d. Pengembangan sentra pemasaran produk unggulan daerah dalam skala Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Strategi 3: Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, melalui distribusi barang dan jasa yang efektif dan efisien.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan jaringan distribusi dan sistem informasi produk unggulan daerah.
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin keadilan aktivitas usaha atau menjamin tidak adanya praktek monopoli dalam aktivitas perdagangan.
- c. Peningkatan efisiensi dengan mengurangi biaya tinggi dalam kegiatan perdagangan.

### 3). **Usaha Kecil Menengah dan Koperasi**

Strategi 1: Pemberian peran yang lebih besar pada skala usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi yang mampu mengangkat citra perekonomian kerakyatan.

Arah Kebijakan:

- a. Pembinaan ekonomi masyarakat yang berbasis kerakyatan dengan melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, melalui ekonomi produktif.
- b. Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
- c. Pengembangan potensi wilayah dan cluster ekonomi pedesaan baik pada daerah pesisir, sekitar hutan, dan pedalaman yang spesifik dan kompetitif serta mempunyai dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
- d. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan sarana ekonomi sesuai dengan karakteristik kebutuhan, sehingga mampu membuka akses terhadap aktivitas ekonomi.
- e. Peningkatan fasilitas pelayanan aktivitas usaha melalui penyederhanaan prosedur dan penyederhanaan sistem tata niaga.

Strategi 2: Pengembangan industri kecil, menengah dan koperasi sebagai basis pengembangan industri regional dan penyerapan tenaga kerja.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan sentra-sentra industri kecil dan desa kerajinan yang potensial untuk menghasilkan produk unggulan.
- b. Pengembangan kerjasama dengan industri terkait dan industri penunjang.
- c. Peningkatan akses pengusaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi terhadap modal, faktor produksi, informasi, teknologi dan pasar.

## 9. Pariwisata

Strategi 1: Penciptaan keterkaitan antar kepariwisataan secara nasional khususnya terhadap daerah yang memiliki status wisata unggulan bertaraf Nasional dan Internasional

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan keterkaitan antar semua perangkat di sektor kepariwisataan dalam lingkup Nasional.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi, serta Infrastruktur kepariwisataan
- c. Pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan termasuk kesenian.
- d. Pengembangan sumberdaya manusia bidang kepariwisataan.
- e. Pengembangan sistem paket wisata integratif dengan kepastian jadwal.
- f. Peningkatan komunikasi antar perangkat yang bergerak di bidang kepariwisataan.

Strategi 2: Peningkatan promosi wisata untuk menunjang terciptanya jaringan antar obyek wisata secara nasional.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan promosi wisata terpadu pada objek wisata unggulan dan objek wisata potensial.
- b. Peningkatan informasi tentang festival budaya pada berbagai promosi wisata dan berbagai pintu masuk wisata.
- c. Peningkatan komunikasi antarperangkat yang bergerak di bidang kepariwisataan khususnya yang menangani promosi wisata.

Strategi 3: Penetapan dan pengembangan objek dan atraksi wisata unggulan.

Arah Kebijakan:

- a. Penetapan obyek wisata yang memiliki nilai spesifik dan unik yang layak dikembangkan sebagai obyek wisata unggulan.
- b. Pengembangan atraksi wisata unggulan dan atraksi wisata potensial dengan pengadaan dan keikutsertaan pada event Nasional dan Internasional.

Strategi 4: Pengembangan kota pusat pelayanan wisata.

Arah Kebijakan:

- a. Penetapan dan pengembangan kota pusat pelayanan wisata.
- b. Peningkatan Infrastruktur menuju keterpaduan pelayanan pada kota pusat pelayanan wisata.

Strategi 5: Pengembangan Industri wisata.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan sumberdaya manusia pada keahlian bidang kesenian budaya dan kerajinan tangan.
- b. Peningkatan peran dan fungsi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan dan atraksi wisata.

Strategi 6: Pengembangan jalur wisata yang efisien dan menarik.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan jalur wisata unggulan.
- b. Pengadaan Infrastruktur pada daerah persinggahan jalur wisata pada wisata unggulan dan potensial.

**10. Pertambangan dan Migas**

**a) Pertambangan**

Strategi 1: Peningkatan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efisien dan efektif yang ramah lingkungan.

Arah Kebijakan:

- a. Pengendalian eksploitasi bahan tambang untuk menjaga cadangan dalam jangka panjang.
- b. Intensifikasi pengelolaan Batubara sebagai bahan utama energi.
- c. Percepatan penciutan KP disertai penawaran kepada koperasi-koperasi.
- d. Pengolahan sisa tambang menjadi briket batubara
- e. Reklamasi pasca tambang untuk kawasan budidaya maupun kawasan lindung.

Strategi 2: Peningkatan alternatif pengelolaan bahan tambang potensial.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan dan pengelolaan tambang emas untuk meningkatkan investasi daerah dengan menawarkan kepada koperasi-koperasi.
- b. Penataan dan penertiban bekas tambang supaya dapat ditambang lagi dengan kadar yang lebih rendah (reuse), sebagai langkah intensifikasi.

**b) Migas**

Strategi 1: Peningkatan kualitas pengelolaan bahan migas secara efisien dan efektif.

Arah Kebijakan:

- a. Pengendalian eksploitasi migas dalam upaya penghematan pemanfaatan migas dalam jangka panjang.
- b. Diversifikasi hasil pengolahan minyak bumi dan sumberdaya alam lainnya.
- c. Intensifikasi penggunaan gas bumi yang berorientasi penyerapan pangsa pasar.
- d. Pengolahan berbagai hasil eksploitasi migas untuk diversifikasi produk.
- e. Peningkatan nilai tambah migas melalui pengolahan dari hulu sampai hilir termasuk pemanfaatan sisa pengolahan minyak.

Strategi 2: Peningkatan pengelolaan bahan migas.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan migas dengan mengutamakan pada kawasan yang memiliki cadangan besar.
- b. Peningkatan kerjasama pengelolaan migas dengan mengutamakan PMDN.
- c. Pengembangan kawasan khusus dalam pengembangan migas.

Strategi 3: Pengembangan sumberdaya manusia dalam pengelolaan migas.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan pendidikan bidang migas bagi masyarakat Kalimantan Timur.
- b. Penguasaan teknologi bidang migas.
- c. Peningkatan kualitas SDM.

**C. Mewujudkan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat secara Merata dan Proporsional****1. Transportasi****a). Transportasi Darat**

Strategi 1: Pemerataan pelayanan transportasi darat antar wilayah maupun di dalam wilayah perkotaan dan perdesaan.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan aksesibilitas jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat aktifitas dan wilayah sekitarnya terutama dengan kawasan pedalaman dan perbatasan.
- b. Peningkatan tingkat pelayanan dan pemeliharaan jalan.
- c. Peningkatan kelas jalan utama yang menghubungkan dalam dan luar wilayah serta pada pusat-pusat aktivitas yang memenuhi persyaratan untuk dilalui kendaraan berat.

Strategi 2: Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana ASDP untuk menunjang pergerakan intermoda.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan prasarana dermaga sungai di daerah yang mempunyai angkutan perjalanan tinggi.
- b. Peningkatan keterkaitan transportasi intermoda yang berhubungan antara daratan yang terpisah oleh sungai dan antar pulau dengan dukungan transportasi sungai.
- c. Penyediaan sarana transportasi yang memadai untuk angkutan yang mendukung komoditas unggulan.
- d. Pembangunan dermaga penyeberangan antar negara.

Strategi 3: Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung terhadap pembentukan kawasan strategis daerah sehingga terjadi keterpaduan yang saling mendukung.

Arah Kebijakan:

- a. Pembangunan jalan baru yang mengarah pada akses ke kawasan strategis daerah.
- b. Pembangunan jalan bebas hambatan/toll sebagai penghubung kota-kota utama dan pusat perekonomian wilayah.
- c. Peningkatan aksesibilitas transportasi darat yang mendukung terhadap distribusi barang dan jasa.
- d. Peningkatan kualitas jalan pada kawasan pedalaman dan perbatasan.
- e. Peningkatan keterpaduan koneksitas sistem jaringan transportasi intermoda yang mampu menghubungkan keterkaitan antara darat, laut dan udara.

#### **b). Transportasi Laut**

Strategi 1: Penguatan jaringan intermoda yang berfungsi sebagai penghubung dan pemersatu antar moda transport.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kualitas pelabuhan laut melalui peningkatan kapasitas layanan dan mutu layanan.
- b. Peningkatan keselamatan pelayaran.
- c. Peningkatan keterkaitan yang terpadu antar daratan dan kepulauan dengan berbagai moda transportasi.

Strategi 2: Peningkatan peran transportasi laut dalam menopang kegiatan perekonomian (ekspor - impor).

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan spesifikasi sarana pengangkut (kapal) dalam mendukung kegiatan ekspor impor.

- b. Peningkatan kemampuan berupa pelabuhan laut sehingga mampu melayani dan berfungsi sebagai pelabuhan internasional yang bergerak dalam bidang ekspor - impor.
- c. Pengembangan sarana pendukung yang terkait dengan sistem jaringan transportasi laut yang melalui jalur perairan di kawasan Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Pengembangan pelabuhan khusus penunjang ekonomi unggulan atau kawasan tertentu.

**c). Transportasi Udara**

Strategi 1: Peningkatan kualitas sistem transportasi udara untuk keperluan pergerakan internasional, nasional, maupun pergerakan lokal.

Arah Kebijakan:

- a. Pemantapan sistem hirarki jaringan transportasi udara sesuai dengan tingkat kebutuhan dan rencana pengembangan yang mendukung terhadap tingkat cakupan pergerakan dan wilayah pelayanan.
- b. Peningkatan kapasitas pelayanan transportasi udara pada kawasan yang tingkat aktivitasnya tinggi.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana bandara yang memadai sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada.
- d. Peningkatan keselamatan penerbangan.

Strategi 2: Peningkatan pelayanan bandara perintis menjadi lebih tinggi lagi sehingga aksesibilitas dapat terjangkau.

Arah Kebijakan:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana bandara perintis yang memadai sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada.
- b. Peningkatan bandara perintis menjadi bandara yang mempunyai tingkat layanan dan jangkauan yang lebih tinggi lagi sesuai dengan rencana pengembangan wilayah.

**2. Pengairan**

Strategi 1: Pengembangan jaringan irigasi/pengairan untuk melayani perluasan areal sawah.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kelayakan dan rehabilitasi jaringan irigasi/pengairan dan bendung/bendungan.
- b. Pengembangan embung pada lokasi strategis.
- c. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan tambak.
- d. Pencetakan sawah baru pada lokasi potensial.

Strategi 2: Pengembangan jaringan daerah rawa.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan dan pembangunan jaringan tata air daerah rawa.
- b. Pembangunan dan pengelolaan irigasi, rawa, dan tambak.

Strategi 3: Penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kelayakan dan rehabilitasi bendung/embung pengendali banjir.
- b. Pengembangan bendung/embung pada lokasi yang strategis.
- c. Pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir.

Strategi 4: Pengembangan sumber air baku (penyediaan air baku untuk air bersih).

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kelayakan dan rehabilitasi bendung/embung. Sebagai sumber air baku.
- b. Pengembangan dan pengelolaan bendung/embung sebagai sumber air baku.

Strategi 5: Konservasi sumberdaya air.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui GNKPA (Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air).
- b. Peningkatan pengamanan pantai dan sungai.

### 3. Energi Listrik

Strategi 1: Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang melalui rehabilitasi, repowering pembangkit yang ada dan pembangkit baru serta pengembangan diversifikasi energi dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang sudah beroperasi sehingga mampu mendukung pasokan listrik pada beban puncak.
- b. Penyediaan pembangkit listrik dengan jenis PLTD untuk penyediaan jangka pendek, maupun melalui penyediaan mikro hidro dan mini hidro.
- c. Penyediaan pembangkit listrik non-BBM yang masuk ke dalam sistem layanan di wilayah Kalimantan Timur, seperti PLTN, PLTU, PLTA, panas bumi, tenaga angin atau yang sejenis yang berorientasi pada penyediaan jangka panjang.
- d. Penyediaan listrik pedesaan berupa PLTS atau pembangkit listrik tenaga air yang lebih sesuai sebagai upaya pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah.
- e. Peningkatan kerjasama antar pelaku kelistrikan.

Strategi 2: Peningkatan kualitas layanan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan dengan melakukan manajemen sumber daya listrik yang berwawasan lingkungan.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan pengawasan dan pemahaman terhadap penggunaan listrik di masyarakat.
- b. Peningkatan efisiensi dengan cara penekanan terjadinya losses tenaga listrik.
- c. Pengembangan interkoneksi sistem jaringan tenaga listrik dalam rangka untuk penyediaan sumber daya listrik yang aman terutama pada kondisi jam puncak.
- d. Penyediaan pembangkit listrik pada kawasan baru.

## D. Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum

### 1. Politik dan Pemerintahan

Strategi 1: Peningkatan pembangunan aparatur daerah.

Arah Kebijakan:

- a. Reformasi birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai kompetensi.
- c. Pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam bentuk *e-government*, *e-procurement*, *e-business* dan *cyber law* untuk pelayanan publik yang prima.
- d. Perbaiki sistem rekrutmen.
- e. Pengembangan sistem pengawasan serta peningkatan intensitas dan efektifitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
- f. Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja.
- g. Pemerataan pendistribusian pegawai di daerah terpencil dan pedalaman.

Strategi 2: Peningkatan efisiensi organisasi perangkat daerah, susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis.

Arah Kebijakan:

- a. Penyederhanaan struktur organisasi pemerintahan.
- b. Peningkatan kapasitas kebijakan publik yang proporsional berbasis *good governance* dengan melibatkan dunia swasta dan partisipasi masyarakat melalui pembuatan Perda inisiatif yang dihasilkan DPRD.

Strategi 3: Peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai serta upaya pemerataan pegawai di daerah terpencil dan pedalaman.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan pendidikan dan pelatihan pegawai.

- b. Pengembangan institusi dan peningkatan komitmen pimpinan birokrasi dalam mendukung peningkatan kualitas pegawai.
- c. Pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan (e-government) sampai di tingkat kecamatan dan desa.
- d. Peningkatan keterpaduan pengelolaan pembangunan daerah.
- e. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi segenap aparatur pemerintah.
- f. Melaksanakan pengembangan sistem pengawasan.

Strategi 4: Peningkatan kerjasama dan penyeragaman naskah kerjasama serta penyediaan badan kerjasama untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kerjasama baik antar pemerintah dengan swasta maupun masyarakat guna meningkatkan kinerja pelayanan publik.
- b. Pembentukan badan kerjasama dan penyeragaman naskah kerjasama.
- c. Peningkatan anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja.
- d. Standarisasi akuntabilitas anggaran publik dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- e. Peningkatan koordinasi lintas sektoral ditunjang dengan regulasi yang memadai guna memantapkan program-program pembangunan.

## 2. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Strategi 1: Pengembangan sistem politik yang demokratis yang ditopang dengan kemandirian infrastruktur politik agar mantapnya interaksi politik antara infrastruktur dan suprastruktur, stabilitas politik serta sosial budaya dalam wilayah NKRI.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan struktur politik yang demokratis di daerah.
- b. Pengembangan etika, moral dan budaya politik yang demokratis.
- c. Peningkatan kualitas integrasi sosial budaya melalui peningkatan kelembagaan sosial budaya, perbaikan perilaku yang menyimpang dan pengembangan sumberdaya pranata sosial.

Strategi 2: Fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional mandiri, independen dan non partisan.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan sistem dan mekanisme pemilu yang demokratis langsung.
- b. Peningkatan kemandirian Orpol, Ormas dan LSM.
- c. Percepatan pengembangan pendidikan politik.

Strategi 3: Pemantapan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara serta mendewasakan sikap dan perilaku demokrasi masyarakat yang dilandasi oleh mantapnya pemahaman dan pengamalan etika dan moral Pancasila.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan dan penguatan ketahanan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan.
- b. Peningkatan pemahaman dan pengembangan konsep, metode dan materi sosial wawasan kebangsaan.
- c. Pengembangan sistem, metode dan materi serta peningkatan kewaspadaan.

Strategi 4: Pemantapan pembauran bangsa di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan upaya pembauran bangsa dalam mewujudkan integrasi.
- b. Peningkatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

Strategi 5: Peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan bangsa terhadap berbagai ancaman dan gangguan, hambatan dan tantangan atas kehidupan berbangsa dan bernegara serta meningkatkan kesadaran bela negara segenap warga masyarakat.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kesadaran dan kemampuan bela negara dalam rangka ketahanan bangsa.
- b. Pengembangan pendidikan, kemampuan bela negara dalam rangka ketahanan bangsa dan berwawasan nusantara.

Strategi 6: Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi ancaman bahaya bencana.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan sistem perlindungan masyarakat/pertahanan sipil dalam rangka Sishankamrata.
- b. Penyusunan sistem informasi dan kesiapsiagaan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat.

Strategi 7: Peningkatan kapasitas aparaturnya Kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kapasitas aparaturnya kesbangpol.
- b. Pengembangan pendidikan dan pelatihan aparaturnya kesbangpol.

### 3. Hukum

Strategi 1: Peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana hukum khususnya di wilayah perbatasan dan daerah rawan lainnya.

Arah Kebijakan :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana hukum di wilayah kabupaten/kota yang belum terdapat Kodim dan Polres/ta dan di wilayah kecamatan yang belum terdapat Koramil dan Polsek.
- b. Peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana hukum khususnya di wilayah perbatasan dan daerah rawan lainnya.

Strategi 2: Peningkatan kuantitas dan kualitas organisasi perangkat hukum serta pengembangan struktur organisasi setingkat Muspida di wilayah kabupaten/kota dan Muspika di wilayah kecamatan.

Arah Kebijakan :

- a. Penjaminan terhadap kepastian, keadilan dan penegakan hukum serta meningkatkan stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum.
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas jumlah aparat hukum di wilayah perbatasan dan daerah rawan lainnya, termasuk peningkatan pembinaan melalui diklat aparat.

Strategi 3: Peningkatan kuantitas dan kualitas aparat hukum melalui pembinaan dan pendidikan serta latihan aparat hukum.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas kinerja aparat hukum dalam merealisasikan pembentukan badan kerjasama guna menekan angka kriminalitas.
- b. Penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan bagi aparat hukum.

Strategi 4: Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral guna meningkatkan kualitas kinerja aparat hukum guna memfasilitasi penyediaan regulasi dan pembentukan badan kerjasama atau forum-forum penegakan hukum.

Arah Kebijakan:

- a. Pembentukan forum koordinasi dan komunitas secara terpadu antar organisasi perangkat hukum dengan organisasi kekuatan sosial politik di masyarakat agar terjadi penanganan secara cepat dalam rangka penegakan hukum guna menangkal potensi gangguan kamtibmas di masa yang akan datang.

Strategi 5: Peningkatan pembangunan hukum yang diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait KKN.

Arah Kebijakan :

- a. Pembaharuan materi hukum dengan tetap memperhatikan mengemukakan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya peningkatan

kepastian perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum serta pelayanan hukum yang adil dan benar.

- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- c. Pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi serta monitoring dan evaluasi.

Strategi 6: Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi dan keterlibatan relawan dalam menjamin kepastian, keadilan dan penegakan hukum.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan hukum, pelaksanaan hukum, serta monitoring, evaluasi, dan penanganan sengketa hukum dalam menjamin kepastian, keadilan dan penegakan hukum.
- b. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program-program penyuluhan kesadaran hukum.

Strategi 7: Peningkatan kapasitas aparat hukum dalam menjamin kepastian, keadilan dan penegakan hukum.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kapasitas dalam menindak setiap perkara kejahatan, baik pidana maupun perdana secara adil, transparan dan akuntabel.
- b. Penuntasan penanganan kasus-kasus menonjol seperti narkoba, illegal logging, illegal worker, illegal fishing dan trafficking.
- c. Pengembangan pos pemantau terpadu di setiap daerah rawan tindak kejahatan.

Strategi 8: Peningkatan kuantitas & kualitas kebijakan hukum (Perda inisiatif DPRD).

Arah Kebijakan:

- a. Perumusan Perda Inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD, sebagai indikator peningkatan kualitas lembaga legislatif dalam proses kebijakan publik di daerah.
- b. Perumusan intervensi kebijakan khusus yang dibuat dengan tujuan peningkatan kesejahteraan aparat hukum di pelosok dan daerah perbatasan.

#### 4. Komunikasi dan Informasi

Strategi 1: Penambahan jam tayang bagi televisi Jakarta dan peningkatan kuantitas serta kualitas televisi lokal, website, wartel dan warnet guna meningkatkan kinerja pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Arah Kebijakan:

- a. Penambahan jam tayang televisi nasional.
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas televisi lokal di Kalimantan Timur baik milik pemerintah maupun swasta.
- c. Peningkatan kuantitas dan kualitas media internet (Website).
- d. Peningkatan kuantitas dan kualitas warung telekomunikasi (Wartel).
- e. Peningkatan kuantitas dan kualitas media warung internet (Warnet).

Strategi 2: Peningkatan kuantitas dan kualitas radio, satuan sambungan terpasang (SST), maupun telepon seluler.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas radio milik pemerintah maupun swasta
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana telekomunikasi reguler berdasarkan satuan sambungan terpasang (SST).
- c. Peningkatan kuantitas dan kualitas telepon Seluler.

Strategi 3: Peningkatan kuantitas dan kualitas media harian, media mingguan, media tabloid maupun media majalah guna meningkatkan kinerja pelayanan publik yang transparan dan akuntabel di Provinsi Kalimantan Timur.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas media harian.
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas media mingguan.
- c. Peningkatan kuantitas dan kualitas media tabloid.
- d. Peningkatan kuantitas dan kualitas media majalah.

Strategi 4: Pengembangan informasi pembangunan ke segenap wilayah.

Arah Kebijakan:

- a. Pembangunan masyarakat berbudaya informasi.
- b. Peningkatan jangkauan pelayanan informasi
- c. Pengembangan sumberdaya manusia bidang informasi.

## **E. Mewujudkan Pembangunan yang Terpadu dan Serasi dengan Pendekatan Pengembangan Wilayah Berbasis Ekonomi dan Ekologi.**

### **1. Penataan Ruang dan Kawasan Perbatasan.**

#### **a) Penataan Ruang.**

Strategi 1: Pengembangan struktur ruang sesuai RTRW.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan struktur ruang yang menuju pada pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan melalui sistem kota-kota dan sistem interaksi desa-kota yang optimal.
- b. Percepatan pemerataan antarwilayah dengan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana terutama pada daerah yang diprioritaskan.
- c. Peningkatan pertumbuhan wilayah secara adil dan merata dengan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang baru.
- d. Pengembangan kawasan strategis skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota berupa kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan sentra produksi.

- e. Percepatan pembangunan kawasan pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil.
- f. Penyediaan infrastruktur dalam mendukung struktur ruang wilayah sesuai rencana tata ruang wilayah.
- g. Penataan ruang melalui kegiatan: perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan partisipatif.

Strategi 2: Peningkatan interaksi pemasaran kota kecil sampai dengan kota besar.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kegiatan ekonomi dan tingkat investasi pada daerah tertinggal.
- b. Menciptakan pusat pemasaran di bagian utara Kalimantan Timur.
- c. Pengembangan transportasi antar wilayah yang mendukung sektor prioritas atau unggulan.

Strategi 3: Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sosial ekonomi dalam mengembangkan kawasan strategis.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan pelayanan aksesibilitas pada pusat kegiatan khususnya kawasan strategis.
- b. Pengintegrasian berbagai program pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan tujuan pembangunan berbasis tata ruang wilayah.
- c. Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mendukung pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi khusus.

Strategi 4: Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan fungsi kawasan dalam menopang daya dukung lingkungan dalam jangka panjang.

Arah Kebijakan:

- a. Penetapan dan pengembalian fungsi kawasan lindung sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- b. Pengendalian fungsi kawasan lindung sesuai dengan jenis peruntukan yang telah ditetapkan.
- c. Pengendalian dan pengelolaan kawasan sesuai fungsi ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- d. Pemanfaatan ruang wilayah sesuai rencana tata ruang wilayah dengan tetap mendukung keseimbangan ekologis.

**b) Kawasan Perbatasan.**

Strategi 1: Percepatan pembangunan kawasan perbatasan sebagai kawasan andalan yang mandiri dan pusat kegiatan ekonomi.

Arah Kebijakan:

- a. Percepatan penetapan tata batas provinsi dan negara serta mengurangi konflik dengan negara tetangga.
- b. Pengamanan dan pemanfaatan wilayah perbatasan (termasuk pulau terluar) untuk kepentingan ekonomi dan penetapan batas wilayah negara.
- c. Peningkatan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan.
- d. Peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan agar lebih berdaya saing.
- e. Peningkatan kerjasama sub-regional dalam rangka peningkatan keamanan dalam negeri dan peningkatan investasi.
- f. Peningkatan kawasan perbatasan sebagai halaman depan Negara/Daerah.

Strategi 2: Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana permukiman pada kawasan perbatasan.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan pelayanan sosial dibidang pendidikan dan kesehatan yang memadai dan setara dengan negara tetangga.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi daerah perbatasan baik jalur darat, laut maupun udara.

Strategi 3: Peningkatan upaya pembinaan politik untuk meningkatkan nasionalisme dan rasa kebangsaan pada kawasan perbatasan.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kesadaran kebangsaan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
- b. Pengembangan pendidikan berwawasan nusantara.

**2. Perumahan dan Pemukiman.**

Strategi 1: Pembangunan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan masyarakat, pemerataan kebutuhan hunian bagi masyarakat serta mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh dengan melibatkan peran serta swasta.

Arah Kebijakan:

- a. Pembinaan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman yang sesuai dengan kondisi lingkungan, disertai penyediaan infrastruktur dasar yang memadai.
- b. Pemenuhan perumahan dan permukiman sesuai tingkat kemampuan pendapatan masyarakat.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di perumahan dan pemukiman.
- d. Penataan dan revitalisasi kawasan pemukiman kumuh.

### 3. Permukiman Transmigrasi.

Strategi 1: Penyediaan hunian yang layak huni untuk transmigran.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan perumahan dan tanah untuk usaha yang memadai bagi transmigran.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman dan kegiatan usaha masyarakat.
- c. Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.

Strategi 2: Peningkatan Kegiatan usaha yang bernilai ekonomis tinggi.

Arah kebijakan:

- a. Penyediaan lahan untuk pembangunan kawasan transmigrasi sesuai standar minimum.
- b. Pemilihan komoditas yang memiliki ekonomi tinggi.
- c. Pengembangan investasi berbasis agroindustri dan agrobisnis.

Strategi 3: Pembentukan permukiman transmigran yang mandiri.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan hubungan antar permukiman transmigrasi dengan pusat pemasaran.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi yang mendukung pembentukan hubungan antar pusat permukiman.
- c. Pengembangan usaha - usaha baru di masyarakat lokal.

### 4. Lingkungan Hidup.

Strategi 1: Pengembangan kerangka dasar pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia khususnya dalam rangka penanganan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan stakeholder lainnya.
- c. Penetapan perangkat hukum dalam penegakan lingkungan hidup.
- d. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati beserta habitatnya, fauna dan flora spesifik yang ada.

Strategi 2: Pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan kelestarian lingkungan.

Arah Kebijakan:

- a. Perlindungan terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, terutama untuk melindungi hewan dan tanaman langka.

- b. Peningkatan inventarisasi, penelitian, pendataan dan pengembangan informasi bidang lingkungan hidup.
- c. Peningkatan pelayanan dan pengawasan pada lokasi kegiatan pembangunan yang rawan perubahan rona lingkungan alam.
- d. Penataan area bekas penambangan dan penebangan hutan atau perubahan lainnya yang berpotensi merusak alam menjadi lebih bernilai tambah.
- e. Pelaksanaan sanksi atau hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku perusakan hutan.
- f. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan dalam skala luas.
- g. Penerapan insentif warga yang membantu pelaksanaan hukum (pelapor) serta jaminan perlindungan hukumnya.

Strategi 3: Pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana alam.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana.
- b. Pengendalian wilayah hulu sungai sesuai dengan fungsi kawasan.
- c. Pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dan perdesaan.
- e. Peningkatan upaya resapan air ke dalam tanah.
- f. Perlindungan ekosistem yang memiliki fungsi lindung dan resapan air.
- g. Pengelolaan pengendalian banjir dan pengamanan kawasan pantai.



## BAB V

# SKENARIO DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Dengan memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, maka perlu disusun suatu skenario pembangunan jangka panjang daerah yang memuat skenario pembangunan wilayah sesuai tata ruang wilayah dan skenario pembangunan ekonomi makro daerah sesuai perubahan struktur ekonomi daerah. Selain itu, tahapan pembangunan lima tahunan disusun untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah dalam 20 tahun ke depan.

### A. Skenario Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

#### 1. Skenario Pembangunan Wilayah.

Skenario pembangunan wilayah diperlukan untuk memberikan acuan bagi penataan ruang; pemerataan pembangunan antarkabupaten/kota; pertumbuhan seimbang antara kota besar, menengah dan kecil; pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan strategis; serta percepatan kemajuan daerah perdesaan, daerah pedalaman tertinggal dan daerah perbatasan.

##### a. Penataan Ruang.

Penetapan fungsi dan peran setiap kabupaten/kota ditentukan oleh beberapa kriteria, yaitu: (1) jangkauan transportasi utama termasuk pelabuhan, terminal, dan bandar udara yang dapat mendukung mobilitas sumberdaya dan komoditas; (2) potensi utama dan potensi penunjang daerah termasuk sumber daya alam dan prasarana; (3) kesesuaian tatanan lingkungan termasuk daerah aliran sungai, hulu-hilir, dan satuan wilayah sungai (SWS); (4) keunggulan komparatif setiap daerah; dan (5) keterkaitan antar daerah.

Berdasarkan potensi dasar, potensi penunjang, kendala, serta dengan pertimbangan utama kebutuhan pengembangan wilayah dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah, maka arah pengembangan wilayah setiap kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- (1) Kabupaten Paser diarahkan menjadi wilayah pengembangan pertanian atau agribisnis berbasis perkebunan, peternakan dan perikanan; pengembangan transportasi darat dan terminal laut yang dapat meningkatkan aksesibilitas ke wilayah Kalimantan Selatan, Kota Balikpapan, dan Kalimantan Tengah; wilayah pengembangan perdagangan dan jasa, pendidikan dan kesehatan yang dapat mengimbangi wilayah sekitarnya; wilayah industri pengolahan, dan wilayah pertambangan.
- (2) Kabupaten Kutai Barat diarahkan menjadi wilayah pengembangan pertanian ke arah agribisnis berbasis kehutanan, perkebunan dan pertanian; pusat pengembangan transportasi darat yang dapat meningkatkan aksesibilitas dengan wilayah sekitarnya; pusat pengembangan perdagangan dan jasa, pendidikan (tinggi) dan kesehatan di perkotaan; pusat Industri kecil; pusat pertambangan; pengembangan wilayah perbatasan; dan pelestarian lingkungan hidup.

- (3) Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menjadi wilayah pengembangan pertanian ke arah agribisnis berbasis perkebunan, kehutanan, dan perikanan; pengembangan transportasi darat, sungai dan laut yang dapat meningkatkan aksesibilitas dengan wilayah Kota Samarinda dan Kota Balikpapan dan pusat-pusat pertumbuhan; pengembangan transportasi udara, sungai dan laut khususnya penerbangan perintis yang menghubungkan wilayah terpencil dan terisolir yang pada masa akan datang akan dijadikan wilayah-wilayah pertumbuhan baru; pengembangan industri pengolahan; penanganan kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan; kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET); pengembangan ekonomi kawasan hulu; Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang (KAKAMBANGAN).
- (4) Kabupaten Kutai Timur diarahkan menjadi wilayah pengembangan pertanian atau agribisnis berbasis kehutanan, perkebunan dan pertanian, perikanan; pengembangan transportasi darat yang dapat meningkatkan aksesibilitas dengan wilayah sekitarnya terutama menuju Bontang, Tanjung Redeb, dan Muara Wahau; pengembangan perdagangan dan jasa; industri pengolahan; dan pertambangan.
- (5) Kabupaten Berau diarahkan menjadi wilayah pengembangan pertanian agribisnis berbasis kehutanan, perkebunan dan pertanian, perikanan; pengembangan transportasi darat yang dapat meningkatkan aksesibilitas dengan wilayah sekitarnya terutama menuju Tanjung Selor, Kutai Timur dan Samarinda; pelabuhan penyeberangan yang dapat meningkatkan pelayanan transportasi ASDP; peningkatan transportasi udara; pengembangan perdagangan dan jasa; industri pengolahan; pengembangan pariwisata bahari; dan pertambangan.
- (6) Kabupaten Malinau diarahkan menjadi wilayah pengembangan pertanian ke arah agribisnis berbasis kehutanan, perkebunan dan pertanian, perikanan dan peternakan; pengembangan/peningkatan transportasi yang dapat meningkatkan aksesibilitas dengan wilayah sekitarnya terutama menuju Tarakan, Bulungan, Nunukan dan Kutai Barat; pelabuhan penyeberangan yang dapat meningkatkan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP); peningkatan transportasi udara; pengembangan perdagangan dan jasa; industri pengolahan; pengembangan pertambangan; pengembangan pariwisata; pengembangan kawasan perbatasan; pengembangan hutan konservasi; pengembangan SDM ke arah yang lebih kompetitif.
- (7) Kabupaten Bulungan diarahkan menjadi wilayah pengembangan pertanian agribisnis berbasis kehutanan, perkebunan dan pertanian, perikanan; Pengembangan transportasi, yang dapat meningkatkan aksesibilitas ke seluruh wilayah bagian utara; peningkatan transportasi udara; peningkatan transportasi laut dengan pemanfaatan kawasan pesisir; pengembangan perdagangan dan jasa; industri pengolahan; pengembangan pariwisata; dan pertambangan.
- (8) Kabupaten Nunukan diarahkan menjadi pusat agribisnis berbasis kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan; pusat pengembangan transportasi udara yang dapat meningkatkan aksesibilitas dengan wilayah sekitarnya; perbaikan kualitas SDM dan penambahan jumlah dan penyebaran SDM yang

proporsional berdasarkan tingkat kebutuhan dan potensi sumberdaya wilayah; penguatan modal dan kemudahan akses dana pada masyarakat yang bergerak pada sektor produksi dan terutama UKM; pelabuhan penyeberangan yang dapat meningkatkan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP); akses transportasi darat dan laut yang menghubungkan Pulau Nunukan dengan Pulau Kalimantan; pengembangan perdagangan dan jasa; industri pengolahan; pertambangan migas; pengembangan pariwisata; dan perdagangan jasa dan industri melalui pengelolaan kawasan khusus.

- (9) Kabupaten Penajam Paser Utara diarahkan menjadi wilayah pengembangan pertanian agribisnis berbasis perkebunan dan perikanan dan peternakan, agropolitan; pengembangan agropolitan transportasi darat dan terminal laut yang dapat meningkatkan aksesibilitas dengan wilayah Kalimantan Selatan, Balikpapan dan Melak; pengembangan perdagangan dan jasa di perkotaan yang dapat menjadi penyangga Kota Balikpapan dan daerah sekitarnya, serta pengembangan wisata bahari.
- (10) Kabupaten Tana Tidung diarahkan menjadi wilayah agroindustri dan agrobisnis tanaman pangan dan perkebunan; pertambangan; dan pengembangan kawasan transmigrasi yang didukung dengan tersedianya prasarana dan sarana transportasi darat dan laut secara maksimal.
- (11) Kota Balikpapan diarahkan menjadi wilayah perdagangan dan jasa; industri; pengembangan transportasi udara internasional, nasional, dan lokal; pengembangan pelabuhan laut; pendidikan, kesehatan; pengembangan pariwisata; dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET)
- (12) Kota Samarinda diarahkan menjadi wilayah pusat pemerintahan; perdagangan dan jasa; industri; pengembangan transportasi yang dapat meningkatkan aksesibilitas dengan wilayah sekitarnya terutama menuju Balikpapan serta kota-kota lain yang mempunyai interaksi tinggi; pelabuhan penyeberangan yang dapat meningkatkan pelayanan transportasi ASDP; pendidikan, olahraga, kesehatan; pengembangan pariwisata; dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET).
- (13) Kota Tarakan diarahkan menjadi wilayah pelayanan umum pemerintahan; perdagangan dan jasa; industri; pengembangan transportasi udara nasional, dan lokal; pengembangan pelabuhan laut; pendidikan, kesehatan; pengembangan ekonomi, perlindungan sosial serta ketertiban dan keamanan; pengembangan pariwisata dan budaya.
- (14) Kota Bontang diarahkan menjadi wilayah industri kimia dan industri pengolahan hasil pertanian; pertambangan migas; pengembangan sistem transportasi laut sebagai outlet tengah wilayah Kalimantan Timur; pengembangan transportasi darat yang dapat meningkatkan aksesibilitas dengan wilayah sekitarnya terutama Samarinda dan Sangatta; pendidikan, kesehatan; pengembangan pariwisata; pertambangan migas; pengembangan sektor perikanan.

**b. Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan.**

Pengembangan kawasan perbatasan di Kalimantan Timur memiliki nilai strategis baik dari segi ekonomi, politik maupun kedaulatan negara RI. Pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mempercepat kemajuan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat nasionalisme dan rasa kebangsaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal, perbaikan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, dan listrik; serta penyediaan prasarana dan sarana transportasi untuk menghubungkan kawasan perbatasan dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah maupun dengan negara tetangga Malaysia; serta memperluas jaringan pemasaran.

Selain itu, pengembangan kawasan perbatasan diarahkan pada penguatan kerjasama dengan Malaysia untuk meningkatkan keamanan dalam negeri dan membuka investasi. Berbagai upaya tersebut didukung oleh perangkat hukum yang bersifat mengikat.

**c. Pemekaran Wilayah.**

Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan hampir satu setengah kali luas Pulau Jawa dan Madura dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, distribusi penduduk yang terpusat di daerah perkotaan, dan perkembangan pembangunan yang timpang antar kabupaten/kota.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempercepat kemajuan dan kemandirian daerah pedalaman dan tertinggal, memperkuat daerah perbatasan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu adanya peluang bagi pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Upaya ini didukung dengan peningkatan mutu dan optimalisasi kinerja aparat dan organisasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan berbasis keseimbangan wilayah.

**2. Skenario Pembangunan Ekonomi.**

Pengembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri pengolahan sebagai sektor unggulan yang mengandalkan kemampuan sumber daya manusia; penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui; pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi, pengolahan, informasi dan transportasi; penguatan keterkaitan mata rantai industri hulu-hilir dalam satu kesatuan struktur ekonomi yang mapan; serta pemanfaatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang menghasilkan produksi bersih dan berkelanjutan.

**Tabel 1**  
**Perkiraan Struktur Ekonomi**  
**Kalimantan Timur Tahun 2005-2025**

NO	LAPANGAN USAHA	2001	2005	2010	2015	2020	2025
	<b>Kelompok Sektor Primer</b>	<b>32.42</b>	<b>32.72</b>	<b>33.29</b>	<b>33.47</b>	<b>33.63</b>	<b>33.73</b>
1	Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan	6.64	6.75	12.55	16.40	18.34	21.30
2	Pertambangan dan Penggalian	25.78	25.96	20.74	17.06	15.29	12.43
	<b>Kelompok Sektor Sekunder</b>	<b>41.72</b>	<b>39.28</b>	<b>39.88</b>	<b>39.60</b>	<b>39.58</b>	<b>39.57</b>
3	Industri Pengolahan	35.14	32.66	33.43	33.28	33.31	33.34
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.19	0.25	0.27	0.28	0.28	0.29
5	Bangunan	6.38	6.37	6.18	6.04	5.98	5.95
	<b>Kelompok Sektor Tersier</b>	<b>10.52</b>	<b>11.17</b>	<b>10.05</b>	<b>10.24</b>	<b>10.09</b>	<b>9.98</b>
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	5.61	5.56	5.42	5.31	5.26	5.23
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2.93	3.19	2.71	2.50	2.38	2.30
8	Keuangan, Persewaan dan	0.30	0.33	0.26	0.24	0.22	0.21
9	Jasa-Jasa	1.67	2.09	1.66	2.20	2.23	2.24

Berbagai hal yang diperlukan untuk perubahan struktur ekonomi adalah peningkatan iklim investasi daerah, kepastian hukum, peningkatan partisipasi dan berbagai deregulasi. Selain itu, perlu didukung dengan peningkatan prasarana dan sarana secara memadai terutama transportasi darat, laut dan udara; serta penyediaan energi listrik yang dapat memasok kebutuhan pengembangan perkotaan, perdesaan, dan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

#### a. Pengembangan Sektor Unggulan.

Pengembangan sektor unggulan Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian yang dikelola secara profesional berdasarkan manajemen agribisnis. Sektor unggulan yang akan dikembangkan antara lain adalah pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan darat dan laut.

Selain itu, pengembangan sektor unggulan juga diarahkan pada peningkatan dan penguatan industri pengolahan melalui pengembangan kawasan industri terpadu yang menghasilkan komoditas unggulan melalui peningkatan mutu sumber daya manusia, pengembangan pusat-pusat penelitian dan pengembangan yang canggih, pembangunan infrastruktur pendukung, pengadaan prasarana dan sarana, penguatan jaringan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi, dan penguatan pelaku usaha dalam bentuk kemitraan usaha

##### 1). Penguatan Keunggulan Komparatif.

Pengembangan kehutanan, pertambangan dan minyak, dan gas diarahkan untuk tetap dipertahankan sebagai keunggulan komparatif Provinsi Kalimantan Timur. Pengembangan kehutanan diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor unggulan dengan tetap memperhatikan kawasan fungsional hutan, mempertahankan daya dukung lingkungan, menjaga kualitas lingkungan secara global, serta menjamin pengelolaan hutan secara

lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan hutan juga dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum secara konsisten bagi pelaku perusakan hutan dan pengguna hasil hutan secara ilegal, rehabilitasi dan konservasi hutan, percepatan pemulihan lahan dan daerah aliran sungai (DAS) yang kritis.

Pengelolaan pertambangan dan migas diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efisien dan efektif yang ramah lingkungan, pembatasan kawasan penambangan secara bertahap, pengolahan sisa tambang dan reklamasi area bekas penambangan agar memiliki nilai guna dalam jangka panjang.

## 2). **Peningkatan Mutu Sumberdaya Manusia.**

Peningkatan mutu sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan dan penguatan keunggulan komparatif diarahkan pada peningkatan semangat kewirausahaan (*entrepreneurship*), keterampilan, produktivitas, etos kerja dan budaya kerja melalui pendidikan baik secara formal, non formal maupun informal; pengembangan pendidikan unggulan dan kejuruan di setiap kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi wilayah; serta peningkatan kompetensi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang rekayasa genetika, produksi, informasi, dan telekomunikasi.

## 3). **Pembangunan Infrastruktur dan Penyediaan Energi Listrik.**

Pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, pengairan dan irigasi, telekomunikasi diarahkan pada penyediaan layanan pengangkutan barang dan jasa baik melalui darat, laut, sungai dan penyeberangan secara lebih cepat, mudah, murah dan terpadu; penyediaan sumber air bersih dan sehat; penguatan jaringan layanan pemasaran untuk mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan dan penguatan keunggulan komparatif Provinsi Kalimantan Timur.

Penyediaan energi listrik diarahkan pada pembangunan pusat-pusat pembangkit listrik, pengembangan sumber energi listrik alternatif, peningkatan efisiensi dalam manajemen sumber daya listrik, dan perluasan jaringan terpasang untuk mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan, peningkatan produktivitas masyarakat, peningkatan dunia usaha, dan pengembangan berbagai kegiatan berbasis teknologi yang memerlukan pasokan listrik secara memadai.

## 4). **Pengelolaan Keuangan dan Investasi Daerah.**

Pengelolaan keuangan dan investasi daerah diarahkan pada pemberian dukungan pendanaan bagi pengembangan sektor-sektor unggulan, penguatan keunggulan komparatif, peningkatan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi listrik melalui pengelolaan anggaran daerah secara cermat, efisien dan efektif; penataan manajemen badan usaha milik daerah (BUMD); mobilisasi sumber dana masyarakat melalui penerbitan surat berharga daerah; serta peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta. Selain itu, pengelolaan keuangan dan investasi daerah tetap diarahkan pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan percepatan kemajuan dan kemandirian daerah.

#### 5). **Penjaminan Kepastian Hukum.**

Penjaminan kepastian hukum diarahkan untuk mendorong pengelolaan keuangan dan investasi daerah ini melalui pemberian jaminan kepastian hukum dalam perijinan, perlindungan dan pengelolaan usaha secara berkelanjutan; pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan penegakan hukum secara adil dan konsisten.

### **B. Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah**

RPJPD Provinsi Kalimantan Timur akan dilaksanakan secara terpadu antarbidang dan antarwilayah, dan bertahap lima tahunan sesuai dengan tujuan, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sehingga pembangunan dapat berjalan dengan efisien, efektif dan berkelanjutan.

#### 1. **RPJMD Ke-1 (2005-2008).**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah periode 2005-2008 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Pembangunan Daerah yang berlaku sampai dengan Tahun 2008.

Pelaksanaan pembangunan yang telah ditempuh selama ini menjadi pijakan dalam perencanaan pembangunan lima tahun pertama dengan prioritas pada penguatan dasar dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan kesadaran lingkungan yang semakin baik.

Pembangunan jangka panjang pada tahap pertama diarahkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga dalam jangka panjang memiliki daya saing yang tinggi; pengembangan ekonomi diarahkan pada pembentukan struktur ekonomi yang mapan dan lebih berpihak pada rakyat banyak; infrastruktur dasar lebih mendukung arah pengembangan kawasan prioritas; pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berjalan dengan lebih efisien dan efektif, dan hukum lebih diutamakan; serta penataan ruang menjadi dasar kebijakan pembangunan dengan mengedepankan kelestarian alam dan lingkungan. Pola ini diharapkan menjadi dasar pembentukan masyarakat yang sejahtera dengan dasar pembangunan yang berkeadilan.

##### **a. Pengembangan Sumberdaya Manusia.**

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang meliputi bidang terkait khususnya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai indeks pembangunan manusia. Hal ini juga akan sangat ditunjang oleh peningkatan penelitian dan penguasaan iptek, peningkatan peran wanita dalam pembangunan, peningkatan kegiatan pemuda dan olahraga serta didukung oleh kebersamaan antar pemeluk agama dan semakin diperhatikannya kesejahteraan sosial masyarakat.

Pada tahap pertama ini peningkatan kualitas SDM yang dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan dengan meningkatkan dan memantapkan wajib belajar 9 tahun, pembinaan dan pengembangan pendidikan menengah umum dan kejuruan sekaligus pendidikan tinggi, pendidikan informal, perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.

Salah satu kebutuhan pengembangan SDM adalah dukungan Litbang dan Iptek sehingga prioritas pembangunan harus didukung oleh penelitian yang aplikatif di berbagai bidang. Dengan demikian setiap bidang pembangunan perlu meletakkan dasar litbang dan penguasaan iptek.

Distribusi penduduk yang sangat besar memerlukan peningkatan dan pemerataan fasilitas kesehatan di setiap kabupaten/kota. Peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan melalui promosi hidup sehat dan pembedayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman kesehatan pada segenap lapisan masyarakat, serta perluasan sosialisasi pada masyarakat tentang kebersihan lingkungan serta berperilaku hidup bersih dan sehat; disertai berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Selanjutnya pengembangan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu. Selanjutnya peningkatan pelayanan fasilitas dan pelayanan kesehatan perlu pemerataan tenaga medis, paramedis dan non medis di setiap kabupaten/kota yang didukung oleh adanya dokter spesialis dan ahli-ahli kesehatan. Perkembangan penduduk yang cukup tinggi memerlukan pengendalian angka kelahiran dan memperkecil angka kematian. Dalam bidang kesehatan ini juga dilakukan peningkatan informasi kesehatan, pelayanan KB, sampai pada KB mandiri.

Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kemampuan keahlian dan peluang usaha dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas kerja, dan upaya peningkatan kualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, disertai pemberian informasi ketenagakerjaan. Mengingat perlunya peningkatan kualitas tenaga kerja, maka diperlukan partisipasi dunia usaha, serta menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan bagi angkatan kerja. Pada tahap ini telah mulai dilakukan peningkatan kesejahteraan serta hak-hak pekerja sekaligus dilakukan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja sekaligus penghapusan tenaga kerja anak.

Salah satu bagian penting dalam pembangunan adalah peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang. Peningkatan peran ini dilakukan melalui peningkatan peran aktif perempuan dalam bidang pembangunan baik ekonomi, sosial, politik, budaya. Pada tahap ini lebih ditingkatkan kualitas dan perlindungan perempuan dan tenaga kerja perempuan serta pengembangan kelembagaan yang mendukung peningkatan peran perempuan.

Selanjutnya peran pemuda ditingkatkan melalui pembentukan berbagai organisasi kepemudaan sebagai wadah menampung aspirasi dan kegiatan kepemudaan. Peningkatan peran pemuda lain yang penting yaitu meningkatkan prestasi olahraga pemuda melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang olah raga, dengan peningkatan pembinaan cabang-cabang olahraga unggulan.

Dalam bidang keagamaan, dilakukan peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama sesuai pemeluk masing-masing. Hal ini juga didukung oleh peningkatan kerukunan umat beragama. Selanjutnya diperlukan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keagamaan melalui peningkatan pembangunan fasilitas peribadatan dan kegiatan keagamaan bagi setiap pemeluk agama masing-masing, juga peningkatan kualitas melalui berbagai program pendidikan bagi pengajar keagamaan.

Banyaknya masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan penanganan khususnya terutama anak terlantar, anak asuh, keluarga miskin dan korban bencana, yang terus menerus dan memperluas jangkauannya. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan dan memberikan pelayanan pendidikan terutama pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dan pelaksanaan subsidi silang. Untuk meningkatkan pelayanan bagi kesejahteraan sosial masyarakat diperlukan peningkatan sumberdaya manusia pengelola kesejahteraan sosial. Hal ini juga diikuti oleh ketahanan sosial dalam bantuan penyelamatan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan korban bencana.

**b. Pengembangan Ekonomi Wilayah.**

Konsep dasar pengembangan ekonomi wilayah adalah dengan memperkuat struktur ekonomi yang fundamental dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya. Salah satu upaya yang diperlukan adalah meningkatkan upaya pemerataan antarwilayah dan antarsektor perekonomian. Penataan dasar yang diperlukan adalah meningkatkan peran sektor pertanian secara luas, pengembangan komoditas yang memiliki peluang ekspor, melakukan promosi Investasi dan perdagangan, melakukan pengembangan kawasan ekonomi terpadu ataupun kawasan ekonomi yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial. Selanjutnya secara proporsional peran migas, pertambangan dan kehutanan sebagai penopang utama perekonomian dikurangi secara bertahap.

Pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dalam tahap awal diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan sendiri melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pertanian untuk menunjang ketahanan pangan, penetapan daerah sentra pembangunan pertanian, pembentukan kawasan agropolitan, serta pengembangan sistem dan usaha agribisnis secara terpadu dan utuh. Selanjutnya di bidang pertanian tanaman pangan dilakukan pengembangan infrastruktur pengairan sebagai penunjang utama pertanian.

Pengembangan perkebunan memiliki peran penting dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada masa yang akan datang, sehingga sangat diperlukan peletakan dasar pengembangan perkebunan baik terkait dengan penyiapan lahan, pengembangan komoditas dan teknologi tepatguna, serta pengolahan hasil perkebunan maupun infrastruktur dan SDM dan kelembagaan terkait. Pengembangan perkebunan ini dilakukan dengan melakukan pemilihan komoditas potensial, pembentukan sentra perkebunan sebagai kutub pertumbuhan bagi daerah sekitarnya.

Kehutanan memiliki peran penting bagi pengembangan ekonomi, tetapi secara bertahap perannya sebagai pengeksport bahan mentah dikurangi. Dalam tahap pertama diperlukan pemetaan potensi dan fungsi hutan disertai pengelolaan hutan secara lestari dan intensif. Mengingat banyaknya kerusakan pada sumberdaya hutan, maka tindakan rehabilitasi dan konservasi SDH dilakukan dalam skala luas, meningkatkan akses masyarakat setempat dalam pemanfaatan SDH dan melestarikannya.

Pengembangan peternakan diarahkan menjadi ternak andalan dan unggulan, pemenuhan kebutuhan daging dan telur, disertai pengembangan infrastruktur yang mendukung kelancaran usaha peternakan. Pengembangan peternakan juga didorong untuk membentuk pengolahan produk peternakan.

Mengingat pengolahan produk peternakan ini memiliki nilai ekonomi tinggi maka diperlukan pembentukan peluang pemasaran seluas-luasnya kepada pelaku usaha. Pembinaan pengembangan dan pengelolaan ternak bagi masyarakat juga diperluas pada skala ekonomis, dan memiliki daya saing sebagai bagian dari agribisnis dan agroindustri bidang peternakan.

Pengembangan kelautan dan perikanan dilakukan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, serta peningkatan aksesibilitas ke sentra-sentra produksi perikanan. Pengembangan kelautan dan perikanan ini perlu didukung oleh investasi dan kemitraan, disertai upaya pengolahan produk perikanan sebagai produk unggulan Kalimantan Timur yang ramah lingkungan, dan penggunaan teknologi unggulan perikanan.

Pengembangan perekonomian ini sangat memerlukan peningkatan iklim dan minat investasi yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri, yang dilakukan melalui jaminan kepastian usaha dan kepastian hukum dalam berusaha, kemudahan usaha dan investasi disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya dilakukan peningkatan pengelolaan BUMD disertai penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan dan tanggung jawab pada pengelolaan BUMD.

Dalam pengembangan perekonomian peran perindustrian, perdagangan dan koperasi sangat penting dan menentukan. Industri pengolahan hasil tambang dan migas tetap penting, selanjutnya yang akan didorong perkembangannya adalah industri pengolah hasil pertanian, pengembangan industri berbasis produk unggulan daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta percepatan pengembangan kawasan industri termasuk kawasan ekonomi khusus Indonesia (KEKI), cluster industri berbasis komoditas unggulan. Pengembangan ini harus disertai peningkatan kualitas SDM dan penciptaan iklim yang kondusif dalam skala nasional maupun daerah.

Berbagai produk Kalimantan Timur harus dipasarkan seluas-luasnya melalui peningkatan volume perdagangan disertai kerjasama antar daerah dan antar negara. Dalam tahap ini neraca perdagangan semakin ditingkatkan. Peran koperasi, usaha kecil dan menengah melalui ekonomi produktif. Sekaligus sebagai pelaku utama ekspor perlu didorong dan dipacu melalui berbagai sistem insentif, termasuk membangun kemitraan dalam berbagai bidang. Dalam tahap ini juga dilakukan pembuatan prioritas perdangan (ekspor) non migas. Untuk ini juga diperlukan penguatan usaha dan lembaga perdagangan, perlindungan terhadap konsumen, meningkatkan tertib usaha niaga, peningkatan daya saing, perluasan pasar ekspor dan promosi.

Pariwisata, meskipun belum dominan tetapi memiliki prospek pengembangan yang sangat baik, dan pengembangan pariwisata ini dilakukan dengan menciptakan keterkaitan antar kepariwisataan secara nasional, pengembangan promosi wisata dan disertai dengan penetapan dan pengembangan objek dan atraksi wisata unggulan. Kegiatan ini ditunjang oleh pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan termasuk kesenian dan pengembangan sumberdaya manusia bidang kepariwisataan. Selanjutnya pendukung utama perkembangan pariwisata dilakukan melalui pembentukan sentra pelayanan pariwisata, penetapan festival budaya, penetapan jalur wisata. Wisata andalan pada

masa yang akan datang yakni wisata ekologi dan budaya harus ditingkatkan dan dijadikan daya tarik utama.

Dalam pengembangan jangka panjang secara bertahap ketergantungan pada pertambangan dan migas dikurangi melalui peningkatan kualitas pengelolaan bahan tambang dan migas secara efisien dan efektif yang ramah lingkungan. Untuk meningkatkan nilai ekonomis maka diperlukan peningkatan alternatif pengelolaan bahan tambang potensial dan sumberdaya alternatif migas. Pada kawasan pertambangan juga dilakukan pembuatan basis data dan penataan ruang pertambangan yang serasi antar sektor. Terkait dengan pemanfaatan ruang bekas penambangan diperlukan penataan dan penertiban bekas tambang dengan melakukan reuse, sebagai langkah intensifikasi.

### c. Prasarana Dasar.

Prasana dasar yang sangat diperlukan dalam pembangunan adalah transportasi, irigasi dan kelistrikan. Secara keseluruhan ketiga bidang ini sangat menunjang keberhasilan pembangunan baik dalam konteks mendorong pertumbuhan maupun mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Pengembangan transportasi darat dalam tahap pertama diarahkan pada upaya pemerataan secara proporsional pengembangan jaringan jalan antar kawasan perkotaan dan perdesaan disertai pemeliharaan jalan yang sudah ada sampai pada kawasan pedalaman dan perbatasan. Pengembangan ini juga dilakukan pada sentra ekonomi yang akan ditumbuhkan sehingga terbentuk pola jaringan yang terpadu. Mengingat di Provinsi Kalimantan Timur peran angkutan perairan khususnya sungai sangat penting, maka juga dikembangkan sistem intermoda melalui pemanfaatan sarana dan prasarana ASDP untuk menunjang pergerakan intermoda.

Peningkatan transportasi laut dilakukan dengan melakukan integrasi pergerakan intermoda sekaligus dalam hubungan antar daratan dan kepulauan, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan laut dalam kegiatan ekspor-impor. Pengembangan pelabuhan ini dikaitkan dengan pengembangan sentra ekonomi penghasil barang ekspor. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan peningkatan keselamatan pelayaran.

Peningkatan pelayanan transportasi udara dilakukan melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana bandara yang memadai, serta peningkatan bandara perintis menjadi lebih tinggi lagi sehingga aksesibilitas dapat terjangkau. Pengembangan bandara ini juga dilakukan dengan mengarahkan pada sentra kegiatan ekonomi dan pusat kegiatan masyarakat. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan peningkatan keselamatan penerbangan.

Pengembangan sistem irigasi dilakukan dengan memprioritaskan pada kemampuan dalam pengairan terhadap sawah, rehabilitasi jaringan irigasi dan bendung, serta pengembangan embung pada lokasi strategis. Pengembangan jaringan daerah rawa dilakukan untuk peningkatan dan pembangunan jaringan tata air daerah rawa dan tambak.

Energi listrik di Provinsi Kalimantan Timur harus ditingkatkan mulai dari penyediaan sumber daya listrik dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi, dan dilakukan dengan cara parsial pada permukiman yang terpencar dan dalam jumlah kecil, selanjutnya secara keseluruhan diarahkan pada sistem

terpadu pada seluruh kawasan. Secara bertahap juga dilakukan efisiensi dengan cara penekanan terjadinya losses tenaga listrik. Pola ini disertai dengan kerjasama antar pelaku kelistrikan beserta distribusinya.

**d. Politik, Pemerintahan dan Penegakan Hukum.**

Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan adalah secara terus menerus berupaya meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kesegnap masyarakat, meningkatkan efisiensi dan kinerja organisasi perangkat daerah, susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis, serta keterpaduan pengelolaan pembangunan daerah. Pada tahap awal ini juga dilakukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi segenap aparatur pemerintah disertai dengan pengembangan sistem pengawasan.

Peningkatan pada bidang hukum dilakukan dengan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana hukum khususnya di wilayah perbatasan dan daerah rawan lainnya, pengembangan struktur organisasi setingkat muspida di wilayah kabupaten/kota dan muspika di wilayah kecamatan. Dalam tahap pertama ini juga dilakukan peningkatan kapasitas aparat hukum dalam menjamin supremasi dan kepastian hukum, keadilan dan penegakan hukum.

Pengembangan sistem politik yang demokratis, pemantapan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya juga dilakukan peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan bangsa terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan atas kehidupan berbangsa dan bernegara serta meningkatkan kesadaran bela negara segenap warga masyarakat. Melakukan peningkatan integrasi sosial – budaya disertai penguatan kelembagaan.

Seiring dengan alam keterbukaan, maka peran media masa juga ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya baik media cetak maupun media elektronik. Peningkatan kualitas ini juga menyangkut peningkatan kuantitas dan kualitas media harian, media mingguan, media tabloid maupun media majalah guna meningkatkan kinerja pelayanan publik yang transparan dan akuntabel di Provinsi Kalimantan Timur. Masyarakat juga dibiasakan mengembangkan budaya informasi di berbagai wilayah bahkan sampai pelosok yang diikuti pengembangan sarana dan prasarana komunikasi pembangunan.

**e. Penataan Ruang dan Lingkungan.**

Penataan ruang melalui kegiatan: perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan partisipatif. Penataan ruang khususnya tata guna tanah diikuti dengan tertib penggunaan/penguasaan tanah, tertib administrasi pertanahan, tertib hukum pertanahan, dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Program penataan ruang dilakukan secara terintegrasi dengan berbagai program pembangunan yang dimulai dengan pengembangan struktur ruang yang dapat mengurangi disparitas antar wilayah, meningkatkan pertumbuhan wilayah, sesuai dengan fungsi masing-masing wilayah, pemantapan kawasan lindung khususnya hutan lindung dan konservasi sumberdaya air. Selanjutnya adalah melakukan dorongan pada kawasan potensial dan strategis skala nasional dan provinsi, serta pada masing-masing kota/kabupaten. Salah satu kawasan yang perlu didorong pertumbuhannya adalah kawasan pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil.

Salah satu kawasan yang memerlukan penanganan secara khusus dan segera adalah kawasan perbatasan dengan mengembangkan fungsinya sebagai kawasan andalan yang mandiri dan pusat kegiatan ekonomi. Pola ini diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana permukiman pada kawasan perbatasan. Dalam tahap ini juga dilakukan pembinaan politik untuk meningkatkan nasionalisme, rasa kebangsaan dan kerjasama antar negara.

Permukiman masyarakat yang tersebar dalam jumlah besar dan kecil perlu diarahkan dan menjadi prioritas dalam rangka pembangunan perumahan dan pemukiman yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Selanjutnya pada berbagai wilayah diperlukan penataan, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan revitalisasi kawasan permukiman kumuh.

Pada permukiman transmigrasi dilakukan peningkatan penyediaan hunian yang layak untuk transmigran, disertai dengan penyediaan lahan usaha yang memadai. Lahan usaha ini harus diarahkan pada peningkatan kegiatan usaha yang bernilai ekonomis tinggi dengan membentuk agroindustri dan agrobisnis.

Terkait dengan pemanfaatan berbagai sumberdaya alam, maka perlu diprioritaskan pemahaman tentang kerangka dasar pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, melalui peningkatan kualitas khususnya dalam rangka penanganan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya dilakukan tindakan pencegahan penurunan kualitas lingkungan, penegakan hukum bagi pelaku perusakan lingkungan, dan upaya perbaikan kualitas bagi lingkungan yang telah rusak termasuk pengendalian kerusakan hutan dan lahan dalam skala luas.

Berbagai upaya juga dilakukan dengan melakukan pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana alam diantaranya melakukan pengelolaan pengendalian banjir dan pengamanan kawasan pantai

## 2. RPJM Ke-2 (2009-2013).

Bila pada tahap pertama berbagai landasan pembangunan jangka panjang telah dilakukan, maka program jangka menengah tahap ke-2 diarahkan pada pemantapan perubahan struktural secara sosial – ekonomi, sehingga pembangunan akan lebih diarahkan pada penguatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan, pengembangan perekonomian telah mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir. Secara keseluruhan pembangunan telah menunjukkan pada arah peningkatan kesejahteraan secara global, lingkungan mulai terkendali, dan secara umum terjadi peningkatan daya saing daerah dalam kemandirian pembangunan. Prasarana dasar pembangunan semakin memiliki peran dalam pemerataan dan mendorong pertumbuhan wilayah, pelaksanaan pembangunan makin menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dengan partisipasi yang makin meningkat serta penataan ruang dijadikan sebagai dasar pijakan pembangunan daerah. Kondisi lingkungan secara global juga menunjukkan adanya peningkatan yang ditandai oleh kesadaran masyarakat akan lingkungan yang makin membaik dan penegakan hukum lingkungan juga semakin baik. Secara keseluruhan dalam program jangka menengah telah mengarah pada pembentukan masyarakat sejahtera dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih adil dalam pengertian antar sektor dan antar wilayah, serta kegiatan unggulan daerah mulai dapat bersaing dalam skala nasional.

**a. Pengembangan Sumberdaya Manusia.**

Kualitas sumberdaya manusia secara keseluruhan menunjukkan peningkatan yang signifikan ditandai oleh membaiknya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, peran wanita serta pemuda, prestasi olahraga mulai bersaing di tingkat nasional, kehidupan keagamaan semakin menunjukkan peningkatan kerukunan, dan indeks kesejahteraan sosial juga meningkat yang ditunjukkan oleh berkurangnya anak terlantar. Secara umum kualitas SDM mendekati rata-rata nasional.

Peletakan dasar peningkatan partisipasi pendidikan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih merata telah dengan partisipasi masyarakat yang mendekati usia wajib belajar 12 tahun. Kualitas tenaga pendidik juga semakin baik yang ditandai oleh semakin banyaknya pengajar yang minimum berjenjang S1. Pada saat yang bersamaan pendidikan unggulan, dan pendidikan berbasis ketrampilan di setiap kabupaten/kota sudah mulai terwujud. Kerjasama pendidikan dalam jaringan nasional mulai terbentuk, pendidikan berskala internasional mulai dikembangkan pada perkotaan besar, dan kualitas pendidikan mendekati rata-rata nasional. Peningkatan kualitas pendidikan ini menjadikan kualitas SDM dan ketenagakerjaan juga semakin membaik.

Peningkatan pendidikan pada sisi lain juga meningkatkan kemampuan SDM dalam memanfaatkan iptek dan litbang sehingga keduanya akan menjadi penopang utama dalam pengembangan SDM. Selanjutnya Iptek dan Litbang ini dikembangkan oleh setiap lembaga pemerintah dan swasta sehingga semakin meningkatkan SDM dan kualitas produk setiap kegiatan.

Peningkatan pengetahuan berbagai bidang oleh masyarakat menjadikan kesadaran akan kesehatan juga semakin membaik, dan semakin meningkatnya pelayanan kesehatan seperti bertambahnya fasilitas kesehatan ke berbagai wilayah sampai pelosok, tenaga medis yang semakin terdistribusi menjadikan kualitas kesehatan semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya jumlah kematian ibu saat melahirkan, serta semakin baiknya lingkungan hidup dan berperilaku hidup sehat masyarakat. Pemerataan pelayanan kesehatan ini juga semakin dinikmati oleh masyarakat kurang mampu, serta masyarakat bersama pemerintah telah dapat mengatasi berbagai wabah dan penyakit endemi.

Peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan iptek yang lebih baik dan kualitas kesehatan yang meningkat menjadikan daya saing SDM semakin unggul sehingga selanjutnya menjadikan produktivitas tenaga kerja juga semakin baik. Secara simultan hal ini akan mendorong peningkatan kualitas produktivitas SDM, sehingga sangat mendorong penciptaan peluang kerja yang lebih baik, yang ditandai oleh berkurangnya pengangguran, semakin meningkatnya pendapatan rata-rata dan semakin beragamnya kegiatan usaha masyarakat. Semangat kewirausahaan makin berkembang dalam rangka menopang pengembangan perekonomian berbasis masyarakat.

Selanjutnya peran wanita dalam berbagai bidang juga menunjukkan adanya peningkatan yang ditandai oleh semakin tinggi peran wanita dalam dunia politik, pemerintahan dan kegiatan kemasyarakatan. Demikian juga kepemudaan dan olahraga semakin menunjukkan peningkatan yang ditandai oleh peningkatan

kegiatan pemuda dan meningkatnya prestasi olahraga. Hal ini ditandai oleh semakin banyaknya pertandingan bertingkat nasional dan internasional, semakin meningkatnya peringkat olahraga dalam skala nasional dan telah dikembangkan sekolah olahraga.

Peningkatan kegiatan masyarakat juga semakin meningkatkan kegiatan bidang keagamaan, juga semakin meningkatkan kerukunan umat beragama. Fasilitas keagamaan semakin membaik, sekolah keagamaan juga menunjukkan adanya peningkatan peran dalam meningkatkan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan kondisi sosial-ekonomi menjadikan kesejahteraan sosial masyarakat juga makin membaik. Hal ini antara lain ditandai oleh menurunnya jumlah anak terlantar dan anak asuh serta kemandirian masyarakat semakin kuat.

#### **b. Pengembangan Ekonomi Wilayah.**

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan iklim investasi akan mendorong pengembangan perekonomian wilayah. Perubahan struktur ekonomi yang ditandai dengan semakin meningkatnya peran pertanian dalam arti luas, ketergantungan pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan secara bertahap mulai berkurang, industri pengolahan semakin berkembang dari hulu sampai hilir. Pengembangan perekonomian ini ditunjang oleh partisipasi masyarakat dalam skala luas, yang ditandai oleh semakin besarnya koperasi dan UKM. Pada sisi lain semangat otonomi semakin mendorong perkembangan dan daya saing daerah, serta munculnya spesialisasi daerah. Dengan demikian interaksi ekonomi antar sektor antar wilayah akan semakin meningkat. Untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan wilayah, maka pengembangan kawasan strategis mulai dilakukan.

Peningkatan perekonomian pada berbagai bidang juga nampak pada pertanian tanaman pangan dan hortikultura dimana kemandirian wilayah dapat tercapai melalui kemampuan dalam menyediakan kebutuhan pangan. Selanjutnya sentra produksi pertanian unggulan dan pusat pelayanan seperti pembentukan agropolitan semakin berkembang. Pola ini juga didukung oleh berkembangnya agribisnis dan agroindustri sehingga semakin meningkatkan daya saing daerah dari sisi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Indikator perkembangan ini juga ditunjukkan oleh semakin berkembangnya infrastruktur pertanian, penggunaan peralatan yang semakin modern, dan mengikuti informasi pasar pertanian.

Perkebunan di Kalimantan Timur semakin menunjukkan peran penting dalam perekonomian. Bila pada tahap pertama sudah dilakukan pelaksana pengembangan lahan dan komoditas unggulan perkebunan, maka pada tahap kedua target penyediaan lahan telah terpenuhi setidaknya seluas 50%, dan produknya mulai menghasilkan dan dipasarkan. Sentra perkebunan mulai berkembang, dimana hal ini ditandai juga oleh semakin banyaknya sentra perkebunan dan permukiman masyarakat dengan kegiatan utama perkebunan. Selanjutnya mulai dilakukan pengolahan hasil perkebunan sehingga menciptakan produk hulu – hilir secara simultan yang diikuti juga dengan perbaikan pemasaran dan jaringan pasar nasional dan internasional. Dalam tahap ini peran berbagai stakeholders juga mulai berkembang.

Pemanfaatan sumberdaya hutan semakin dapat diarahkan pada pembentukan hutan lestari dengan pemanfaatan yang seimbang dengan pengolahan yang semakin intensif. Hal ini ditandai oleh meningkatnya pengolahan hasil hutan, berkurangnya pengambilan bahan mentah, dan perdagangan hasil hutan sebagai hasil primer semakin berkurang. Hal ini juga ditunjukkan oleh meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengolah hutan lestari. Partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan lestari makin meningkat dan penegakan hukum makin ditingkatkan.

Semakin intensif dan ekstensifnya pemanfaatan lahan pertanian juga sekaligus membuka peluang pengembangan peternakan, disamping ternak yang dikembangkan secara intensif. Selanjutnya pengembangan ternak unggulan mulai berkembang dengan mantap, dimana hal ini ditandai dengan semakin berkurangnya impor ternak, pengolahan produk ternak menjadikan nilai ekonomis ternak semakin meningkat, dan tenaga kerja bidang peternakan semakin meningkat jumlah dan ketrampilannya.

Perkembangan perekonomian Kalimantan Timur juga ditopang oleh perkembangan kelautan dan perikanan yang semakin meningkat perannya. Pengembangan ini ditopang oleh SDM yang semakin handal, infrastruktur perikanan yang lebih mapan, dan pengolahan hasil ikan menjadi industri perikanan sebagai salah satu komoditas yang diandalkan. Perkembangan ini juga ditandai oleh meningkatnya iklim investasi bidang perikanan, semakin membaiknya pola kemitraan antar stakeholders, dan semakin meningkatnya pendapatan nelayan.

Perkembangan ekonomi yang membaik, iklim usaha yang makin kondusif menjadikan minat investasi dari dalam negeri dan luar negeri semakin meningkat. Hal ini ditunjang oleh semakin meningkatnya jaminan kepastian usaha dan kepastian hukum, meningkatnya kemudahan berusaha dan investasi yang ditunjukkan oleh semakin meningkatnya nilai investasi daerah. Perkembangan perekonomian akan lebih berkembang dengan ditunjang oleh perindustrian, perdagangan dan koperasi. Dalam tahap ke dua ini, industri berbasis pertanian dan produk unggulan daerah makin berkembang, kawasan industri mulai dipasarkan dengan dukungan infrastruktur dan deregulasi yang memadai, promosi pengembangan kawasan industri dan KEKI terus ditingkatkan. Pada tahap ini neraca perdagangan semakin positif, sentra produk pemasaran telah terbentuk.

Peran pemerintah juga menunjukkan adanya peningkatan melalui semakin membaiknya peran BUMD dalam pembangunan, yang juga ditandai oleh peningkatan peran publik dalam pengelolaan BUMD. Demikian juga dengan koperasi, usaha kecil dan menengah semakin berperan dalam perekonomian lokal sampai internasional yang ditandai oleh meningkatnya jumlah UKM dalam kegiatan perekonomian.

Semakin terpeliharanya kualitas alam dan terjaganya budaya menjadikan pariwisata akan semakin menarik. Perkembangan ini ditandai oleh semakin meningkatnya wisatawan nusantara dan mancanegara, semakin tingginya tingkat hunian, dan semakin baiknya pengelolaan kepariwisataan di Kalimantan Timur. Dalam tahap ini sudah mulai dimantapkan kalender wisata untuk menyambut wisatawan pada berbagai event serta semakin tertata dan menarik obyek wisata unggulan daerah. Promosi wisata sudah pada tingkat nasional yang ditandai oleh terbentuknya jaringan pariwisata nasional dan internasional.

Pertambangan dan migas meskipun tetap memegang peran penting dalam perekonomian tetapi secara proporsional secara bertahap akan menurun perannya. Hal ini ditandai dengan penurunan proporsinya dalam penerimaan daerah. Selanjutnya dalam peningkatan efisiensi dan penjagaan kualitas lingkungan maka pengolahan pertambangan yang lebih ramah lingkungan semakin dikenal dan penataan dan penertiban bekas tambang sebagai langkah intensifikasi semakin meningkat perannya.

**c. Prasarana Dasar.**

Transportasi akan semakin berkembang seiring dengan peningkatan perekonomian wilayah dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini juga didukung oleh energi listrik yang semakin mapan dan irigasi yang semakin meluas wilayah pengalirannya.

Transportasi darat semakin berkembang yang ditandai oleh semakin terhubungkannya antar pusat permukiman perkotaan dan perdesaan serta pusat-pusat perekonomian wilayah dan kawasan unggulan daerah. Pemerataan pengembangan jalan ini semakin terlihat pada permukiman yang relatif terpencil (pedalaman). Pengembangan jaringan jalan ini dilakukan secara terpadu dengan sistem transportasi lainnya sebagai sistem intermoda.

Transportasi laut memiliki peran semakin meningkat dalam mendorong perekonomian melalui kegiatan ekspor-impor antar pulau maupun antar negara. Peningkatan ini ditandai oleh peningkatan skala perdagangan yang melalui pelabuhan dan semakin meningkatnya intensitas pelabuhan itu sendiri. Untuk itu pengembangan pelabuhan prioritas akan tetap didorong perkembangannya. Sesuai dengan perkembangan wilayah, maka dapat mulai dikembangkan pelabuhan khusus pada kawasan tertentu seperti kawasan perkebunan, kawasan ekonomi khusus, ataupun kawasan strategis.

Peran transportasi udara akan semakin penting terutama dalam hubungan dalam maupun luar negeri. Bandara internasional akan semakin berperan yang ditandai oleh semakin tingginya frekuensi penerbangan ke luar negeri dan berkembangnya bandara internasional maupun bongkar muat yang melalui bandara internasional di Kalimantan Timur. Hubungan inter provinsi juga mengalami peningkatan melalui berkembangnya bandara perintis, khususnya pada wilayah potensial.

Penyediaan pangan yang mandiri sangat didukung oleh peningkatan irigasi, yang ditandai oleh semakin mapannya sistem irigasi, semakin luasnya sawah yang dapat diairi, serta terdapat beberapa bendungan atau waduk/embung sebagai cadangan air. Pola ini juga ditunjukkan oleh semakin besarnya produk pertanian tanaman pangan khususnya padi dan palawija.

Pasokan listrik di Provinsi Kalimantan Timur yang mulai mapan semakin ditingkatkan melalui intensifikasi dan diversifikasi terutama pada saat beban puncak. Pengembangan energi listrik ini akan semakin meningkat yang ditandai oleh semakin besarnya pasokan pada berbagai kawasan, serta semakin terdiversifikasinya sumber listrik. Selanjutnya pengembangan yang terpadu antar jaringan sudah mulai berkembang. Berbagai efisiensi untuk mengurangi kehilangan daya juga dilakukan yang ditandai oleh meningkatnya persentase daya terpakai.

**d. Politik, Pemerintahan dan Hukum.**

Peran pemerintah sebagai regulator dan administrator dalam pembangunan terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya efisiensi organisasi perangkat daerah yang ditandai oleh semakin terpenuhinya standar pelayanan dan jumlah perangkat daerah, maupun pada susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis. Selanjutnya peningkatan sumberdaya manusia dalam bidang ini adalah ditandai oleh semakin baiknya tingkat pendidikan pegawai, semakin tersebarinya pegawai pada daerah terpencil ataupun terisolir, pedalaman dan perbatasan.

Dalam bidang hukum peningkatan pelayanan ditunjukkan oleh meningkatnya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana hukum khususnya di wilayah perbatasan dan daerah rawan lainnya, semakin berkembangnya struktur organisasi setingkat muspida di wilayah kabupaten/kota dan muspika di wilayah kecamatan. Selanjutnya penegakan hukum lebih efektif dijalankan di berbagai bidang pembangunan, juga semakin tercipta kepastian hukum bagi berbagai dunia usaha.

Media masa juga semakin mendapat tempat yang lebih proporsional, lebih terbuka, kualitas media baik cetak maupun elektronik juga semakin meningkat. Berbagai publikasi pembangunan juga semakin meningkat, dan peran berbagai lembaga dalam melakukan publikasi ini semakin banyak jumlahnya.

**e. Penataan Ruang dan Lingkungan.**

Pembangunan pada berbagai bidang yang terus meningkat dan mendorong pertumbuhan wilayah akan tetap terarah sesuai dengan pokok-pokok kebijakan seperti tertuang rencana tata ruang wilayah. Struktur ruang semakin menunjukkan adanya keseimbangan distribusi antara perkotaan dan perdesaan, jaringan pergerakan antar wilayah yang makin mapan, dan kegiatan ekonomi utama wilayah semakin memiliki spesialisasi. Berbagai program pembangunan juga semakin mengacu pada tata ruang wilayah, pola ruang yang telah ditetapkan baik ruang daratan, ruang lautan, maupun ruang udara semakin terarah dan terkendali. Hal ini ditandai oleh semakin kecilnya penyimpangan pemanfaatan ruang lindung/konservasi. Penataan ruang yang makin kondusif ini akan semakin mendorong minat investasi daerah.

Penanganan kawasan perbatasan melalui pembukaan jalur ekonomi dan kegiatan unggulan semakin menunjukkan peningkatan yang ditandai oleh semakin berkurangnya ketimpangan dengan negara tetangga. Pola ini juga didukung oleh semakin mandirinya kawasan perbatasan khususnya permukiman masyarakat dan semakin berkembangnya pusat-pusat kegiatan di kawasan perbatasan ini.

Kualitas permukiman di berbagai wilayah juga menunjukkan peningkatan yang ditandai oleh semakin tersedianya perumahan masyarakat berpendapatan rendah, meningkatnya kualitas permukiman, serta semakin berkurangnya permukiman Kumuh. Permukiman yang semakin meningkat kualitasnya juga mendorong produktivitas masyarakatnya.

Permukiman transmigrasi akan semakin meningkat kualitasnya yang ditandai oleh semakin menurunnya perumahan yang kurang layak huni, semakin tumbuh menjadi perdesaan bahkan menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian wilayah sebagai perdesaan baru. Pada permukiman transmigrasi yang potensial

akan membentuk berbagai pusat perekonomian melalui semakin berkembangnya agroindustri dan agrobisnis.

Kesadaran pembangunan yang semakin meningkat disertai kesadaran akan keseimbangan alam menjadikan sumberdaya alam akan semakin lestari dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Berbagai pembangunan semakin memperhatikan kaidah AMDAL, semakin menurunnya perusakan alam, meningkatnya kualitas lingkungan, dan semakin tegaknya hukum bagi pelaku perusakan lingkungan. Disamping itu keberhasilan pengembalian kualitas pada lingkungan yang rusak semakin mendorong berbagai kegiatan penyelamatan lingkungan, seperti reboisasi. Pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana alam juga semakin dipahami oleh masyarakat.

### 3. RPJM ke-3 (2014-2018).

Pembangunan pada seluruh bidang yang dilakukan dengan konsisten selama dua periode telah menunjukkan pemantapan menuju masyarakat sejahtera, pemerataan hasil pembangunan telah dirasakan masyarakat. Kualitas SDM semakin meningkat, kebergantungan ekonomi pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan mulai berkurang, sedangkan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan semakin berkembang, dan struktur ekonomi semakin mantap. Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman, pemerintahan berjalan makin efisien, efektif, dan transparan. Selanjutnya penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah, serta kualitas lingkungan secara global semakin terkendali dan terus meningkat kualitasnya. Secara umum tingkat perkembangan Kalimantan Timur dalam tahap ini setara dengan rata-rata Indonesia, berbagai kegiatan dan produk unggulan telah sampai atau setara dengan rata-rata Asean.

#### a. Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Pembangunan yang dilaksanakan secara terencana dalam dua periode telah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, sehingga menunjukkan daya saing yang makin tinggi. Secara umum hasil pembangunan SDM yang dilaksanakan dalam periode ini menjadikan kualitas SDM masyarakat Kalimantan Timur telah setara dengan kualitas SDM masyarakat Indonesia. Kesejahteraan masyarakat makin meningkat, dan semakin mandiri dalam melaksanakan berbagai program pembangunan.

Dalam periode ini pendidikan semakin meningkat yang ditunjukkan oleh meratanya pelaksanaan pendidikan ke segenap kawasan perkotaan dan perdesaan, wajib belajar telah mencapai 12 tahun, sekolah unggulan dan sekolah kejuruan sudah berkembang, serta kualitas pendidikan secara umum telah setara dengan rata-rata nasional. Pada perkotaan utama sudah dikembangkan pendidikan unggulan bertaraf internasional. Peningkatan kualitas pendidikan ini akan menjadi pilar utama peningkatan kualitas SDM.

Meningkatnya kualitas pendidikan ini sangat berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja yang ditopang oleh litbang dan iptek. Dengan demikian litbang dan iptek telah menjadi suatu kebutuhan setara dengan kebutuhan informatika dan secara umum juga menunjukkan kesetaraannya dengan tingkat nasional. Berbagai keputusan kebijakan dasar diambil berdasarkan hasil penelitian yang valid dan disepakati berbagai pihak. Hal ini juga ditandai oleh semakin besarnya peran litbang dan iptek dalam lembaga pemerintah dan swasta.

Peningkatan kesadaran akan kesehatan dan lebih baiknya perilaku hidup sehat, serta semakin meratanya distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis-paramedis menjadikan tingkat kesehatan masyarakat Kalimantan Timur semakin baik. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin membaik ini juga ditandai oleh semakin meningkatnya usia harapan hidup rata-rata masyarakat, jumlah kematian ibu saat melahirkan semakin dapat ditekan, semakin baiknya lingkungan hidup dan berperilaku hidup sehat masyarakat, wabah dan endemi lokal semakin dapat ditangani secara mandiri. Masyarakat kurang mampu juga semakin mudah menjangkau pelayanan kesehatan yang prima.

Peningkatan kualitas indeks pembangunan manusia yang telah diperoleh menjadikan daya saing semakin meningkat, pendapatan semakin membaik, juga spesialisasi tenaga kerja semakin terjadi. Secara simultan hal ini akan mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja, semakin tertekannya pengangguran, dan produktivitas kerja juga semakin mantap. Berbagai kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan arah pengembangan ekonomi makro seperti kebutuhan tenaga teknik, medis, perencanaan, manajemen, pariwisata, pengelolaan lingkungan hidup dapat dipenuhi dari masyarakat Kalimantan Timur sendiri. Demikian juga dengan peluang usaha swasta dibidang telematika, dan berbagai jasa telah berkembang dengan cukup baik. Pada sisi lain, dengan semakin terbukanya peluang usaha yang besar dengan peluang pemasaran nasional dan ekspor ke luar negeri menjadikan perkembangan kewirausahaan menjadi tinggi.

Meningkatnya partisipasi wanita dalam berbagai bidang pembangunan semakin mendorong terciptanya kesetaraan gender semakin luasnya peran wanita dalam politik, pemerintahan dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Peran pemuda dalam pembangunan juga menunjukkan adanya kemapanan yang ditunjukkan oleh banyaknya organisasi pemuda khususnya di bidang organisasi kemasyarakatan, seni dan olahraga. Prestasi olahraga di Kalimantan Timur juga semakin membaik yang ditandai oleh semakin banyaknya pertandingan dalam skala provinsi dan semakin berperannya Kalimantan Timur dalam pengembangan olahraga nasional. Pada saat periode ke-3 ini prestasi olahraga Kalimantan Timur telah dapat bersaing dan mulai diatas rata-rata nasional.

Dalam bidang keagamaan juga menunjukkan peningkatan dimana kerukunan antar umat semakin membaik, kegiatan keagamaan semakin marak, dan fasilitas peribadatan juga semakin berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Sekolah berbasis keagamaan semakin mapan, dan terdistribusi ke berbagai daerah.

Peningkatan berbagai bidang ini juga semakin meningkatkan kualitas SDM secara umum, kesejahteraan sosial masyarakat juga makin membaik yang ditandai oleh semakin berkurangnya anak terlantar dan anak asuh, pemerintah daerah dapat menyantuni berbagai kebutuhan kesejahteraan sosial, dan kemandirian masyarakat semakin membaik.

#### **b. Pengembangan Ekonomi Wilayah.**

Bila pada tahap ke-2 perubahan struktur ekonomi sudah mulai mapan, investasi mulai masuk dan semakin meningkat, ketergantungan pada sumberdaya alam primer juga semakin berkurang, industri pengolahan semakin berkembang dari hulu sampai hilir, sektor perdagangan dan jasa semakin meningkat perannya, maka pada tahap ke-3 secara keseluruhan juga akan semakin berkembang dan mapan. Partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan perekonomian juga

menunjukkan peningkatan. Masyarakat banyak semakin tergabung dalam pengembangan koperasi dan berbagai UKM semakin meningkat menjadi besar. Perkembangan dan kondisi perekonomian termasuk investasi di dalamnya sudah sedikit diatas rata-rata nasional.

Dalam tahap ini penyediaan kebutuhan pangan dan hortikultura dapat dipenuhi secara mandiri, pada saat puncak panen bahkan mulai dapat mengekspor hasil. Perkembangan ini juga didukung oleh berkembangnya teknologi pangan sehingga mulai berkembang diversifikasi penyediaan pangan. Selanjutnya sentra produksi dan pemasaran mulai dari unit paling kecil sampai konsumen telah ada dalam sistem jaringan yang saling menguntungkan. Agropolitan sistem telah tumbuh, infrastruktur pertanian juga semakin berkembang. Kegiatan masyarakat juga telah berbasis pada agribisnis dan agro industri yang secara keseluruhan meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Selanjutnya sistem informasi pertanian termasuk informasi pasar juga semakin dikenal oleh petani.

Perkebunan unggulan telah mencapai tingkat mapan dan produknya telah memiliki daya saing dipasaran nasional dan internasional. Target penyediaan lahan perkebunan telah tercapai, pengembangan telah dilakukan, peran perkebunan menjadi dominan, karena mampu mengembangkan pertanian, peternakan, dan industri pengolahan dari hulu-hilir. Pengolahan hasil perkebunan menjadi pendongkrak perekonomian dan ketenagakerjaan, baik jumlah maupun kualitasnya. Dalam tahap ini sektor perkebunan akan lebih dimantapkan. Sentra perkebunan sudah berkembang yang ditandai juga oleh semakin berkembangnya sentra perkebunan dan permukiman masyarakat berkegiatan utama perkebunan juga semakin berkembang kegiatannya. Pada tahap ini, maka pemasaran dan pengembangan prasarana pendukung pengembangan perkebunan, serta kerjasama dengan berbagai stakeholders untuk mengembangkan industri pengolahan hasil perkebunan semakin meningkat.

Sumberdaya hutan telah memasuki pengelolaan lestari, kawasan hutan lindung semakin memiliki peran dalam keseimbangan lingkungan dan tetap dipertahankan, sementara hutan produksi dikelola secara efisien dan hasilnya dikelola dan diolah sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Penanganan hasil hutan sudah berjalan lebih efektif, dimana penebangan kayu ilegal sudah dapat ditangani dan penegakan hukum juga lebih efektif. Terhadap tanah yang rusak karena bekas penebangan hutan juga semakin tertangani sebagai bagian dari program reboisasi menerus. Pada tahap ini partisipasi masyarakat disekitar kawasan hutan semakin baik dan masyarakat juga semakin merasakan manfaat pengelolaan hutan lestari, dan penegakan hukum terhadap perusakan semakin tertangani dan pencurian hasil hutan semakin minim.

Peternakan pada tahap ini sudah ada pada kondisi yang semakin mantap dalam pengertian peternakan sudah mampu menjadi salah satu penopang ekonomi unggulan, diversifikasi produk peternakan dan pengolahannya mendorong pengembangan industri pengolahan. Kemandirian dapat memenuhi kebutuhan akan ternak telah tercapai, dan selanjutnya hasil ternak unggulan mulai dapat diekspor. Indikator keberhasilan ini adalah semakin meningkatnya iklim usaha peternakan, semakin tertanggulangnya penyakit ternak. Sumberdaya manusia dalam pengolahan ternak juga semakin baik yang ditandai oleh meningkatnya jumlah usaha ternak, tenaga ahli bidang peternakan, dan lembaga penelitian dan penyediaan ternak unggulan semakin berkembang.

Dalam bidang kelautan dan perikanan terjadi peningkatan produk yang bukan saja menghasilkan dan memasarkan ikan segar, tetapi juga pengolahan hasil penangkapan ikan. Perkembangan perikanan ini ditopang oleh kualitas SDM yang semakin baik, penggunaan sarana dan prasarana perikanan yang semakin canggih, dan kelembagaan yang lebih mapan. Selanjutnya sentra-sentra produksi perikanan juga semakin berkembang, investasi dan kemitraan perikanan semakin diminati, juga kualitas lingkungan perikanan semakin terpelihara dengan indikasi semakin terkendalinya pencemaran perairan dari limbah industri dan rumah tangga.

Perkembangan kualitas SDM, struktur ekonomi yang makin mantap dan kepastian hukum yang semakin baik dan transparan, mendorong investasi daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Peningkatan investasi ini diikuti oleh meluasnya pengembangan sarana penunjang perdagangan melalui pengembangan jaringan informasi produksi, dan pasar dalam skala nasional dan internasional.

Berbagai produk andalan dan investasi yang makin berkembang memerlukan pemasaran yang luas sehingga peran perdagangan menjadi sentral. Industri mulai mapan dan kawasan industri maupun KEKI telah berkembang. Struktur industri mulai mapan, perkembangan produk hulu – hilir makin berkembang dan berkaitan. Perdagangan produk unggulan makin berkembang, kerjasama antar wilayah dan negara dalam menjalin perdagangan makin mapan dan kontinyu, serta neraca perdagangan semakin positif. Dalam tahap ini peran BUMD dalam mengembangkan ekonomi semakin penting dan makin terwujud kemitraan antara BUMD dengan mitra usaha lainnya sekaligus sebagai salah satu sumber PAD.

Peran koperasi dan UKM dalam perdagangan dan perindustrian menjadi semakin penting, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha bidang perdagangan dan perindustrian. Selanjutnya semakin terbentuk kemitraan dalam pemenuhan bahan baku, proses produksi dan jaminan pasar untuk menjamin kontinuitas produk.

Pariwisata di Kalimantan Timur semakin meningkat perannya, terutama wisata berbasis ekologi atau ecotourism, budaya dan alam. Jaringan wisata nasional dan internasional semakin mantap yang ditandai oleh adanya integrasi antar kunjungan wisata, semakin berkembangnya akomodasi dan industri wisata. Kemasan wisata yang makin menarik melalui pengembangan jalur wisata dan kalender wisata yang makin menarik dikemas. Obyek wisata yang ada semakin tertata dan memiliki ciri yang khas sehingga secara keseluruhan membentuk atraksi yang saling melengkapi. Pengelolaan pariwisata semakin membaik, yang ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas SDM dan manajemen kepariwisataan.

Pertambangan dan migas sampai tahap ini tetap memiliki peran penting dalam perekonomian meskipun secara proporsional dan bertahap menurun perannya. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan peningkatan efisiensi melalui diversifikasi dan pengolahan sisa penambangan serta peningkatan nilai tambah migas. Selanjutnya pengelolaan hasil-hasil penambangan dan migas yang ada semakin dikembangkan lebih efisien dan terkendali.

### c. Prasarana Dasar.

Peran transportasi darat semakin penting sebagai penghubung antar pusat permukiman dan pusat produksi yang ditandai oleh semakin banyaknya panjang jalan yang dibangun, semakin terpeliharanya jaringan jalan yang ada, serta semakin berkembangnya angkutan darat antar wilayah, antar provinsi maupun pada

kawasan perbatasan/pedalaman. Permukiman dan sentra produksi memiliki akses darat yang semakin baik dengan pusat pemasaran. Dalam skala luas pengembangan jaringan jalan ini dibangun secara lebih terpadu dengan sistem transportasi lain. Antara pusat pengolahan atau kawasan industri dan kawasan perkotaan yang intensitasnya sangat tinggi dengan kawasan pelabuhan laut dan bandar udara dapat dikembangkan jalan tol.

Peningkatan ekonomi dalam tahap ini akan lebih didukung oleh perkembangan transportasi khususnya sebagai gerbang ekspor-impor, yang ditandai oleh semakin besarnya nilai ekspor-impor. Pelabuhan laut akan semakin berperan dalam mendorong kelancaran distribusi barang dan manusia, yang ditandai oleh makin besarnya bongkar-muat di pelabuhan.

Transportasi udara pada tahap ini sudah menjadi kebutuhan utama baik untuk pergerakan lokal, nasional, maupun internasional. Bandara perintis sampai internasional telah memasuki masa mapan yang ditandai oleh semakin lancarnya pelayanan penerbangan, semakin bertambahnya peran bandara udara dalam mendorong ekspor, dan semakin baiknya hubungan intermoda di Kalimantan Timur.

Sistem irigasi semakin mampu mendorong pencetakan sawah baru, meningkatkan produk pertanian, yang ditandai oleh semakin besarnya produk pertanian. Perbaikan irigasi ini telah dapat menunjang swasembada pangan. Penyediaan pangan yang mandiri sangat didukung oleh perkembangan irigasi, yang ditandai oleh semakin mapannya sistem irigasi, semakin luasnya sawah yang dapat diairi, semakin besarnya produk pertanian, dan semakin optimalnya pemanfaatan sumberdaya air. Pemanfaatan irigasi ini semakin didukung oleh pengembangan bendungan dan waduk/embung sebagai cadangan air.

Perkembangan ekonomi dan kegiatan masyarakat yang menuju kemapanan dalam pembentukan masyarakat sejahtera juga semakin didukung oleh pasokan listrik yang lebih baik. Peningkatan pasokan melalui pembuatan pembangkit baru, pengembangan jaringan yang saling berhubungan atau interconnected system, serta diversifikasi sumber pembangkit menjadikan tahap ini tidak kekurangan pasokan pada saat beban puncak terjadi. Pada wilayah yang tersebar dalam jumlah kecil masih dilayani oleh PLTD secara mandiri yang jumlahnya semakin berkurang karena pasokan dari **interconnected** system semakin luas jangkauannya.

**d. Politik, Pemerintahan dan Penegakkan Hukum.**

Pada tahap ketiga ini peran pemerintah terus meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitasnya semakin nyata. Efisiensi tingkat pelayanannya telah sama dengan rata-rata nasional, standar pelayanan dan jumlah perangkat daerah telah terpenuhi. Kualifikasi sumberdaya manusia dalam bidang ini sudah baik, yang ditandai oleh tingkat pendidikan pegawai yang lebih tinggi, setiap bidang memiliki spesifikasi keahlian yang memadai, serta pada daerah terpencil, terisolir, pedalaman dan perbatasan juga memiliki pelayanan yang sudah memenuhi standar.

Pada tahap ketiga berbagai perangkat hukum telah memiliki infrastruktur sarana dan prasarana hukum yang memadai, baik pada wilayah yang telah maju maupun baru termasuk wilayah perbatasan. Pada tahap ini penegakan hukum sudah lebih efektif dijalankan, kualitas SDM bidang hukum sudah baik yang ditandai oleh peningkatan kualitas SDM melalui berbagai penyelenggaraan pelatihan,

pendidikan, bagi aparat hukum. Berbagai regulasi bidang hukum juga lebih dapat dilaksanakan secara efektif, demikian juga alokasi anggaran APBD di sektor hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat telah memadai.

Peran media masa telah mendekati pola mapan dan proporsional serta seimbang dalam memberikan informasi tentang pembangunan dan kemasyarakatan dan dunia usaha. Media cetak maupun elektronik telah mendapat tempat yang proporsional, penyelenggaraan terbuka dan bertanggungjawab, serta kualitasnya semakin lebih baik. Salah satu bagian dalam pengembangan peran media masa adalah ditandai dengan adanya kajian ilmiah dan teknologi tepat guna atau populer.

**e. Penataan Ruang dan Lingkungan.**

Pada tahap ini kaidah penataan ruang mulai dipahami dengan cukup baik oleh masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha, sehingga berbagai program pembangunan diarahkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Secara lebih spesifik, struktur ruang yang dibentuk menunjukkan terbentuknya keseimbangan perkembangan antara perkotaan dan perdesaan yang didukung oleh prasarana yang memadai, telematika telah berkembang sampai tingkat perdesaan, dan kegiatan ekonomi utama semakin mendukung perkembangan wilayah. Keseimbangan fungsi kawasan budidaya dan lindung yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah semakin terwujud yang ditandai oleh semakin kecilnya penyimpangan pemanfaatan ruang. Berbagai program pembangunan juga semakin mengacu pada tata ruang wilayah. Penataan ruang yang makin kondusif ini akan semakin mendorong minat investasi daerah, yang ditandai oleh semakin berkembangnya kawasan strategis dan kawasan ekonomi khusus, maupun pusat-pusat produksi semakin diminati oleh investor.

Kawasan perbatasan semakin tertangani dengan baik yang ditandai oleh lebih terbukanya jalur ekonomi dan kegiatan unggulan semakin berkembang, dan yang terpenting ketertinggalan dengan negara tetangga sudah semakin rendah. Pada tahap ini kemandirian kawasan perbatasan khususnya permukiman masyarakat semakin tinggi yang ditandai oleh semakin berkembangnya pusat-pusat kegiatan masyarakat, serta fasilitas dan utilitas umum telah terpenuhi dengan baik.

Seiring dengan meningkatnya kegiatan perekonomian, dan kesadaran akan kualitas lingkungan hidup, maka kualitas permukiman di berbagai wilayah juga semakin baik yang ditandai oleh terpenuhinya perumahan masyarakat berpendapatan rendah, meningkatnya kualitas permukiman secara rata-rata, serta semakin berkurangnya permukiman Kumuh. Berbagai permukiman tradisional yang ada juga tetap terjaga, sebagian merupakan aset wisata dan budaya, dengan kualitas lingkungan yang lebih sehat.

Permukiman transmigrasi semakin menunjukkan peningkatan kualitas yang ditandai oleh semakin mapannya tingkat hunian, sebagian kawasan transmigrasi telah tumbuh menjadi kawasan perdesaan dan memiliki fungsi sebagai pusat perekonomian. Beberapa permukiman transmigrasi yang potensial telah terbentuk sebagai pusat perekonomian baru yang mampu berkembang sebagai pusat agroindustri dan agrobisnis.

Seiring dengan meningkatnya pengetahuan akan lingkungan hidup bagi masyarakat, maka kesadaran akan keseimbangan alam juga semakin baik, sehingga berbagai upaya pelestarian sumberdaya sudah dilakukan dengan kesadaran yang tinggi. Pendidikan lingkungan sudah mulai terintegrasi dalam

pendidikan formal dan berbagai kegiatan masyarakat dan hal tersebut ditunjukkan oleh semakin menurunnya perusakan alam, meningkatnya kualitas lingkungan, dan semakin tegaknya hukum bagi pelaku perusakan lingkungan. Amdal sudah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Berbagai upaya pengembalian kualitas lingkungan yang rusak semakin tertangani dengan baik, dan berbagai upaya penyelamatan lingkungan juga dilakukan dengan kesadaran yang tinggi.

#### 4. RPJM Ke-4 (2019-2023).

Berdasarkan pencapaian pembangunan selama tiga periode yang dilaksanakan secara konsisten, maka RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera di segenap wilayah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Dalam RPJM ke-4 ini dicirikan oleh mantapnya berbagai sistem pembangunan, kemandirian dan daya saing daerah yang makin tinggi, tingkat perkembangan wilayah berada diatas rata-rata nasional dan secara umum mampu bersaing dalam lingkup Asean bahkan pada beberapa bagian bahkan sudah mampu bersaing dalam skala Asia-Pasific. Secara Umum kualitas SDM sudah baik dengan tingkat pendidikan keahlian dan ketrampilan yang memadai; perekonomian tumbuh diatas rata-rata nasional dengan tingkat ketimpangan yang rendah; prasarana dan sarana dasar telah menjangkau ke segenap pelosok wilayah; pemerintahan yang berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabilitasnya tinggi diikuti penegakan hukum tanpa pandang bulu; serta penataan ruang menjadi acuan pengembangan wilayah dengan keseimbangan ekosistem yang baik dan terjaganya keanekaragaman hayati yang tinggi.

##### a. Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Kualitas SDM dalam periode ini sudah berada dalam kondisi mapan, tingkat dan kualitas pendidikan membaik, kesehatan rata-rata masyarakat tinggi, peran wanita dan pemuda dalam berbagai program pembangunan semakin menampakkan hasil. Dalam konteks ini kemandirian masyarakat telah mencapai tingkat mapan, dan daya saingnya tinggi.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan telah ada dalam tingkat kesadaran yang tinggi yang ditunjukkan oleh pelaksanaan pendidikan ke segenap wilayah telah mencapai 12 tahun dan pendidikan tinggi sudah merupakan kebutuhan. Mayoritas penduduk dalam usia sekolah (dan kuliah) mengenyam dunia pendidikan dengan spesialisasi yang lebih terfokus pada kebutuhan pasar kerja. Sekolah unggulan dan sekolah kejuruan telah berkembang di setiap wilayah, serta kualitas pendidikan umumnya telah ada diatas rata-rata nasional, dan pada pendidikan bertaraf internasional. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat dan nilai kelulusan yang ada diatas rata-rata nasional, kualitas pengajar pendidikan dasar dan menengah telah berpendidikan minimal S1, dan pembinaan - pelatihan telah berjalan menerus.

Lebih lanjut perkembangan kualitas SDM ini terus ditopang oleh litbang dan iptek yang juga merupakan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Kebutuhan akan litbang dan iptek ini terus mendorong berbagai lembaga untuk memanfaatkan jasa tersebut, dan berbagai produk litbang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini ditandai oleh semakin berkembangnya wacana tentang perlunya penggunaan hasil penelitian, serta makin munculnya litbang dan penggunaan iptek canggih pada lembaga pemerintah dan swasta.

Pada tahap ini perbaikan pendidikan dan pengetahuan masyarakat juga menjadikan kesadaran akan kesehatan terus meningkat, perilaku hidup sehat telah memasyarakat. Pelayanan kesehatan berupa fasilitas kesehatan serta tenaga medis-paramedis telah terdistribusi dengan baik yang ditandai oleh semakin mudahnya masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, dan hal ini juga terjangkau oleh masyarakat miskin. Peningkatan derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat ini ditandai oleh semakin tingginya usia harapan hidup rata-rata masyarakat yang mencapai diatas rata-rata nasional, jumlah kematian ibu saat melahirkan semakin kecil, wabah semakin dini dapat diatasi, dan perilaku hidup sehat masyarakat juga semakin baik. Secara umum pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat termasuk dalam pelayanan prima.

Pembangunan yang telah dilaksanakan dalam tiga periode sebelumnya meningkatkan indeks pembangunan manusia dan daya saing semakin tinggi, pendapatan masyarakat semakin membaik, serta spesialisasi tenaga kerja semakin terbentuk. Pola ini secara keseluruhan akan semakin mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja baik dalam pengetahuan maupun keahlian, semakin kecilnya angka pengangguran, dan secara umum produktivitas kerja juga semakin membaik. Penyediaan tenaga kerja yang memadai dan handal sudah tersedia di Kalimantan Timur yang sesuai dengan arah pengembangan ekonomi makro. Tenaga kerja dengan keahlian spesifik sesuai bidang pembangunan dapat dipenuhi oleh masyarakat setempat. Peningkatan kemampuan di berbagai bidang ini juga semakin membuka peluang usaha dibidang telematika, dan berbagai jasa umum dan konstruksi semakin berkembang dengan cukup baik. Dalam tahap ini kegiatan kewirausahaan makin nyata dan sebagian besar masyarakat tidak lagi bergantung pada sektor formal.

Peningkatan partisipasi wanita dalam berbagai bidang pembangunan semakin mantap dan kesetaraan gender semakin menunjukkan peran wanita dalam politik, pemerintahan dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Selanjutnya peran pemuda juga menunjukkan perkembangan yang semakin membaik, organisasi pemuda di bidang organisasi kemasyarakatan, seni dan olahraga juga semakin berkembang, bukan hanya pada tingkat kabupaten/kota akan tetapi sampai pada tingkat kecamatan dan desa. Berbagai peningkatan prestasi bidang olahraga unggulan Kalimantan Timur juga semakin membaik yang ditandai oleh semakin meningkatnya peringkat dalam skala nasional, semakin banyaknya pertandingan dan eksebisi, serta bertambah semaraknya organisasi atau perkumpulan kepemudaan berbasis olahraga.

Dalam periode atau RPJM ke-4 ini bidang keagamaan menunjukkan semakin baiknya kerukunan antar umat beragama, kegiatan keagamaan semakin marak yang ditandai oleh semakin banyaknya kegiatan keagamaan oleh masyarakat, dan fasilitas peribadatan semakin merata dan berkembang sesuai

kebutuhan masing-masing pemeluk agama. Sekolah keagamaan semakin mapan dan mampu bersaing dalam skala nasional, dan terdistribusi ke berbagai daerah.

Dalam tahap ini kualitas SDM secara umum semakin membaik demikian juga dengan kesejahteraan sosial masyarakat, yang ditandai oleh semakin berkurangnya anak terlantar dan anak asuh, dimana anak asuh dan terlantar semakin mendapat pelayanan sosial yang setara dengan anak lain. Pemerintah daerah dapat menyantuni berbagai kebutuhan masyarakat yang kurang beruntung dan semakin meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

**b. Pengembangan Ekonomi Wilayah.**

Perubahan struktur ekonomi masyarakat sudah menunjukkan pola yang semakin mapan, investasi sektor produktif semakin meningkat, pertanian dalam arti luas semakin menjadi tumpuan, ketergantungan pada sumberdaya alam primer yang tidak terbarukan semakin berkurang, industri pengolahan semakin berperan dalam memantapkan struktur perekonomian dari hulu sampai hilir dan keterkaitan antar sektor makin tinggi, sektor perdagangan dan jasa semakin meningkat perannya dalam lingkup nasional dan internasional dengan indikasi neraca perdagangan internasional yang positif, dan secara keseluruhan menunjukkan keamanan struktur ekonomi dalam periode ke empat tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perekonomian semakin tinggi, dan masyarakat banyak semakin tergabung dalam koperasi dan berbagai UKM.

Pelaksanaan pembangunan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura dalam tahap ini menunjukkan bahwa penyediaan lahan baik pada lahan sawah – tegal maupun gambut untuk kebutuhan pangan dan hortikultura telah dapat dipenuhi secara mandiri, ketahanan pangan sudah mapan, beberapa produk unggulan sudah diekspor dalam kemasan yang memenuhi standar perdagangan. Diversifikasi pangan sudah dikenal masyarakat dan didukung oleh teknologi pangan yang memenuhi standar kesehatan. Pada tahap ini perkembangan pertanian dan hortikultura telah ditunjang oleh sistem pemasaran dalam sistem jaringan nasional dan internasional. Agropolitan sistem menjadi andalan pengembangan, infrastruktur pertanian telah mapan. Kegiatan pertanian berbasis pada agribisnis dan agro industri yang memberi nilai tambah produk pertanian semakin terarah.

Pada RPJM ke – 4 ini perkebunan unggulan telah menjadi salah satu tumpuan ekonomi wilayah, memiliki daya saing tinggi di pasaran nasional dan internasional. Peran perkebunan menjadi lebih penting, karena mampu mengembangkan bidang lain dengan berkembangnya industri pengolahan dari hulu-hilir dengan pangsa pasar ekspor. Pengembangan perkebunan ini juga ditandai oleh berbagai diversifikasi hasil, menyerap tenaga kerja yang makin baik, membentuk pusat permukiman berbasis perkebunan, serta mampu menjadi pusat pengembangan teknologi bidang perkebunan. Pada tahap ini, kerjasama dengan berbagai stakeholders semakin mantap dan masyarakat semakin mendapatkan nilai tambah dari pengembangan perkebunan.

Sumberdaya hutan yang telah dikelola selama tiga periode dalam RPJM ke – 4 ini dapat dikategorikan sebagai pengelolaan lestari dan terkontrol oleh stakeholders, kawasan hutan lindung semakin berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan hidup dan memiliki keanekaragaman hayati yang makin tinggi; sementara hutan produksi semakin dikelola dengan arif dan efisien. Ekspor bahan mentah sudah tidak dilakukan, pengolahan hasil hutan dilakukan dengan rangkaian

yang lebih panjang dan nilai ekonomisnya juga lebih tinggi. Penegakan hukum terhadap pelaku liar penebangan kayu sudah dapat ditangani dengan lebih sistematis. Penanganan kerusakan tanah pasca penebangan hutan semakin tertangani yang dilaksanakan melalui program reboisasi terus menerus. Partisipasi masyarakat disekitar kawasan hutan sudah mendukung pada pembentukan dan pengelolaan hutan lestari.

Pengembangan peternakan dalam RPJM ke – 4 ini sudah ada pada kondisi yang mantap, mulai dari bibit ternak unggul sampai pengolahan produk ternak sudah dapat dilakukan secara mandiri, diversifikasi produk peternakan dan pengolahannya merupakan sebuah rangkaian menerus dari pengembangan peternakan. Pada tingkat ini beberapa produk ternak sudah diolah dan menjadi komoditas ekspor. Indikator keberhasilan ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas produk peternakan, industri produk ternak menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat dan berbagai penyakit ternak sudah dapat dideteksi secara dini dan ditanggulangi dengan dini pula. Tenaga ahli bidang peternakan semakin meningkat jumlahnya, dan lembaga penelitian dan penyediaan bibit ternak unggulan semakin berkembang, serta kotoran ternak sudah dapat diolah menjadi pupuk kandang dalam kemasan yang mudah didistribusikan.

Pada tahap ini bidang kelautan dan perikanan memiliki peran semakin penting dengan pengambilan hasil kelautan yang mendukung laut lestari, didukung oleh teknologi yang memadai, pemasaran ikan bukan hanya ikan segar, tetapi juga ikan olahan. Hal ini berarti juga industri pengolahan ikan semakin berkembang. Untuk ini maka investasi bidang perikanan terus dipromosikan, pembinaan untuk peningkatan kualitas SDM semakin ditingkatkan, penggunaan sarana dan prasarana perikanan semakin canggih, dan kelembagaan yang lebih mapan. Sentra-sentra produksi perikanan juga semakin berkembang, kualitas lingkungan permukiman nelayan semakin baik dan pencemaran perairan dari limbah industri dan rumah tangga pengolah ikan semakin terkendali.

Berbagai kemudahan dalam penanaman modal atau investasi yang kondusif semakin meningkatkan minat investasi daerah diberbagai bidang, baik dari dalam maupun luar negeri. Pembentukan kawasan ekonomi potensial, kawasan strategis yang dipromosikan makin diminati investor, yang perlu terus dijaga kondisinya. Promosi berbagai peluang investasi mudah diakses melalui sarana elektronik maupun melalui promosi langsung.

Perkembangan perindustrian telah mendorong terciptanya struktur ekonomi yang mantap, pertumbuhan yang besar diatas rata-rata nasional dan ada pada rata-rata Asean. Produk unggulan daerah sudah dapat bersaing dalam pasar Asean sedangkan pengembangan kawasan industri dan KEKI telah menembus pasar Asia-Pasific. SDM perindustrian telah memiliki spesialisasi yang tinggi dengan dukungan kelembagaan yang mendorong pengembangan SDM dan kegiatan perindustrian. Secara umum perdagangan telah memasuki pasar ekspor utama Asia-Pasific, terdapat kerjasama regional yang baik dan neraca perdagangan yang makin positif. Peran BUMD sudah mapan, berbagai program kemitraan antara BUMD dengan berbagai lembaga semakin meningkat. Peran koperasi dan UKM dalam perdagangan dan perindustrian sudah ada dalam tingkat mapan, pelaku usaha bidang perdagangan dan perindustrian semakin meningkat yang pelakunya adalah masyarakat sendiri.

Pemeliharaan kualitas lingkungan yang semakin baik dan budaya yang makin terpelihara menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan memiliki peran makin penting dalam meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat. Wisata berbasis ekologi atau ecotourism, budaya dan alam makin diminati masyarakat luar negeri, jaringan wisata nasional dan internasional sudah terbentuk sehingga Kalimantan Timur sudah masuk dalam tujuan utama wisata Indonesia. Kalender wisata sudah menjadi bagian dari perjalanan wisatawan nusantara dan mancanegara. Akomodasi wisata dan industri wisata memiliki ciri atau muatan lokal yang makin menarik. Obyek wisata memiliki ciri khas yang saling melengkapi, keanekaragaman hayati semakin melengkapi daya tarik wisata yang sudah berkembang. Pengelolaan pariwisata semakin membaik, yang ditandai oleh semakin tingginya spesialisasi keahlian bidang pariwisata dan arah kebijakan pengembangan wisata didukung oleh berbagai sektor lain sebagai satu sistem pembangunan yang utuh.

Pada tahap ke-empat ini pertambangan dan migas tetap memegang peran penting yang secara proporsional menunjukkan penurunan jumlah produksi tetapi diikuti peningkatan kualitas pengolahan. Selanjutnya peningkatan efisiensi tetap dilakukan secara menerus, diversifikasi dan pengolahan sisa penambangan semakin dilakukan secara intensif. Pengembangan migas telah mampu mengeksplot pengolahan hasil sebagai industri hilir. Berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup dalam jangka panjang, maka setiap area bekas tambang ditingkatkan kualitasnya melalui penghijauan untuk kawasan lindung maupun budidaya.

#### c. **Prasarana Dasar.**

Pembangunan yang ada pada tahap yang mapan menjadikan transportasi darat memiliki peran sangat penting dan hubungan antar pusat permukiman dan pusat produksi sudah terhubung secara keseluruhan. Hal ini ditandai oleh telah terwujudnya jalan lintas Kalimantan, jalan dalam provinsi dan negara yang dibangun sudah mencapai pelosok, telah dikembangkan jalan antar provinsi, maupun pada kawasan perbatasan. Jalan yang telah dibangun dapat dipelihara secara memadai. Permukiman perkotaan dan perdesaan serta sentra produksi memiliki akses darat yang semakin baik ditandai oleh semakin baiknya kondisi jalan sebagai penghubung dengan pusat produksi. Pengembangan jaringan jalan ini terus dipacu untuk membentuk sistem intermoda yang lebih baik. Jalan tol sudah terwujud terutama sebagai penghubung antara pusat pengolahan atau kawasan industri dan kawasan perkotaan yang intensitasnya sangat tinggi, dengan kawasan pelabuhan laut dan bandar udara.

Pada tahap ini pelabuhan laut yang ditetapkan telah berfungsi secara penuh yang bermanfaat dalam mendorong perdagangan dalam skala nasional maupun internasional melalui kegiatan ekspor – impor. Pelabuhan yang berskala regional dan nasional maupun pelabuhan perintis telah mapan sesuai dengan fungsi masing-masing. Berbagai deregulasi bidang kepabeanaan akan mendorong volume perdagangan antar wilayah yang tentunya akan melalui pelabuhan laut.

Perkembangan kegiatan antar wilayah lebih mendorong aktivitas transportasi udara dan transportasi udara merupakan kebutuhan utama baik untuk pergerakan lokal, nasional, maupun internasional. Bandara perintis sampai internasional telah dapat melayani dengan lebih efisien dan lebih baik, frekuensi

penerbangan semakin banyak dan jumlah bongkar muat barang dan orang juga terus meningkat.

Peningkatan produktivitas tanah untuk pertanian semakin meluas dan sistem irigasi semakin mampu mengairi dalam jangka panjang serta dapat mengairi sawah yang diperluas. Perbaikan irigasi ini ditandai oleh kemampuan penyediaan pangan secara mandiri bahkan sudah dapat mengekspor. Sebagai pendukung pengembangan irigasi ini pembangunan bendungan dan waduk/embung juga semakin bertambah jumlahnya.

Persediaan energi listrik telah mencapai tahap mapan, pasokan listrik untuk permukiman perkotaan dan perdesaan, kawasan industri dan berbagai kebutuhan lain telah dapat dipenuhi meskipun pada saat beban puncak. Pengembangan sistem terpadu, diversifikasi sumber pembangkit dan sistem pengamanannya telah memenuhi standar kebutuhan. Hanya sebagian wilayah yang tersebar dalam jumlah kecil masih ditangani oleh PLTD Mandiri.

**d. Politik, Pemerintahan dan Penegakkan Hukum.**

Pada tahap ini pemerintahan telah berjalan dengan mapan, dalam memberikan pelayanan pada masyarakat telah berlaku prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitasnya pada berbagai sektor. Proses perijinan telah berjalan dengan cara yang lebih sederhana, sehingga lebih mendorong investasi daerah. Berbagai proses debirokratisasi terus dijalankan dengan cara yang lebih bertanggungjawab, pelayanan publik sudah menyentuh wilayah terpencil, terisolir, pedalaman dan perbatasan. Kualitas SDM juga semakin meningkat yang ditandai oleh penggunaan alat yang lebih canggih, organisasi yang lebih sederhana dan tingkat kecepatan pelayanan yang lebih hemat waktu.

Pada tahap ke empat ini bidang hukum telah menduduki tempat sentral dalam perikehidupan. Hal ini ditunjukkan oleh semakin lengkapnya perangkat hukum pada berbagai wilayah. Penegakan hukum sudah berjalan dengan lebih efektif dimana kualitas SDM bidang hukum sudah baik yang ditandai oleh peningkatan kualitas SDM dengan semakin baiknya tingkat pendidikan bagi aparat hukum, dan kesadaran masyarakat akan hukum juga semakin membaik. Berbagai deregulasi bidang hukum juga lebih banyak dihasilkan, dan alokasi anggaran untuk bidang hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat telah cukup untuk melaksanakan berbagai tindakan hukum yang diperlukan.

Media masa telah memiliki pola yang mapan dan telah berperan secara proporsional serta seimbang dalam memberikan informasi tentang pembangunan dan kemasyarakatan dan dunia usaha. Berbagai media cetak dan elektronik telah menjadi bagian kebutuhan pokok masyarakat yang pelaksanaannya lebih dilakukan dengan cara proporsional, terbuka dan bertanggungjawab. Berbagai kajian ilmiah dan teknologi tepat guna atau populer lebih mendapatkan tempat dan juga berkembang.

**e. Penataan Ruang dan Lingkungan.**

Pelaksanaan pembangunan selama tiga tahap telah menunjukkan hasil yang makin baik. Berbagai pelaksanaan program pembangunan lebih mengacu pada rencana tata ruang wilayah. Masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha lebih memiliki pemahaman yang baik tentang rencana tata ruang. Hal ini dapat

dilihat dari semakin banyaknya produk turunan dari rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota dalam bentuk rencana detail-teknis ruang tertentu.

Berbagai program pembangunan juga lebih bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Struktur ruang wilayah dalam skala Provinsi dan Kabupaten/Kota menunjukkan terbentuknya keseimbangan yang lebih baik, angka kesenjangan yang makin menurun, dan berbagai prasarana dasar sudah melayani perkembangan kegiatan ekonomi utama seperti pada kawasan industri, kawasan andalan, kawasan ekonomi khusus, dan sebagainya. Keseimbangan fungsi kawasan budidaya dan lindung semakin mantap sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan penyimpangan pemanfaatan ruang semakin terkendali yang ditandai oleh menurunnya penyimpangan pemanfaatan ruang. Konsistensi terhadap penataan ruang ini juga semakin mendorong investasi daerah sesuai dengan potensi masing-masing.

Kawasan perbatasan semakin berkembang, jalur ekonomi regional semakin seimbang dalam pengertian terdapat keseimbangan transaksi dan orientasi antara kawasan perbatasan Kalimantan Timur dengan negara tetangga. Permukiman di perbatasan sudah memiliki kualitas yang baik atau dengan kata lain kesenjangan perkembangan permukiman perbatasan sudah dapat diatasi. Pusat-pusat kegiatan masyarakat telah berkembang dan berbagai fasilitas dan utilitas umum telah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Semakin meningkatnya indeks kualitas SDM menjadikan pendapatan juga meningkat dan kesadaran lingkungan juga semakin baik sehingga kualitas permukiman di berbagai wilayah juga semakin baik dan memenuhi standar kesehatan lingkungan hunian. Masyarakat berpendapatan rendah dapat menyediakan rumah layak dengan lingkungan yang memadai, serta pemukiman kumuh semakin dapat ditangani. Permukiman tradisional yang menyimpan berbagai nilai budaya tetap terjaga dengan baik, masyarakat juga mendapat keuntungan dari permukiman tradisional mereka diantaranya sebagai aset wisata.

Permukiman transmigrasi semakin berkembang yang ditunjukkan oleh peningkatan kualitas hunian yang semakin sempurna, meningkatnya kegiatan masyarakat, pasar lokal yang makin maju dan beberapa kawasan transmigrasi tumbuh menjadi kawasan kota terpadu mandiri sebagai pusat perekonomian dengan jaringan regional, nasional dan internasional. Hal ini ditandai dengan permukiman transmigrasi yang potensial dan telah terbentuk pusat perekonomian baru yang terus berkembang sebagai sentra pemasaran baru sekaligus semakin berperan sebagai pusat agroindustri dan agrobisnis.

Pada tahap ke-empat ini pengetahuan masyarakat akan lingkungan hidup semakin baik, kepatuhan akan pengelolaan juga semakin meningkat, dan upaya menjaga keseimbangan alam juga semakin baik. Berbagai upaya penyelamatan lingkungan hidup terus dilakukan, perlindungan flora dan fauna yang termasuk dalam katagori dilindungi terus dilakukan dan biodiversity semakin terjaga. Berbagai kegiatan berkaitan dengan alam dan penyelamatan lingkungan terus berkembang, pendidikan lingkungan dilakukan dengan terintegrasi dalam pendidikan formal dan berbagai kegiatan masyarakat. Penegakan hukum bagi perusak lingkungan semakin ditegakkan. Berbagai ketentuan dalam pengelolaan lingkungan sudah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan pembangunan.

## 5. RPJM ke-5 (2024-2025).

Pencapaian pembangunan yang telah dicapai dalam empat periode, maka tahap ke-5 ditujukan untuk memantapkan perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi segenap masyarakat Kalimantan Timur yang ditandai oleh kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, struktur ekonomi yang mapan antar sektor dan antar wilayah dengan partisipasi masyarakat yang luas dan dominan, pelayanan dasar telah melayani masyarakat dengan mapan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dengan penegakan hukum yang sangat baik, dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan kaidah lingkungan hidup.

Dalam tahap ke-5 ini ditunjukkan oleh mantapnya berbagai sistem pembangunan, kemandirian dan daya saing daerah tinggi dengan tingkat perkembangan diatas rata-rata nasional dan sudah mampu bersaing dalam lingkup ASEAN serta beberapa bagian telah bersaing dengan sangat sehat dalam skala Asia-Pasific. Kualitas SDM sudah baik dengan tingkat pendidikan keahlian dan ketrampilan yang memadai dan dapat dipenuhi oleh wilayah setempat; perekonomian tumbuh diatas rata-rata nasional dengan tingkat ketimpangan yang sangat rendah; prasarana dan sarana menjangkau kesegenap pelosok wilayah dan wilayah unggulan dan strategis telah memiliki prasarana yang unggul; pemerintahan berjalan dengan efisien, efektif, transparan dengan akuntabilitas yang tinggi serta penegakan hukum dilaksanakan dengan tegas sesuai aturan; serta penataan ruang menjadi acuan utama.

### a. Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Kualitas sumberdaya manusia dalam tahap ini sudah memiliki daya saing yang tinggi, pendidikan sudah merupakan kebutuhan dengan kualitas diatas rata-rata nasional, kesehatan masyarakat sangat baik dengan kualitas pelayanan prima, peran perempuan dan pemuda dalam pelaksanaan pembangunan semakin mapan. Kemandirian masyarakat Provinsi Kalimantan Timur telah mapan, dan memiliki daya saing tinggi diatas rata-rata nasional.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan telah mencapai 12 tahun dan pendidikan tinggi sudah berkembang di setiap daerah. Pendidikan tinggi spesialis telah berkembang dan dapat mendukung kebutuhan pasar kerja. Pendidikan unggulan dan sekolah kejuruan telah mapan dan berkembang di setiap wilayah.

Peningkatan kualitas SDM melalui pemanfaatan dan pengembangan litbang dan iptek sudah memasyarakat dan menjadi kebutuhan dasar dunia usaha dan pemerintahan. Wacana pemanfaatan hasil penelitian dengan iptek canggih sudah menjadi kebutuhan masyarakat, lembaga pemerintah dan dunia usaha.

Kesadaran akan kesehatan masyarakat sangat tinggi, pelayanan kesehatan berupa fasilitas kesehatan serta tenaga medis-paramedis telah menjangkau pedalaman dengan kualitas memadai. Berbagai indikator kesehatan seperti: peningkatan derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat, usia harapan hidup, jumlah kematian ibu saat melahirkan, wabah atau endemi umumnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat sudah pada tingkat pelayanan prima.

Kualitas tenaga kerja semakin baik, angka pengangguran sangat kecil, produktivitas kerja di berbagai bidang juga tinggi. Tenaga kerja yang berkeahlian spesifik sudah memenuhi berbagai peluang usaha. Berbagai peluang usaha sangat didukung dan bergantung pada teknologi tinggi. Pada tahap ini kegiatan

kewirausahaan sangat mandiri dengan tidak dijumpainya perbedaan yang mendasar antara kegiatan di bidang usaha formal maupun informal.

Partisipasi perempuan dalam kehidupan dan berbagai bidang pembangunan sudah sangat mapan dengan kesetaraan gender yang baik. Peran perempuan dalam organisasi sosial kemasyarakatan, politik, pemerintahan dan berbagai bidang pembangunan sudah terlihat nyata. Organisasi pemuda, kesenian dan olahraga sudah sangat berkembang yang berdaya saing sampai tingkat nasional dan Asean.

Pada tahap ini bidang keagamaan menunjukkan kerukunan antar umat beragama yang semakin membaik, kegiatan keagamaan berlangsung tanpa hambatan dengan toleransi yang tinggi. Fasilitas peribadatan telah berkembang secara merata sesuai kebutuhan masing-masing pemeluk agama.

Peningkatan kualitas SDM secara umum semakin membaik dan kesejahteraan sosial masyarakat juga telah mapan. Jumlah anak terlantar dan anak asuh semakin sedikit dengan pelayanan sosial yang setara dengan anak lain. Masyarakat miskin dan korban bencana telah ditangani dengan cara sistemis.

#### **b. Pengembangan Ekonomi Wilayah.**

Perkembangan ekonomi wilayah sudah ditunjukkan oleh struktur yang mapan, baik dalam pengertian keterkaitan hulu–hilir, keterkaitan antar sektor, maupun antar wilayah. Pada tahap ini Provinsi Kalimantan Timur sudah memiliki daya tarik tinggi untuk investasi. Pengolahan hasil pertanian menjadi penting dan cukup dominan, ketergantungan pada sumberdaya alam primer sangat dibatasi, industri pengolahan berbagai sektor telah mapan, sektor perdagangan dan jasa berperan besar dalam meningkatkan ekspor – impor dengan neraca yang surplus, neraca perdagangan internasional yang positif, dan struktur ekonomi tidak lagi bertumpu pada sektor-sektor primer, yang didukung oleh partisipasi masyarakat yang tinggi, serta koperasi dan UKM telah mapan.

Dalam bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura mandiri dan beberapa sektor unggulan telah menjadi komoditas ekspor, ketahanan pangan sudah mapan. Pengembangan kawasan agropolitan menjadi tumpuan pengembangan kawasan perdesaan; serta agribisnis dan agro industri menjadi andalan Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tahap ini perkebunan unggulan sudah menjadi tumpuan ekonomi wilayah yang berdaya saing tinggi di pasaran nasional dan internasional. Diversifikasi pengembangan perkebunan mampu mendorong pengembangan berbagai bidang diantaranya industri pengolahan, peternakan, transportasi dan lain-lain. Pada tahap ini, kerjasama pengembangan perkebunan memiliki nilai tambah yang besar dalam berbagai sektor termasuk kemampuannya dalam penyerapan tenaga kerja.

Sumberdaya hutan dalam tahap ini sudah dikelola dengan prinsip lestari dan seimbang, pemanfaatannya diawasi masyarakat dan pemerintah, keanekaragaman hayati menunjukkan diversifikasi yang makin meluas. Ekspor hasil hutan dilakukan dalam bentuk olahan dengan rangkaian yang lebih panjang. Penegakan hukum terhadap penebangan kayu secara liar sudah terkendali.

Pengembangan peternakan dalam periode ke-5 ini sudah mandiri, mantap dan dikelola dengan prinsip produktif dan lestari. Bibit ternak unggul disediakan secara mandiri, diversifikasi produk peternakan dan pengolahannya telah mendorong perekonomian dan menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Hasil olahan ternak telah menjadi komoditas ekspor.

Bidang kelautan dan perikanan memiliki peran yang penting dalam mendukung perekonomian, laut lestari, dan penyerapan tenaga kerja. Industri pengolahan ikan sudah mapan dan menjadi andalan daerah. Demikian juga dengan pemanfaatan perikanan menunjukkan pengolahan lestari, lingkungan permukiman nelayan sudah memenuhi standar kesehatan. Kelautan menjadi daya tarik wisata bahari dalam skala besar.

Pada tahap ini investasi sudah sangat menarik bagi penanam modal, sektor produktif sudah berkembang, kawasan ekonomi potensial telah merata diberbagai wilayah. Pengembangan kawasan strategis diminati investor yang didukung oleh berbagai kemudahan melalui paket-paket deregulasi.

Perindustrian menjadi penting dalam perekonomian yang menunjukkan pola yang mantap, pertumbuhan industri diatas rata-rata nasional dan pada sektor unggulan telah bersaing dalam skala Asean. Produk unggulan daerah bersaing dalam pasar Asean, kawasan industri dan KEKI telah menembus pasar Asia-Pasific. Pengembangan perdagangan telah diterima dalam pasar Asia-Pasific, banyak kerjasama regional yang dibuat dan neraca perdagangan yang makin positif. Peran koperasi dan UKM dalam perekonomian makin dominan yang berkembang pada berbagai skala kegiatan.

Lingkungan alamiah dan budaya yang terpelihara menjadikan aset wisata yang berperan dalam skala nasional. Jaringan wisata nasional dan internasional sudah terbentuk dan Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu tujuan wisata di Indonesia. Pengelolaan pariwisata telah dilakukan secara profesional, tenaga ahli pariwisata telah mapan, serta industri pariwisata dan akomodasi juga telah siap dan sangat memadai. Secara umum Kalimantan Timur telah berdaya saing regional bahkan internasional.

Peran pertambangan dan migas nampak masih penting tetapi secara proporsional semakin menurun jumlah produksinya, akan tetapi kualitas pengolahannya semakin baik dan efisien. Peningkatan efisiensi dilakukan secara menerus, diversifikasi dan pengolahan sisa penambangan diolah sampai mendekati tidak mengandung bahan sisa yang harus dibuang.

### c. **Prasarana Dasar.**

Berbagai pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dengan terstruktur didukung oleh berbagai prasarana penunjang. Transportasi darat, laut, maupun udara memiliki peran sangat penting dalam mendukung pengembangan sektor produktif, membuka keterisolasian, maupun integrasi pembangunan antar wilayah.

Perhubungan darat melalui pembangunan jalan telah dapat menghubungkan antar pusat permukiman, pusat produksi, dan berbagai fungsi kawasan. Secara fisik jalan lintas Kalimantan telah jadi, jalan penghubung dalam provinsi sudah mencapai pelosok maupun pada kawasan perbatasan dan jalan antar negara telah dapat terhubung dengan baik. Jalan tol sudah beroperasi

untuk menghubungkan pusat pengolahan atau kawasan industri dan kawasan perkotaan yang intensitasnya sangat tinggi dengan kawasan pelabuhan laut dan bandar udara. Dukungan sistem intermoda telah berjalan dengan mapan.

Pada tahap ini pelabuhan laut menjadi salah satu tumpuan pergerakan barang dan orang dalam menunjang perdagangan sampai skala internasional melalui kegiatan ekspor – impor. Berbagai pelabuhan dalam skala regional dan nasional maupun pelabuhan perintis melayani sesuai fungsi masing-masing. Pelaksanaan berbagai deregulasi bidang kepabeanaan semakin mendorong kegiatan perdagangan.

Perkembangan transportasi udara untuk pergerakan lokal, nasional, maupun internasional telah sangat mapan, pelayanan bandara sangat efisien, dan menjadi pendorong perkembangan ekonomi Kalimantan Timur. Frekuensi penerbangan semakin banyak dan jumlah bongkar muat barang dan orang juga terus meningkat. Pengembangan bandara dengan jalur internasional juga telah mampu mendorong perkembangan pariwisata.

Sistem irigasi telah mampu mengaliri sawah yang menunjang swasembada penyediaan pangan. Pengembangan irigasi ini dilakukan melalui pembangunan bendungan dan waduk/embung yang mampu menampung saat musim hujan dan menjadi sumber pengairan utama saat musim kering.

Energi listrik telah dapat mensupply saat beban puncak baik pada permukiman perkotaan dan perdesaan, kawasan industri dan berbagai kebutuhan lain. Pengembangan sistem terpadu atau interconnected system, diversifikasi sumber pembangkit dan sistem pengamanannya telah memenuhi kebutuhan.

**d. Politik, Pemerintahan dan Penegakkan Hukum.**

Pada tahap ini pemerintahan telah berjalan dengan mantap, pelayanan pada masyarakat telah berlaku prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitasnya pada berbagai sektor, yang juga telah melakukan berbagai terobosan seperti e-government. Berbagai proses perijinan dilaksanakan dengan cara yang lebih sederhana tetapi tertib, investasi mengalir sesuai promosi. Berbagai proses debirokratisasi yang dijalankan menjadikan berbagai pelayanan publik berjalan dengan tertib dan mudah. Kualitas sumberdaya manusia juga semakin meningkat yang ditandai oleh berbagai perangkat telematika.

Pada tahap ke-5 ini bidang hukum menduduki tempat sentral dalam berbagai kehidupan. Perangkat hukum berjalan dengan sederhana dan efisien, efektif, penegakan hukum sesuai perundangan dengan kualitas sumberdaya manusia bidang hukum yang canggih. Kesadaran masyarakat akan hukum dalam pengertian hak dan kewajiban sebagai warga negara sudah sangat tinggi.

Media massa telah makin berperan secara profesional, proporsional dan seimbang dalam memberikan informasi tentang pembangunan dan kemasyarakatan serta dunia usaha. Media cetak dan elektronik menjadi kebutuhan utama masyarakat yang dilakukan dengan cara proporsional, terbuka dan bertanggungjawab. Kajian teknologi, sosial, ekonomi, budaya diinfomasikan secara seimbang dalam sajian ilmiah.

**e. Penataan Ruang dan Lingkungan.**

Pelaksanaan pembangunan pada tahap ini sangat kondusif dan didukung oleh masyarakat dan dunia usaha, dan berbagai pelaksanaan program pembangunan mengacu pada rencana tata ruang wilayah yang disepakati dan dikontrol oleh masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Struktur ruang wilayah dalam berbagai skala ruang telah menunjukkan efisiensi yang tinggi, terjadi keseimbangan wilayah yang lebih baik yang ditandai oleh kesenjangan yang makin menurun. Sentra ekonomi utama mendapat pelayanan berbagai prasarana dasar. Keseimbangan fungsi kawasan budidaya dan lindung telah terjadi, penyimpangan pemanfaatan ruang dapat dikontrol secara transparan dan menerus. Konsistensi terhadap penataan ruang ini juga semakin mendorong investasi daerah sesuai dengan potensi masing-masing.

Kawasan perbatasan telah berkembang, kerjasama antar wilayah mendorong pengembangan wilayah perbatasan, jalur ekonomi regional semakin menjadi bagian penting di kawasan perbatasan ini. Permukiman di perbatasan sudah memiliki kualitas yang setara dengan negara tetangga, pusat-pusat kegiatan masyarakat telah berkembang yang ditandai oleh seimbangannya pelayanan fasilitas dan utilitas umum di perbatasan.

Masyarakat Kalimantan Timur pada periode ini dapat dikatakan sebagai masyarakat madani dengan kesadaran lingkungan yang semakin baik. Kualitas permukiman di berbagai wilayah sudah memenuhi standar kesehatan hunian. Permukiman tradisional tetap terjaga dengan baik dan masyarakat juga mendapat keuntungan dari permukiman tradisional karena diantaranya ditetapkan sebagai aset wisata serta warisan budaya bangsa.

Permukiman transmigrasi telah berkembang menjadi pusat perdesaan, pusat perdagangan lokal yang memiliki hubungan dengan pasar regional. Permukiman transmigrasi yang potensial dan telah membentuk pusat perekonomian baru terus berkembang sebagai sentra pemasaran sekaligus sebagai pusat agroindustri dan agrobisnis.

Pada tahap ini pengetahuan masyarakat akan lingkungan hidup sudah berjalan dengan otomatis bahkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kepatuhan akan pengelolaan lingkungan menjadi kebiasaan, dan upaya menjaga keseimbangan alam dilakukan berbagai stakeholder, terutama dikontrol oleh masyarakat. Upaya penyelamatan lingkungan hidup berlangsung secara otomatis sehingga kualitas lingkungan sangat terjaga. Perlindungan flora dan fauna semakin menunjang biodiversity dan menjadi daya tarik penelitian dan pariwisata. Pendidikan lingkungan dilakukan makin disadari dan menjadi bagian bagi pendidikan formal dan informal maupun kegiatan sehari-hari masyarakat. Penegakan hukum bidang lingkungan semakin ditegakkan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.



## BAB VI

# PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 - 2025 berisi visi, misi, arah kebijakan dan strategi sebagai pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Kalimantan Timur merupakan wilayah dengan potensi yang sangat besar dan perlu dikembangkan secara terarah dengan dukungan seluruh stakeholder. Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan, RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Provinsi Kalimantan Timur menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD).

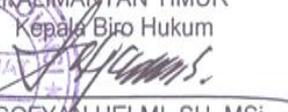
Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kalimantan Timur **“Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan”**, diperlukan adanya dukungan berupa:

1. Komitmen kepemimpinan yang kuat, adil dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan publik yang partisipatif;
3. Keberpihakan kepada masyarakat, serta
4. Peran aktif dunia usaha dan kemudahan dalam pengembangan investasi daerah di berbagai bidang.

**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

Ttd

**TARMIZI A. KARIM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
 KALIMANTAN TIMUR  
 Kepala Biro Hukum  
  
 H. SOFYAN HELMI, SH, MSI  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 550011071

